

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TA. 2022



BADAN NARKOTIKA NASIONAL
KABUPATEN GRESIK

PENGANTAR



uji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya, sehingga penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Narkotika Nasional Tahun 2022 ini dapat diselesaikan sesuai dengan target waktu yang ditentukan.

Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Gresik tahun anggaran 2022 telah menyelesaikan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja (Renja) sebagaimana Renproja tersebut memberikan arah dan fokus bagi pelaksanaan kegiatan BNN Kabupaten Gresik dibidang Pencegahan dan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dalam upaya peningkatan kinerja BNN untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja yang menjadi prasyarat terciptanya *good governance and clean governance*.

Laporan ini merupakan pertanggungjawaban BNN Kabupaten Gresik seperti yang tertuang dalam TAP MPR Nomor XI Tahun 1998 dan Undang–Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) menyebutkan bahwa penyelenggara Negara wajib mempertanggungjawabkan hasil akhir setiap program dan kegiatan yang telah dilakukan kepada masyarakat.

Hal ini menyiratkan bahwa keberadaan BNN Kabupaten Gresik selaku penyelenggara kegiatan P4GN di Indonesia menyampaikan hasil kinerjanya selama kurun waktu satu tahun. Dalam laporan ini disajikan target capaian kinerja BNN Kabupaten Gresik dalam tahun 2022 yang meliputi kinerja Satker di Lingkungan BNN Kabupaten Gresik yang diukur dengan menggunakan Matrik Pengukuran Kinerja sesuai dalam Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 29 Tahun 2010.

Melalui kerja keras serta dukungan dari seluruh Satker secara umum berbagai target berhasil dicapai cukup baik, bahkan ada beberapa indikator kinerja yang dapat dilampaui yaitu memberikan sosialisasi P4GN ke berbagai lingkungan sekolah dan masyarakat melebihi dari target yang direncanakan.

Laporan ini dapat menjadi acuan yang berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan suatu kegiatan pada tahun-tahun mendatang. Akhirnya, saya berharap agar Laporan Akuntabilitas Kinerja BNN Kabupaten Gresik Tahun 2022 ini dapat menjadi media pertanggungjawaban dan juga menjadi media evaluasi untuk menilai kinerja Badan Narkotika Nasional Kabupaten Gresik secara keseluruhan.

Demikian Semoga Tuhan Yang Maha Esa meridhoi usaha kita semua Amin.

Gresik, 02 Januari 2022
Kepala Badan Narkotika Nasional
Kabupaten Gresik



H. Kartono, SH., M.Hum.

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) RINGKASAN EKSEKUTIF

Badan Narkotika Nasional Kabupaten Gresik sebagai lembaga pemerintah non kementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden, untuk melaksanakan Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Dalam Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional Kabupaten Gresik tahun 2022 Program P4GN ditetapkan 8 sasaran strategis dengan 9 Indikator Kinerja Utama, dalam laporan ini setiap indikator dianggap berhasil apabila capaiannya diatas 87 % dengan uraian sebagai berikut :

Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai 3 Indikator Kinerja Kegiatan dengan 3 Sasaran kegiatan (Output) yaitu Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, dan Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN. Dari 3 indikator kinerja Kegiatan tersebut, hanya Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap penyalahgunaan narkoba belum dapat mencapai hasil sesuai yang ditargetkan, yaitu dari target 52 hanya mencapai 49,15. hal ini terjadi karena adanya error system pada saat pengisian kuisioner yang belum lengkap dan ketika responden telah melengkapinya namun keterangan di web/ aplikasi tidak terupdate.

Seksi Rehabilitasi mempunyai 3 Indikator Kinerja Utama dengan 2 Sasaran kegiatan (Output) yaitu Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkoba dan Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkoba di klinik rehabilitasi. Dari 3 indikator kinerja utama, terdapat 1 Indikator Kinerja yang belum tercapai, yaitu mengenai Indeks kepuasan layanan Klinik Rehabilitasi BNN Kabupaten Gresik. Dari Target 3.2 tahun ini realisasi hanya mencapai 3.1. Selain itu untuk indikator kinerja jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional dan Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM telah tercapai melebihi target yang telah ditentukan.

Seksi Pemberantasan mempunyai 1 Indikator Kinerja Utama dengan 1 Sasaran kegiatan (Output) yaitu Jumlah berkas perkara tindak pidana narkoba yang P-21. Dari 1 indikator kinerja utama, semuanya mencapai target yang ditentukan.

Bahkan untuk kasus yang terungkap dan P-21 mencapai 3 kasus dari semula target 1 kasus.

Bagian Umum mempunyai 2 Indikator Kinerja Utama dengan 2 Sasaran kegiatan (Output) yaitu Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien, dan Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur.

Pagu anggaran Badan Narkotika Nasional Kabupaten Gresik tahun 2022 untuk mendukung Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) diatas setelah dioptimalisasi sebanyak Rp. 1.901.606.000,- dengan total realisasi sebesar Rp. 1.882.563.236,- prosentase realisasi keuangan sebesar 99.00%.

Kendala tidak tercapainya target Realisasi keuangan sebesar 100 % tersebut disebabkan :

1. Adanya Kebijakan PPKM oleh Pemerintah Kabupaten Gresik selama masa Pandemi Covid 19 yang mengakibatkan tertundanya beberapa kegiatan.
2. SDM di lingkungan BNN Kabupaten Gresik yang terbatas;
3. Relawan atau penggiat yang dibentuk belum melaksanakan P4GN secara mandiri dan optimal.
4. Adanya tambahan anggaran untuk kegiatan TAT yang berasal dari buka blokir (*Open Automatic Adjustment*) namun, anggaran tersebut tidak dapat terserap 100% dikarenakan menurunnya rekomendasi TAT pada akhir tahun dari Polsek dan Polres Gresik.

BAB I PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menetapkan Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai lembaga Pemerintah Non Kementrian (LPNK) yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Oleh karena itu, BNN sebagai lembaga pemerintah berkewajiban menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) kepada Presiden sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

BNN Kabupaten Gresik melakukan Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dengan berbagai kegiatan melalui Bidang Pencegahan, Bidang Pemberdayaan Masyarakat, dan Bidang Pemberantasan. Melalui bidang tersebut BNN bersinergi dengan seluruh elemen/komponen bangsa untuk melakukan perlawanan terhadap kejahatan Narkoba.

Bidang Pencegahan dan pemberdayaan Masyarakat (P2M) melakukan kegiatan Desiminasi Informasi P4GN, Advokasi, dan Pemberdayaan Peran serta masyarakat. Bidang Rehabilitasi melakukan kegiatan pelaksanaan rehabilitasi penyalahgunaan Narkoba. Sedangkan Bidang Pemberantasan melakukan Pelaksanaan Penyidikan dan penyelidikan jaringan peredaran gelap narkotika serta pengawasan tahanan dan barang bukti narkotika.

Sementara itu untuk meningkatkan perhatian seluruh penyelenggara negara terhadap ancaman bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba, pemerintah telah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional di Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Tahun 2019-2024. Melalui Inpres ini menjadi dasar hukum bagi seluruh penyelenggara negara untuk menyusun Rencana Aksi P4GN di lingkungan instansi masing-masing. Untuk hal tersebut, BNN telah memfasilitasi penyusunan Rencana Aksi baik untuk Instansi Pemerintah Pusat maupun untuk Pemerintah Daerah. Filosofi penetapan Inpres tersebut adalah perlunya kebersamaan seluruh komponen masyarakat

bangsa dan negara melakukan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba agar permasalahan tersebut dapat segera dituntaskan.

Dalam Inpres tersebut, BNN ditugaskan untuk menjadi penjurong guna mengkoordinir laporan realisasi Rencana Aksi dari seluruh Kementerian/ Lembaga baik di Pusat maupun di daerah untuk dilaporkan secara berkala ke Presiden.

BNN Kabupaten Gresik yang merupakan kepanjangan dari BNN RI dan BNN Propinsi Jawa Timur secara kewilayahan. Wilayah kerjanya mencakup wilayah hukum dan wilayah geografis Kabupaten Gresik, BNN Kabupaten Gresik resmi menjadi Lembaga Negara yang Vertikal sejak bulan Januari 2012 dan menerima DIPA TA. 2022 dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA. 2022.

Dengan berakhirnya tahun anggaran 2022, BNN Kabupaten Gresik Satker dari BNN sebagai lembaga pemerintah yang telah menggunakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), wajib melaporkan Akuntabilitas Kinerja ke Presiden melalui Badan Narkotika Nasional Pusat. Laporan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun sebagai akuntabilitas kinerja atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BNN Kabupaten Gresik. Hal tersebut diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, serta atas Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.



Gambar Kondisi Demografi Wilayah Kabupaten Gresik

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Presiden RI Nomor 23 tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.
6. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
7. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi Tata Kerja Badan Narkotika Nasional.
8. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 4 Tahun 2010 tentang Organisasi Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Kabupaten / Kota.
9. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor: 03 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/ Kota;

C. Tugas Pokok & Fungsi Organisasi serta Struktur

1. Kedudukan.

Badan Narkotika Nasional Kabupaten Gresik (BNNK) adalah Lembaga Pemerintah Vertikal yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Badan Narkotika Nasional Propinsi dan Badan Narkotika Nasional, BNNK dipimpin oleh seorang Kepala.

2. Tugas.

Melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang BNN dalam Wilayah Kabupaten Gresik.

3. Fungsi.

Dalam melaksanakan tugasnya, BNN Kabupaten Gresik menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan kebijakan teknis P4GN di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat dan rehabilitasi;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis P4GN di bidang pemberantasan dalam rangka pemetaan jaringan kejahatan terorganisasi penyalahgunaan dan

peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol dalam wilayah Kabupaten Gresik;

- c. Pelaksanan kerjasama dengan instansi terkait;
- d. Penyusunan rencana program dan anggaran BNN Kabupaten Gresik;
- e. Evaluasi penyusunan laporan BNN Kabupaten Gresik;
- f. Pelayanan administrasi BNN Kabupaten Gresik;

4. Kewenangan.

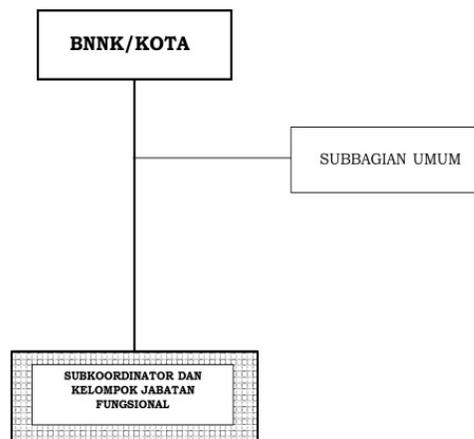
Kewenangan BNN Kabupaten Gresik secara umum terlihat secara implisit pada tugasnya, namun kewenangan yang dikhususkan oleh undang-undang adalah tugas dalam melaksanakan pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba, serta BNN Kabupaten Gresik berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan.

D. Struktur Organisasi.

Sebagaimana Surat Keputusan Kepala BNN No. 06 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja BNN RI. bahwa Susunan BNN Propinsi terdiri dari:

- a. Kepala;
- b. Sub Bagian Umum;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Penjelasan lebih lanjut mengenai Struktur Organisasi dapat dilihat dalam Surat Keputusan Kepala BNN RI No. 06 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja BNN Kabupaten RI., sebagaimana Gambar 1.2.



Kepala BNNK/ Kota mempunyai tugas memimpin BNNK/ Kota dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang BNN dalam wilayah Kabupaten/ Kota, dan mewakili Kepala BNN dalam melaksanakan hubungan kerja sama P4GN dengan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam wilayah Kabupaten/ Kota.

Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana program dan anggaran, pengelolaan sarana prasarana dan urusan rumah tangga, pengelolaan data informasi P4GN, layanan hukum dan kerja sama, urusan tata persuratan, kepegawaian, keuangan, kearsipan, dokumentasi, hubungan masyarakat, dan penyusunan evaluasi dan pelaporan dalam wilayah BNNK/ Kota.

Di lingkungan BNNK/ Kota dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kelompok Jabatan fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan/ atau Jabatan Administrator sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

E. Sistematika Penyajian

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) di bidang Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba ini, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan

Dalam bab ini diuraikan mengenai gambaran umum BNN Kabupaten Gresik, antara lain Latar belakang, Dasar Hukum, Kedudukan, Tugas Pokok, Kewenangan dan Fungsi, dan Struktur Organisasi BNN.

Bab II. Perencanaan Strategis

Dalam bab ini diikhtisarkan beberapa hal penting dalam perencanaan strategis dan perjanjian kinerja yang meliputi penjelasan secara ringkas rencana strategis (Renstra) dan penetapan kinerja tahun 2022.

Bab III. Akuntabilitas Kinerja

Dalam bab ini diuraikan pencapaian sasaran-sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan indikator kinerja BNNK tahun 2022, dengan uraian kegiatan yang dilakukan

berdasarkan penetapan kinerja dan Pengukuran Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022.

Bab IV. Penutup

Bab V. Lampiran-Lampiran

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Program Kerja

Perencanaan merupakan proses secara sistematis dan berkelanjutan dari putusan yang beresiko, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasi secara sistematis melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisir dan sistematis. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas program agar mampu eksis dan unggul dalam persaingan ketat dalam lingkungan yang berubah secara cepat, maka suatu instansi harus terus menerus melakukan perubahan ke arah perbaikan.

BNNK memiliki tugas, fungsi dan wewenang BNN dalam wilayah Kabupaten Gresik, bertujuan meningkatkan daya tangkal (imunitas) masyarakat guna mewujudkan masyarakat Indonesia bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Salah satu tujuan tersebut ada di dalam sasaran Kinerja BNN tahun 2021 dan menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan BNNK.

Dalam penyusunan Visi dan Misi Tahun 2020-2024, BNN berpedoman atau mengacu pada visi dan misi presiden terpilih periode 2020-2024 sebagai berikut:



Visi BNN 2020-2024 merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang ingin dicapai oleh BNN pada akhir periode perencanaan. Visi BNN juga memperhatikan Grand Desain BNN 2018-2045, dimana dalam Grand Desain tersebut terdapat tiga tahapan periode dalam mewujudkan organisasi BNN yang diinginkan pada tahun 2045. Periode pertama yakni tahun 2018-2025 menekankan pada upaya BNN sebagai organisasi yang mampu membangun kepedulian masyarakat ataupun *stakeholder* terhadap ancaman bahaya narkoba dengan intervensi dari sistem hukum dan pengawasan atau intelijen. Tahapan-tahapan dalam Grand Desain BNN 2018-2045 dapat dijelaskan dalam gambar berikut :



Gambar Tahapan dalam Grand Design BNN 2018-2045

Berdasarkan tahapan dalam Grand Desain BNN 2018-2045 dan memperhatikan visi dan misi Presiden RI Tahun 2020-2024, BNN merumuskan visi dan misi Tahun 2020-2024 yang merupakan penerjemahan atau penyelarasan atas visi dan misi Presiden sebagai berikut :



Gambar Penerjemahan Visi Misi Presiden 2020-2024 dalam Visi Misi BNN 2020-2024

Sebagai penerjemahan visi Presiden 2020-2024, maka BNN merumuskan visi sebagai berikut: “Mewujudkan masyarakat yang terlindungi dan terselamatkan dari kejahatan narkoba dalam rangka menuju Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”. Sementara itu, rumusan misi BNN 2020-2024 merupakan penjabaran misi Presiden khususnya pada misi ke-6 yakni “*Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya*”, sekaligus sebagai operasionalisasi perwujudan salah satu janji Presiden yakni “*Melanjutkan Pemberantasan Narkoba dan Psikotropika Untuk Melindungi Generasi Muda*”.

Rumusan misi BNN diformulasi secara komprehensif dengan penekanan pada pentingnya memberdayakan masyarakat dan menguatkan BNN secara organisasi. Visi Misi akan menjadi arahan dan acuan dalam menentukan tindakan BNN pada periode 2020-2024, sehingga diharapkan melalui upaya pemberantasan peredaran gelap narkoba secara profesional dan pelaksanaan pencegahan penyalahgunaan narkoba secara komprehensif serta pengembangan kapasitas kelembagaan mampu memberikan pelayanan publik yang maksimal sehingga mampu menyelamatkan dan melindungi masyarakat dari ancaman bahaya narkoba. Rumusan misi BNN tahun 2020-2024 sebagai berikut:

1. Memberantas Peredaran Gelap dan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika secara Profesional
Pemberantasan peredaran gelap narkoba

merupakan salah satu tugas dan fungsi BNN dalam mendukung upaya pemerintah Indonesia untuk menanggulangi permasalahan Narkoba. Jaringan peredaran gelap narkoba dalam *scope* global juga sering bertransformasi menjadi kejahatan transnasional lainnya sehingga dalam upaya pemberantasan peredaran gelap narkoba perlu diperhatikan intervensi dan proses bisnis yang mampu menjangkau tindakan pemberantasan yang luas dan tidak sempit. Tindakan pemberantasan yang dilakukan BNN harus menekankan profesionalitas dalam rangka penanganan dan penanggulangan permasalahan narkoba, dikarenakan tindak pemberantasan peredaran gelap narkoba memiliki jangkauan yang sangat luas baik secara spasial maupun secara arsitektur kinerja. Misi ini juga mengusung muatan pencegahan penyalahgunaan narkoba sebagai intervensi yang dilakukan dalam menekan peningkatan penyalahgunaan narkoba secara menyeluruh. Artinya upaya-upaya pencegahan penyalahgunaan selain harus dilaksanakan secara optimal oleh BNN juga harus dapat memanfaatkan sumber daya masyarakat untuk berperan

dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba.

2. Meningkatkan Kemampuan Lembaga Rehabilitasi dan Pemberdayaan Ketahanan Masyarakat terhadap Kejahatan Narkotika Misi ini merupakan salah satu acuan dalam melaksanakan tugas dan fungsi BNN untuk mewujudkan masyarakat yang terselamatkan dan terlindungi dari ancaman bahaya narkoba. Salah satu tahapan akhir untuk menekan angka penyalahgunaan narkoba adalah memulihkan para pecandu, penyalah guna dan/atau korban penyalahgunaan narkoba. Secara konseptual, pelaksanaan pemulihan penyalah guna narkoba bukan perkara mudah karena memerlukan keberlanjutan penanganan dari keberdayaan masyarakat yang tanggap dalam memerangi narkoba hingga *treatment* terhadap penyalah guna agar tidak *relapse*. Hal tersebut membuat upaya rehabilitasi yang selama ini telah dilaksanakan perlu didukung dan difasilitasi oleh BNN sebagai *leading sector* penanganan permasalahan narkoba. Misi ini pun menitikberatkan pada sinergitas upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba baik melalui edukasi maupun diseminasi informasi lintas sektoral, peran serta masyarakat, hingga upaya rehabilitasi berkelanjutan.

3. Mengembangkan dan Memperkuat Kapasitas Kelembagaan Pengembangan dan penguatan kapasitas kelembagaan merupakan suatu keharusan bagi entitas birokrasi dalam mengemban amanah dalam pemerintahan. Terlebih, dalam Visi Misi Presiden 2020-2024 termaktub dua poin yang harus diselaraskan oleh struktur birokrasi baik level Kementerian/Lembaga maupun Pemerintah Daerah. Poin tersebut mengenai reformasi birokrasi dan akuntabilitas pengelolaan APBN. Sedangkan BNN sendiri sangat memerlukan pengembangan dan penguatan kapasitas kelembagaan. Upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang memiliki ruang lingkup sangat luas memerlukan daya dukung kelembagaan yang profesional dan berkinerja tinggi. Manajemen organisasi yang baik serta struktur organisasi yang proporsional akan menghasilkan *supporting system* yang mendukung *core process* BNN dalam mewujudkan visi organisasi maupun sasaran pembangunan nasional. Selain itu hakikat organisasi pemerintah adalah memberikan pelayanan publik secara optimal yang harus melekat dalam tujuan penguatan dan pengembangan kelembagaan. Oleh karenanya, selain misi yang menekankan pada substansi tugas dan fungsi, BNN juga mengusung misi mengembangkan dan menguatkan kapasitas kelembagaan dalam rencana strategis periode 2020-2024.

B. Rencana Kerja Tahunan & Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Penetapan Kinerja merupakan tekad dan janji kinerja tahunan yang akan dicapai, antara pimpinan instansi pemerintah/ lembaga yang menerima amanah/ tanggung jawab dengan pihak yang memberikan amanah/ tanggung jawab kinerja. Penetapan Kinerja merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah, sekaligus sebagai pimpinan suatu unit/ organisasi atau instansi kepada atasan langsungnya. Penetapan Kinerja berisikan sasaran strategis, indikator kinerja dan target yang akan dicapai melalui program yang ada pada lembaga/ instansi yang bersangkutan. Adapun Penetapan Kinerja/ Perjanjian Kerja BNN Kabupaten Gresik sebagai berikut :

Tabel. Penetapan Kinerja/ Perjanjian Kerja BNN Kabupaten Gresik

c	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	T a r g e t
1	2	3	4
1	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	52,00
2	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	78,67
3	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Indeks Kemandirian Partisipasi	3,20
4	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional	1 Lembaga
		Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM	1 Unit
5	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika di Klinik Rehabilitasi	Indeks kepuasan layanan Klinik Rehabilitasi BNN Kabupaten Gresik	3,2
6	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21	1 Berkas
7	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran BNN Kabupaten Gresik	87
8	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Kabupaten Gresik	95

Anggaran :

1. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Rp	77.600.000
2. Kegiatan Penyelenggaraan Advokasi	Rp	123.000.000
3. Kegiatan Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat	Rp	216.525.000
4. Kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	Rp	12.850.000
5. Kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	Rp	85.110.000
6. Kegiatan Pascarehabilitasi Penyalahguna dan/ atau Pecandu Narkoba	Rp	9.100.000
7. Kegiatan Penyidikan Jaringan Gelap Peredaran Gelap Narkotika	Rp	70.000.000
8. Kegiatan Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti	Rp	43.150.000
9. Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	Rp	132.566.000
10. Kegiatan Pengembangan Organisasi, Tatalaksana, dan Sumber Daya Manusia	Rp	19.720.000
11. Kegiatan Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	Rp	32.872.000
12. Kegiatan Penyelenggaraan Ketatausahaan, Rumah Tangga, dan Pengelolaan Sarana Prasarana	Rp	1.052.240.000
13. Kegiatan Penyelenggaraan Kehumasan dan Keprotokolan	Rp	20.000.000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA BNN KABUPATEN GRESIK

A. Analisis Capaian Sasaran

Penetapan Kinerja BNN Kabupaten Gresik tahun 2022 menetapkan sasaran strategis yang akan dicapai, yaitu terselenggaranya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Kabupaten Gresik.

Untuk menggambarkan capaian kinerja BNN Kabupaten Gresik tahun 2022 dilakukan melalui pelaksanaan monitoring dan evaluasi untuk mengetahui sejauh mana efektivitas pelaksanaan program P4GN.

Berikut ini disajikan evaluasi capaian kinerja dengan sasaran kinerja Meningkatnya pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba secara efektif di Kabupaten Gresik dan indikator kinerja dengan uraian sebagai berikut :

1. Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika :

Indikator Keluaran Kinerja (IKK)	Target	Realisasi	%
Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	52	49.15	94,52

Indikator Kinerja Utama (IKU) tentang Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba diukur dari moneyv pengukuran pelaksanaan program P4GN pada aplikasi Dektari yang dilakukan pada akhir Tahun Anggaran 2022 di Wilayah Kabupaten Gresik. Indeks Ketahanan Diri Remaja terhadap penyalahgunaan Narkoba adalah nilai tingkat kemampuan kalangan remaja dalam mengendalikan diri, menghindar dari, dan menolak segala bentuk dorongan, keinginan, atau pengaruh untuk menyalahgunakan Narkoba.

Pengukurannya menggunakan cara survei ketahanan diri kepada kalangan remaja secara sampling dengan menggunakan instrumen ukur ketahanan diri (Anti Drug Scale) yang mencakup 3 dimensi, yaitu Self Regulation yang didefinisikan

sebagai kemampuan untuk mengontrol impuls, emosi, dan pengaruh lingkungan terhadap diri. Dimensi Assertiveness yang didefinisikan sebagai kemampuan untuk mengutarakan secara langsung apa yang diinginkan atau tidak diinginkan kepada orang lain secara tegas. Dimensi Reaching Out yang didefinisikan sebagai kemampuan untuk meningkatkan aspek positif kehidupan dengan cara menerima tantangan atau menggunakan kesempatan serta meningkatkan keterhubungan dengan orang lain.

Dari target yang ditetapkan sebesar 52 hanya dapat terealisasi sebesar 49.15 (Sangat Rendah), hal ini menurun dari capaian tahun lalu sebesar 0.60, pada tahun lalu capaian yang diperoleh yaitu 49.75 (Sangat Rendah). dengan dasar perhitungan pada surat kepala deputi pencegahan BNN RI nomor : B/3960/XI/DE/PC.00.01/2022/BNN Tanggal 30 November 2022, perihal : hasil perhitungan indeks ketahanan diri remaja terhadap penyalahgunaan narkoba (Dektari) Direktorat Informasi dan Edukasi Tahun 2022. Realisasi capaian dapat diraih karena adanya dukungan yang positif & peran aktif dari masing-masing peserta terhadap program ini.

Dalam hal meningkatkan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba, tahun 2022 merupakan tahun pertama pelaksanaan indikator kinerja ini, masih terdapat beberapa kendala terkait pelaksanaan penilaian Dektari, diantaranya :

- Kurangnya sosialisasi terkait cara perhitungan dektari.
- Terdapat responden yang tidak mengisi penuh seluruh kuisisioner sehingga mempengaruhi nilai indeks

Hal ini harus menjadi perhatian untuk tahun yang mendatang agar dapat tercapai hasil sesuai dengan yang ditargetkan dan yang diharapkan. Selanjutnya untuk tindak lanjut kedepan dapat juga menerapkan langkah-langkah sebagai berikut :

- Pelaksanaan pendampingan dalam pengisian dektari sehingga tidak hanya sekedar share link, dengan demikian pengisian kuisisioner akan mencapai target.

2. Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba :

Indikator Keluaran Kinerja (IKK)	Target	Realisasi	Ket.
Indeks Ketahanan Diri Keluarga Terhadap penyalahgunaan narkoba	78.67	96.34	Sangat tinggi

Indikator Kinerja Utama (IKU) tentang Indeks Ketahanan Diri Keluarga Terhadap penyalahgunaan narkoba diukur dari monev/ supervisi pengukuran pelaksanaan program P4GN yang dilakukan pada akhir Tahun Anggaran 2022 di Institusi/ Lembaga yang telah mendapatkan pembekalan Advokasi Program Ketahanan Keluarga Berbasis Sumber daya Desa melalui kegiatan Intervensi ketahanan keluarga berbasis sumber daya pembangunan desa di wilayah Kecamatan Menganti.

Dari target yang ditetapkan sebesar 78.67 dapat terealisasi sebesar 96.34 (Sangat tinggi), hal ini meningkat dari capaian tahun lalu sebesar 7.59, yaitu pada tahun lalu capaiannya sebesar 88.75 (Sangat tinggi) dengan dasar perhitungan pada surat kepala deputi pencegahan BNN RI nomor : B/4072/XII/DE/PC.01.03/2021/BNN Tanggal 07 Desember 2022, perihal : hasil perhitungan indeks ketahanan diri keluarga terhadap penyalahgunaan narkoba (Dektari) Direktorat Informasi dan Edukasi Tahun 2022. Realisasi capaian dapat diraih karena adanya dukungan dari keluarga sebagai peserta kegiatan sangat positif dan berperan aktif dalam mendukung kegiatan ini.

- Adanya beberapa perubahan juknis membuat masih terdapat beberapa kendala terkait pelaksanaan penilaian Dektara dan Kurangnya sosialisasi terkait cara perhitungan dektara dan cara mengisi kuisisionernya.
- Kurangnya kompetensi dan jumlah SDM dalam seksi P2M sehingga pelaksanaan kegiatan dirasa kurang optimal.

Hal ini harus menjadi perhatian untuk tahun yang mendatang agar dapat tercapai hasil sesuai dengan yang ditargetkan dan yang diharapkan. Selanjutnya untuk tindak lanjut kedepan dapat juga menerapkan langkah-langkah sebagai berikut :

- Pelaksanaan pendampingan dalam pengisian dektara sehingga tidak hanya sekedar share link, dengan demikian pengisian kuisisioner akan mencapai target.

Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba adalah nilai tingkat kemampuan keluarga dalam menangkal dan melindungi diri dan keluarga dari penyalahgunaan narkoba yang berasal dari internal maupun eksternal. Pengukurannya menggunakan cara survei ketahanan keluarga secara sampling pada wilayah kerja BNNK dengan menggunakan instrumen SDQ (*Strengths and Difficulties Questionnaires*), PAFAS (*Parent And Family Adjustment Scales*), dan CYRM (*Child and Youth Resiliences Measure*).

3. Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN :

Indikator Keluaran Kinerja (IKK)	Target	Realisasi	Ket.
Indeks Kemandirian Partisipatif	3, 21	3.29	100

Indikator Kinerja Utama (IKU) tentang Indeks Kemandirian Partisipatif diukur dari monev/ supervisi pengukuran Kemandirian Partisipatif dalam pelaksanaan program P4GN yang dilakukan pada akhir Tahun Anggaran 2022 di Institusi/ Lingkungan yang telah mendapatkan pembekalan pelatihan dan pembinaan Masyarakat Anti Narkoba di Wilayah Kabupaten Gresik.

Indeks Kemandirian Partisipasi (IKP) adalah angka capaian peran serta dan kemandirian masyarakat (para Pegiat Anti Narkoba) di lingkungan masing masing dalam upaya P4GN yang terdiri dari; lingkungan kerja (pemerintah dan swasta), lingkungan pendidikan dan lingkungan masyarakat (desa, kelurahan, komunitas, orsosmas, LSM, paguyuban, dll) dan masyarakat rawan dan rentan narkoba;

Adapun instrumen untuk mengukur indeks tersebut terdiri dari 6 pertanyaan yang terdiri dari variabel sebagai berikut :

- a. SDM; adanya pelaku/pelaksana (tokoh dan pegiat anti narkoba) sebagai figur yang biasa menyuarakan, mengajak, dan berbuat P4GN di dalam dan di luar lingkungannya.
- b. Metode; adanya metode dalam pelaksanaan P4GN (Pelatihan, Konseling, dan Pelaksanaan Tes Urine) atau kegiatan lain yang membawa pesan P4GN.
- c. Anggaran; adanya dukungan anggaran P4GN untuk melaksanakan kegiatan P4GN di dalam dan di luar lingkungan masing – masing.

- d. Material; adanya sarana dan prasarana yang diadakan melalui kreativitas dan inovasi untuk mendukung pelaksanaan kegiatan P4GN di dalam dan di luar lingkungannya.
- e. Sistem (Kebijakan); adanya sistem, regulasi, aturan mengikat yang digunakan untuk mendukung atau memperkuat pelaksanaan kegiatan P4GN di lingkungannya.
- f. Aktivitas; adanya kegiatan P4GN yang dilaksanakan baik sebelum dan sesudah pembentukan Penggiat Anti Narkoba.

Dari target yang ditetapkan sebesar 3,21 dapat terealisasi sebesar 3.29, walaupun pada tahun ini target dapat tercapai namun nilai indeks kemandirian partisipatif masyarakat pada tahun 2022 menurun dari tahun sebelumnya sebanyak 0.40 yaitu 3,69 dengan dasar perhitungan melalui penyebaran angket Indeks Kemandirian Partisipatif yang disebar ke masing-masing peserta kegiatan pemberdayaan masyarakat. Realisasi capaian dapat diraih karena adanya peran aktif peserta kegiatan dalam mendukung P4GN di lingkungannya.

Dari beberapa Institusi/ lingkungan yang ada di Kabupaten Gresik, yang telah mendapatkan pelatihan dan pembinaan masyarakat anti narkoba 4 (Empat) lembaga yaitu :

1. Lingkungan Pemerintahan : Kesbangpol Kab. Gresik (nilai IKP = 4/ sangat mandiri)
2. Lingkungan Pendidikan : Dinas Pendidikan Kab. Gresik (nilai IKP = 3.52/ sangat mandiri)
3. Lingkungan Swasta : PT. KIG (nilai IKP = 2.6/ mandiri)
4. Lingkungan Masyarakat : TP PKK Kab. Gresik (nilai IKP = 3.16/ mandiri)

Namun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala diantaranya :

- Belum adanya regulasi terkait fasilitasi P4GN sehingga masih adanya lembaga yang belum dapat berpartisipasi secara aktif terkait program P4GN di lingkungannya.
- Penunjukan peserta kegiatan yang terkesan asal-asalan dari Instansi/ lembaga asal, sehingga program yang telah disusun di rencana aksi oleh para penggiat pada saat kegiatan bimtek tidak dapat terlaksana.
- Kurangnya kompetensi dan jumlah SDM dalam seksi P2M sehingga pelaksanaan kegiatan dirasa kurang optimal.

Hal ini harus menjadi perhatian untuk tahun yang mendatang agar dapat tercapai hasil yang lebih baik sesuai dengan yang diharapkan. Selanjutnya untuk tindak lanjut kedepan dapat juga menerapkan langkah-langkah sebagai berikut :

- Pendampingan Penggiat dalam melaksanakan tugas dilingkungannya dengan tujuan meningkatkan mutu dan kualitas Penggiat sehingga mampu mengidentifikasi dirinya sebagai bagian agen perubahan permasalahan narkoba di lingkungannya.
- Audiensi dengan Pemkab Gresik untuk meningkatkan komitmen dari Pemkab Gresik dalam upaya Fasilitasi P4GN di Wilayah Kab. Gresik
- Koordinasi terkait percepatan pembuatan regulasi tentang Fasilitasi P4GN di Wil. Kab. Gresik.
- Koordinasi secara lebih mendalam terkait penjelasan program kepada lingkungan yang akan menjadi peserta kegiatan.

4. Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkoba :

Indikator Keluaran Kinerja (IKK)	Target	Realisasi	Ket.
jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional	1	3	Lembaga

Indikator Kinerja Utama (IKU) tentang jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional diukur dari monev/ supervisi pengukuran kinerja pelaksanaan program Rehabilitasi yang dilakukan pada akhir Tahun Anggaran 2022 baik oleh BNN Kabupaten Gresik, BNN Provinsi Jawa Timur maupun BNN RI.

Lembaga rehabilitasi narkoba yang memenuhi standar adalah lembaga rehabilitasi yang telah memperoleh intervensi peningkatan kemampuan oleh BNN dalam rangka meningkatkan kualitas layanannya dan mampu memenuhi standar layanan.

Pengukurannya dilakukan dengan cara mendata jumlah lembaga rehabilitasi narkoba yang telah mampu mempertahankan dan memenuhi standar layanan dalam satu tahun anggaran.

Fasilitas Rehabilitasi milik Komponen Masyarakat di Kabupaten Gresik yang dianggap memadai dan telah melakukan perjanjian Kerjasama dengan BNN yaitu

Klinik Pratama BNN Kabupaten Gresik, RSUD Ibnu Sina Gresik, dan Rumah Rehabilitasi Supri Soli.

Faktor pendukung keberhasilan pada kegiatan kali ini yaitu Jumlah fasilitas rehabilitasi milik Instansi Pemerintah yang operasional yang dianggap memadai dilihat dari kriteria, yaitu :

1. Dokter di Klinik Pratama BNN Kabupaten Gresik yang menangani masalah rehabilitasi telah mengikuti Bimtek mengenai masalah penanggulangan pasien narkoba.
2. Klinik Pratama BNN Kabupaten Gresik memiliki fasilitas yang cukup dan memadai untuk melakukan kegiatan rehabilitasi rawat jalan pasien Rehab.
3. Telah terbitnya Skep Tempat Rehabilitasi Rawat Jalan Instansi Pemerintah dari BNN RI sebagai dasar melaksanakan kegiatan fasilitasi pasien rehab.

Namun selain faktor keberhasilan juga terdapat beberapa kendala, diantaranya :

1. Saat ini beberapa Rumah sakit masih fokus terhadap penanganan masalah pandemi COVID-19.
2. Dengan adanya pembiayaan mandiri terhadap pelayanan perawatan rehabilitasi di LRKM mengakibatkan masyarakat kurang berkenan untuk mengikuti perawatan rehabilitasi di RS tersebut.

Dengan adanya beberapa permasalahan seperti yang disebutkan diatas, maka untuk kedepannya perlu ditingkatkan lagi sosialisasi terkait program rehabilitasi pengguna narkoba di Klinik BNNK Gresik atau RS yang telah SPK dengan BNN.

Indikator Keluaran Kinerja (IKK)	Target	Realisasi	Ket.
Jumlah unit penyelenggara layanan Intervensi Berbasis Masyarakat	1	1	Unit

Unit penyelenggara layanan Intervensi Berbasis Masyarakat adalah unit atau kelompok masyarakat yang menyelenggarakan kegiatan pendampingan dan pemberian dukungan pemulihan hingga bimbingan lanjut bagi penyalah guna, korban penyalahgunaan dan/ atau pecandu narkoba di lingkungannya.

Pengukurannya dilakukan dengan cara mendata jumlah unit penyelenggara layanan intervensi berbasis masyarakat yang telah terbentuk dan mampu

menyelenggarakan layanan pendampingan dan pemberian dukungan pemulihan hingga bimbingan lanjut bagi penyalah guna, korban penyalahgunaan dan/atau pecandu narkoba di lingkungannya dalam satu tahun anggaran.

Pada tahun 2022 ini Jumlah unit penyelenggara layanan Intervensi Berbasis Masyarakat difokuskan pada satu Desa yaitu Desa Domas, Kec. Menganti, Kab. Gresik.

Dengan terbentuknya unit IBM di Desa Domas sebagai suatu perwujudan dari adanya peran aktif warga khususnya kepala desa dan perangkat terkait dalam kegiatan dan mendukung P4GN di lingkungannya. Namun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala diantaranya :

- Para petugas IBM/ AP sebagian adalah pekerja sehingga kurang efektif dalam mencapai target tercapainya pasien rehab.

Hal ini harus menjadi perhatian untuk tahun yang mendatang agar dapat tercapai hasil yang lebih baik sesuai dengan yang diharapkan. Selanjutnya untuk tindak lanjut kedepan dapat juga menerapkan langkah-langkah sebagai berikut :

- Koordinasi secara lebih mendalam terkait penjelasan program kepada lingkungan yang akan menjadi sasaran target peserta kegiatan.
- Kurangnya kompetensi dan jumlah SDM dalam seksi Rehabilitasi sehingga pelaksanaan kegiatan dirasa kurang optimal.

5. Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkoba di klinik rehabilitasi :

Indikator Keluaran Kinerja (IKK)	Target	Realisasi
Indeks kepuasan layanan rehabilitasi	3.2	3.1

Indikator Kinerja Utama (IKU) tentang Indeks kepuasan layanan rehabilitasi diukur dari monev/ supervisi pengukuran kinerja pelaksanaan program Pemberantasan yang dilakukan pada akhir Tahun Anggaran 2021 di lingkungan klinik Pratama BNN Kabupaten Gresik.

Indeks kepuasan layanan rehabilitasi adalah ukuran tingkat kepuasan masyarakat penerima layanan (residen, keluarga residen, dan masyarakat sekitar tempat pelayanan rehabilitasi) terhadap layanan fasilitas rehabilitasi.

Pengukuran Indeks kepuasan layanan rehabilitasi dilakukan melalui survei kepada residen, keluarga residen dan masyarakat sekitar tempat layanan rehabilitasi dengan instrumen kuesioner kepuasan layanan yang mengacu pada KepMenPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah.

Dari target yang ditetapkan sebesar 3,2 dapat terealisasi sebesar 3,1, hasil tersebut menurun dari hasil tahun sebelumnya yaitu 3,2 terjadi penurunan sebesar 0,1. Dasar perhitungan dari hasil survey kepuasan layanan rehabilitasi. Realisasi capaian belum dapat diraih secara maksimal karena adanya beberapa permasalahan diantaranya :

- Adanya kebijakan terkait PPKM pada saat itu sehingga kegiatan sedikit terhambat dalam melaksanakan konseling tatap muka secara langsung, karena jika dilakukan secara daring dirasa kurang efektif seperti terkendala pada jaringan internet, dll.
- Kurangnya kompetensi dan jumlah personil SDM dalam seksi Rehabilitasi sehingga pelaksanaan kegiatan dirasa kurang optimal.

Selanjutnya untuk kedepan dapat dipertahankan dan ditingkatkan untuk menjadi lebih baik lagi. Diantaranya Peningkatan sarana & prasarana klinik untuk meningkatkan kualitas konseling. Serta meningkatkan kualitas petugas klinik untuk pelayanan yang lebih baik.

6. Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya :

Indikator Keluaran Kinerja (IKK)	Target	Realisasi	Ket.
Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21	1	3	Berkas

Berkas perkara tindak pidana narkotika yang P-21 adalah berkas perkara penyidikan tersangka tindak pidana narkotika yang terjadi pada selain wilayah interdiksi yang dinyatakan lengkap oleh Jaksa Peneliti (P-21) untuk dilakukan penuntutan.

Pengukurannya menggunakan cara mengakumulasi jumlah capaian penyelesaian berkas perkara tersangka kasus tindak pidana narkotika yang terjadi

pada selain wilayah interdiksi yang dinyatakan lengkap oleh Jaksa Peneliti (P-21) untuk dilakukan penuntutan dari unit Pusat dan Vertikal.

Dari target 1 berkas Jumlah Berkas Perkara Tindak Pidana Narkotika yang P-21 BNN Kabupaten Gresik mampu menyelesaikan 3 (Tiga) berkas di tahun anggaran 2022, dengan rincian tersangka sebagai berikut :

No	Jumlah Data Penyalahgunaan Narkotika di BNNK Gresik 2022		
	Nama	Jenis kelamin	Barang Bukti
1	ABDUL MAJID	L	11 (sebelas) pak plastik berisi Narkotika jenis Sabu dengan rincian masing-masing berat brutto beserta plastiknya : a. 0.59 (nol koma lima sembilan) gram; b. 0.6 (nol koma enam) gram; c. 0.59 (nol koma lima sembilan) gram; d. 0.61 (nol koma enam satu) gram; e. 0.37 (nol koma tiga tujuh) gram; f. 1.2 (satu koma dua) gram; g. 1.11 (satu koma sebelas) gram; h. 0.37 (nol koma tiga tujuh) gram; i. 0.34 (nol koma tiga empat) gram; j. 0.34 (nol koma tiga empat) gram; k. 0.31 (nol koma tiga satu) gram.
2	KHOIRUL SETIAWAN	L	
3	AKHMAD MUZAYIN	L	
4	MARHEN WIDYA PUTRA	L	1 (satu) pak plastic berisi Narkotika jenis Sabu dengan rincian masing-masing berat brutto beserta plastiknya 0.34 (nol koma tiga empat) gram
5	ROBBY ADYAKSA	L	GANJA KERING 3 KILOGRAM

Untuk jumlah Barang bukti dari hasil ungkap jaringan narkotika di wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2020 dengan rincian sebagai berikut :

1. Narkotika jenis **Sabu/ Methamphetamine** sebanyak 6.43 gram
2. Narkotika jenis pil **Ganja** sebanyak 3 Kg

Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, keberhasilan seksi pemberantasan tentu sangat tergantung dari adanya peran serta masyarakat yang ikut serta mendukung dan juga kekompakan petugas dilapangan dalam melakukan profiling terhadap target sebelum dilakukannya RPE (*Raid Planing Execution*)/ Penangkapan.

Mengingat dari beberapa tersangka yang diamankan petugas selama kurun waktu setahun ini berasal dari berbagai usia dari 18 (delapan belas) tahun hingga 30 (tiga puluh) tahun dan juga jenis pekerjaan baik pekerja kasar hingga manager tentu merupakan hal yang sangat memprihatinkan, dengan fakta lain jika Narkoba telah masuk kesemua kalangan. Dengan fakta tersebut, seksi pemberantasan BNN Kabupaten Gresik berkomitmen akan terus melaksanakan yang terbaik sesuai tupoksi untuk mewujudkan Gresik Resik Narkoba.

Dalam pelaksanaan kegiatan ini juga ditemukan beberapa permasalahan yaitu diantaranya :

- Kurangnya sarana dan prasarana terkait kegiatan intelejen, diantaranya : tidak adanya mobil operasional pendukung pelaksanaan kegiatan penyelidikan, selain itu alat-alat intejen seperti alat sadap & kamera dalam kondisi rusak berat & belum ada pengadaan yang baru
- Kurangnya jumlah SDM dalam seksi pemberantasan sehingga capaian dirasa kurang maksimal.

7. Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien :

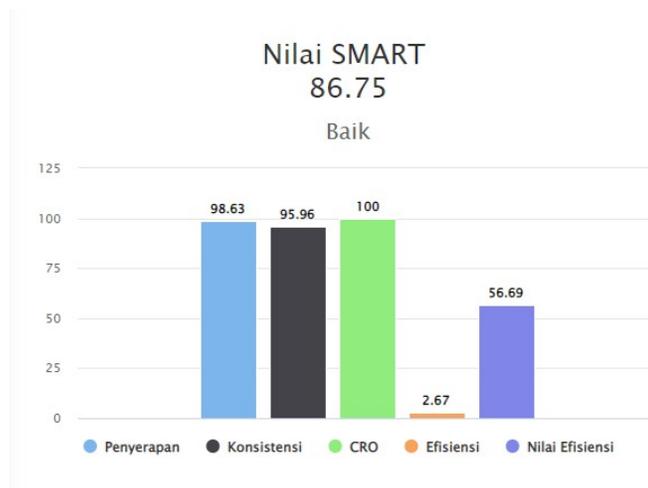
Indikator Keluaran Kinerja (IKK)	Target	Realisasi
Nilai kinerja anggaran BNN Kabupaten Gresik	87 %	86.75 %

Indikator Kinerja Utama (IKU) tentang Nilai Kinerja anggaran BNN diukur dari pengukuran kinerja yang didapat pada aplikasi Smartmonev Kemenkeu di akhir Tahun Anggaran 2022.

Definisi dari Nilai laporan kinerja dan evaluasi keuangan (Evaluasi Kinerja dan Anggaran) adalah suatu bentuk laporan hasil kerja dan kegiatan yang sudah dilakukan sesuai dengan indikator kerja yang telah ditetapkan. Kinerja yang dilaporkan harus dengan real apa yang sudah di kerjakan dan tidak ada cacat di dalam laporan kinerja tersebut yang artinya laporan kinerja itu harus sesuai dengan fakta yang ada.

Nilai Kinerja Anggaran adalah capaian kinerja atas evaluasi penggunaan anggaran Negara (APBN) sebagaimana tertuang dalam dokumen anggaran pada keseluruhan unit kerja di lingkungan BNN yang terdiri atas aspek implementasi, aspek manfaat dan aspek konteks.

Pengukuran Nilai Kinerja Anggaran BNN diperoleh berdasarkan hasil evaluasi pada aspek implementasi, manfaat dan konteks terkait pelaksanaan Rencana Kerja Anggaran BNN oleh Kementerian Keuangan sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan 214 Tahun 2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKAKL dan terinformasikan melalui sistem informasi kinerja anggaran yang dikelola Kementerian Keuangan.



Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :

1. Belum adanya peraturan Bupati Terkait Fasilitas P4GN di Wilayah Kab. Gresik
2. Kurang meratanya kemampuan/ skill Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di tiap seksi.
3. Kurangnya Personil/ Pegawai
4. Masih ada Institusi atau Lembaga, relawan atau penggiat yang belum melaksanakan P4GN secara mandiri

Rekomendasi/ Rencana aksi ke depan sebagai langkah perbaikan untuk lebih memaksimalkan capaian kinerja adalah sebagai berikut :

1. Percepatan Kegiatan sesuai dengan adanya kebijakan baru terkait peraturan new normal, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan di lingkungan kerja & kegiatan;
2. Pengalihan Anggaran ke penanganan Pandemi Covid-19;
3. Mengusulkan kebutuhan pelatihan bagi Pegawai BNN Kabupaten Gresik;

4. Koordinasi Komprehensif dengan Pemda Gresik dan DPRD Gresik agar terbentuknya Perbup terkait fasilitasi P4GN dan dukungan operasional bagi BNN Kab. Gresik;
5. Meningkatkan jumlah relawan dan penggiat anti narkoba di lingkungan pemerintah, swasta masyarakat dan Pendidikan.
6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelaksanaan KIE P4GN melalui pemanfaatan berbagai media.

8. Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur :

Indikator Keluaran Kinerja (IKK)	Target	Realisasi
Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) BNN Kabupaten Gresik	95 %	97.43 %

Indikator Kinerja Utama (IKU) tentang Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) BNN Kabupaten Gresik diukur dari pengukuran kinerja yang didapat pada aplikasi Smartmonev Kemenkeu di akhir Tahun Anggaran 2022.

Nilai kualitas laporan keuangan satuan kerja adalah ukuran persentase capaian kualitas laporan keuangan seluruh satuan kerja di lingkungan BNN yang telah memenuhi ketentuan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) baik Laporan Keuangan Semester I, Triwulan III, Laporan Unaudited, dan Laporan Audited sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, LO, LPE, dan CALK.

Penilaian terhadap kualitas laporan keuangan satuan kerja diperoleh berdasarkan penilaian/reviu oleh pihak Inspektorat Utama terhadap laporan keuangan yang disusun oleh seluruh satuan kerja di lingkungan BNN yang telah memenuhi SAP dengan menggunakan lembar kerja reviu laporan keuangan.

MONEVPA

Indikator Pelaksanaan Anggaran

FILTER: SAMPAI DENGAN | DESEMBER

NO	KODE KPPN	KODE BA	KODE SAKCR	URAIAN SAKCR	KETERANGAN	KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN		KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN					KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN	NILAI TOTAL	KONVERSI BOBOT	NILAI AKHIR (NILAI TOTAL/KONVERSI BOBOT)
						REVISI DIPA	DEVIASI HALAMAN III DIPA	PENYERAPAN ANGGARAN	BELANJA KONTRAKTUAL	PENYELESAIAN TAGIHAN	PENGELOLAAN UP DAN IUP	DISPENSASI SPM	CAPAIAN OUTPUT			
1	135	065	689630	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN GRESIK	Nilai	100,00	75,55	100,00	100,00	100,00	98,75	100,00	100,00	97,43	100%	97,43
					Bobot	10	10	20	10	10	10	5	25			
					Nilai Akhir	10,00	7,56	20,00	10,00	10,00	9,88	5,00	25,00			
					Nilai Aspek		67,78			96,75		100,00				

Disclaimer:
 Sesuai Perdirjen Perbendaharaan PER-5/PB/2022, indikator Revisi DIPA dan Penyerapan Anggaran tidak dihitung di Trivulan I 2022

Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :

1. Belum adanya peraturan Bupati Terkait Fasilitasi P4GN di Wilayah Kab. Gresik
2. Kurang meratanya kemampuan/ skill Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di tiap seksi.
3. Kurangnya Personil/Pegawai
4. Masih ada Institusi atau Lembaga, relawan atau penggiat yang belum melaksanakan P4GN secara mandiri

Rekomendasi/ Rencana aksi ke depan sebagai langkah perbaikan untuk lebih memaksimalkan capaian kinerja adalah sebagai berikut :

1. Percepatan Kegiatan sesuai dengan adanya kebijakan baru terkait peraturan new normal, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan di lingkungan kerja & kegiatan;
2. Pengalihan Anggaran ke penanganan Pandemi Covid-19;
3. Mengusulkan kebutuhan pelatihan bagi Pegawai BNN Kabupaten Gresik;
4. Koordinasi Komprehensif dengan Pemda Gresik dan DPRD Gresik agar terbentuknya Perbup terkait fasilitasi P4GN dan dukungan operasional bagi BNN Kab. Gresik;
5. Meningkatkan jumlah relawan dan penggiat anti narkoba di lingkungan pemerintah, swasta masyarakat dan Pendidikan.
6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelaksanaan KIE P4GN melalui pemanfaatan berbagai media.

Akuntabilitas Keuangan

Tahun 2022 BNN Kabupaten Gresik mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 1.894.733.000,- (*Satu Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah*), namun pada April terdapat penambahan pagu belanja yang berasal dari PNPB sebesar Rp 44.080.000,- (*Empat Puluh Empat Juta Delapan Puluh Ribu Rupiah*) sehingga pagu anggaran bertambah menjadi Rp 1.938.813.000,- (*Satu Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Tiga Belas Ribu Rupiah*), di bulan November terdapat Revisi Penghapusan *Automatic Adjustment* untuk dialihkan ke BUN sebesar Rp 37.207.000,- (*Tiga Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Tujuh Ribu Rupiah*), sehingga pagu anggaran DIPA BNN Kabupaten Gresik Tahun anggaran 2022 menjadi Rp. 1.901.606.000,- (*Satu Milyar Sembilan Ratus Satu Juta Enam Ratus Enam Ribu Rupiah*) Anggaran tersebut dialokasikan untuk :

NO.	JENIS BELANJA	PAGU DIPA	REALISASI	%	SISA	%
1.	Bel. Pegawai	-	-	-	-	-
2.	Bel. Barang	1.901.606.000,-	1,882,563,236	99,00	19,042,764	1,00
3.	Bel. Modal	-	-	-	-	-
Jumlah		1.901.606.000,-	1,882,563,236	99,00	19,042,764	1,00

Anggaran tersebut dialokasikan untuk mendukung sasaran kinerja Meningkatnya pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba secara efektif di Kabupaten Gresik. Adapun rincian dari realisasi anggaran tahun 2022 sebagai berikut :

NO.	KODE	URAIAN KEGIATAN	TARGET	REALISASI		SISA	
			Rp	Rp	%	Rp	%
1	3236.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	96,290,000	96,290,000	100	-	0.00
2	3236.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	13,760,000	13,760,000	100	-	0.00
3	3237.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	19,720,000	19,720,000	100	-	6.05
4	3238.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	3,000,000	3,000,000	100	-	0.00
5	3239.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	1,081,421,000	1,080,341,436	97	1,079,564	3.28

6	3979.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	6,000,000	6,000,000	100	-	0.00
7	3247.QDE	Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga	40,000,000	40,000,000	100	-	0.00
8	3247.UBB	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Desa	78,162,000	78,162,000	100	-	0.00
9	5936.QCD	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	68,600,000	68,600,000	100	-	0.00
10	3256.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	4,675,000	4,675,000	100	-	0.00
11	3257.QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	216,525,000	216,425,000	100	100,000	0.05
12	3258.BAA	Pelayanan Publik kepada masyarakat	74,113,000	56,400,000	76	17,713,000	23.90
13	3259.ADG	Standarisasi Profesi dan SDM	10,050,000	10,050,000	100	-	0.00
14	3260.BAA	Pelayanan Publik kepada masyarakat	94,265,000	94,181,800	99,91	83,200	15.50
15	3260.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	25,025,000	25,025,000	100	-	0.00
16	5354.BCA	Perkara Hukum Perseorangan	70,000,000	69,933,000	100	67,000	0.10
JUMLAH			1,901,606,000	1,882,563,236	99,00	19,042,764	1,00

Realisasi anggaran sebesar Rp. 1,882,563,236,- (*Satu Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Juta Lima Ratus Enam Puluh Riga Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah*) atau 99,00 %. Tidak terserapnya seluruh anggaran untuk sasaran kinerja dalam pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) secara efektif di Kabupaten Gresik sebesar Rp. 19,042,764,- (*Sembilan Belas Juta Empat Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Rupiah*) (1,00 %) akibat adanya :

- a. Efisiensi sisa Swakelola program dan rutin;
- b. Adanya tambahan anggaran untuk kegiatan TAT yang berasal dari buka blokir (*Open Automatic Adjustment*) namun, anggaran tersebut tidak dapat terserap 100% dikarenakan menurunnya rekomendasi TAT pada akhir tahun dari Polsek dan Polres Gresik.

BAB IV P E N U T U P

KESIMPULAN

Laporan akuntabilitas Kinerja Badan Narkotika Nasional Kabupaten Gresik Tahun 2022 merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, kebijakan, program, dan kegiatan BNN Kabupaten Gresik sebagai pelayanan Publik. Secara umum dapat disimpulkan bahwa :

1. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Gresik telah dapat merealisasikan program dan kegiatan berbasis kinerja. Hal ini di dukung dari penjabaran kinerja 4 Seksi yaitu 1) Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan masyarakat, 2) Seksi Rehabilitasi, 3) Seksi Pemberantasan, dan 4) Subbagian Umum serta pendukung lainnya yang berpengaruh terhadap pencapaian keberhasilan tugas Badan Narkotika Nasional Kabupaten Gresik yang menghadapi permasalahan yang kompleks di bidang P4GN.
2. Capaian Kinerja BNN Kabupaten Gresik Pada tahun 2021 menggunakan pengukuran kinerja dilakukan berdasarkan sasaran strategi, indikator kinerja, Target, Realisasi dan capaiannya. kegiatan yang diprioritaskan, ada 8 sasaran strategis dan 9 Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja BNN Kabupaten Gresik. Berdasarkan indikator tersebut, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Gresik pada umumnya telah melakukan kinerja secara maksimal dengan capaian kinerja 86,75 pada tahun 2022 dan 97.43 dalam capaian nilai IKPA.
3. Laporan Akutabilitas ini mencerminkan akuntabilitas kinerja suatu organisasi yang memberikan informasi yang sesungguhnya atas meningkatnya atau kegagalan suatu capaian tersebut. Capaian kinerja BNN Kabupaten Gresik tahun 2022 sudah sesuai dengan target yang tetapkan dalam Rencana strategis BNN RI dan Rencana Program Kerja (Renproja) BNN Kabupaten Gresik.

LAMPIRAN



**PERJANJIAN KINERJA
BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN GRESIK
TAHUN 2022**

Dalam rangka manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SUPRIYANTO, SH
Jabatan : KEPALA BNN KAB GRESIK

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. MOHAMAD ARIS PURNOMO
Jabatan : KEPALA BNNP JAWA TIMUR

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Surabaya, 10 Maret 2022

Pihak Kedua,
KEPALA BNNP JAWA TIMUR

Pihak Pertama,
KEPALA BNN KAB GRESIK

Drs. MOHAMAD ARIS PURNOMO

SUPRIYANTO, SH

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN GRESIK

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	52.00 Indeks
2	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	78.68 Indeks
3	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Indeks Kemandirian Partisipasi	3.20 Indeks
4	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional	1 Lembaga
5	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM	1 Unit
6	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika di Klinik Rehabilitasi	Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi	3.20 Indeks
7	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21	1 Berkas Perkara
8	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran	87 Indeks
9	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	95 Indeks

- | | |
|--|----------------|
| 1. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Edukasi | Rp.77.600.000 |
| 2. Kegiatan Penyelenggaraan Advokasi | Rp.123.000.000 |
| 3. Kegiatan Pemberdayaan Peran serta Masyarakat | Rp.216.525.000 |
| 4. Kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah | Rp.12.850.000 |
| 5. Kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat | Rp.85.110.000 |
| 6. Kegiatan Pascarehabilitasi Penyalah guna dan/atau Pecandu Narkoba | Rp.9.100.000 |
| 7. Kegiatan Penyidikan Jaringan Peredaran Gelap Narkotika | Rp.70.000.000 |
| 8. Kegiatan Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti | Rp.43.150.000 |
| 9. Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan | Rp.132.566.000 |

- | | |
|---|------------------|
| 10. Kegiatan Pengembangan Organisasi, Tatalaksana, dan Sumber Daya Manusia | Rp.19.720.000 |
| 11. Kegiatan Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN | Rp.32.872.000 |
| 12. Kegiatan Penyelenggaraan Ketatausahaan, Rumah Tangga dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana | Rp.1.052.240.000 |
| 13. Kegiatan Penyelenggaraan Kehumasan dan Keprotokolan | Rp.20.000.000 |

Pihak Kedua,

KEPALA BNNP JAWA TIMUR



Drs. MOHAMAD ARIS PURNOMO

Surabaya, 10 Maret 2022

Pihak Pertama,

KEPALA BNN KAB GRESIK



SUPRIYANTO, SH

**DAFTAR TARGET/ REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN GRESIK
PER 06 SEPTEMBER 2022**

KODE	URAIAN KEGIATAN	TARGET (DIPA)			BOBOT TERTIMBANG	REALISASI PER 26 AGUSTUS 2022						SISA ANGGARAN					
		FISIK		KEUANGAN		FISIK		KEUANGAN		RATA-RATA TERTIMBANG		FISIK		KEUANGAN		BOBOT TERTIMBANG	
		VOL	SATUAN	Rp		VOL	%	Rp	%	Fisik	Keuangan	VOL	%	Rp	%	Fisik	Keuangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
3236.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	12	Layanan	96,290,000	5.06	12	100	96,290,000	100.00	5.06	5.06	0	0	-	0.00	0.00	
3236.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	1	Dokumen	13,760,000	0.72	1	100	13,760,000	100.00	0.72	0.72	0	0	-	0.00	0.00	
3237.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	30	Orang	19,720,000	1.04	30	100	19,720,000	100.00	1.04	1.04	0	0	-	0.00	0.00	
3238.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	2	Dokumen	3,000,000	0.16	2	100	3,000,000	100.00	0.16	0.16	0	0	-	0.00	0.00	
3239.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	14	Layanan	1,081,421,000	56.87	14	100	1,080,341,436	99.90	56.87	56.81	0	0	1,079,564	0.10	0.00	
3979.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	1	Layanan	6,000,000	0.32	1	100	6,000,000	100.00	0.32	0.32	0	0	-	0.00	0.00	
3247.QDE	Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga	5	Keluarga	40,000,000	2.10	5	100	40,000,000	100.00	2.10	2.10	0	0	-	0.00	0.00	
3247.UBB	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Desa	3	Desa	78,162,000	4.11	3	100	78,162,000	100.00	4.11	4.11	0	0	-	0.00	0.00	
5936.QCD	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	10	Orang	68,600,000	3.61	10	100	68,600,000	100.00	3.61	3.61	0	0	-	0.00	0.00	
3256.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	1	Laporan	4,675,000	0.25	1	100	4,675,000	100.00	0.25	0.25	0	0	-	0.00	0.00	
3257.QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	2	Lembaga	216,525,000	11.39	2	100	216,425,000	99.95	11.39	11.38	0	0	100,000	0.05	0.00	
3258.BAA	Pelayanan Publik kepada masyarakat	45	Orang	74,113,000	3.90	48	107	56,400,000	76.10	4.16	2.97	-3	-6.67	17,713,000	23.90	-0.26	
3259.ADG	Standarisasi Profesi dan SDM	5	Orang	10,050,000	0.53	5	100	10,050,000	100.00	0.53	0.53	0	0	-	0.00	0.00	
3260.BAA	Pelayanan Publik kepada masyarakat	15	Orang	94,265,000	4.96	16	107	94,181,800	99.91	5.29	4.95	-1	-6.67	83,200	0.09	-0.33	
3260.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	3	Lembaga	25,025,000	1.32	3	100	25,025,000	100.00	1.32	1.32	0	0	-	0.00	0.00	
5354.BCA	Perkara Hukum Perseorangan	1	Berkas Perkara	70,000,000	3.68	3	300	69,933,000	99.90	11.04	3.68	-2	-200	67,000	0.10	-7.36	
JUMLAH		150		1,901,606,000	100	156		1,882,563,236	99.00	104.00	99.00	-6.00		19,042,764		-7.95	

Catatan :

	Pagu	Realisasi	Sisa	% Penyerapan
Subbag Umum	1,220,191,000	1,219,111,436	1,079,564	99.91
P2M	403,287,000	403,187,000	100,000	99.98
Rehab	134,015,000	133,931,800	83,200	99.94
Berantas	144,113,000	126,333,000	17,780,000	87.66
TOTAL	1,901,606,000	1,882,563,236	19,042,764	99.00

DAFTAR MOU 2022 BNN KABUPATEN GRESIK



TP PKK KABUPATEN GRESIK



TP PKK DESA MENGANTI



TP PKK DESA HULAAAN



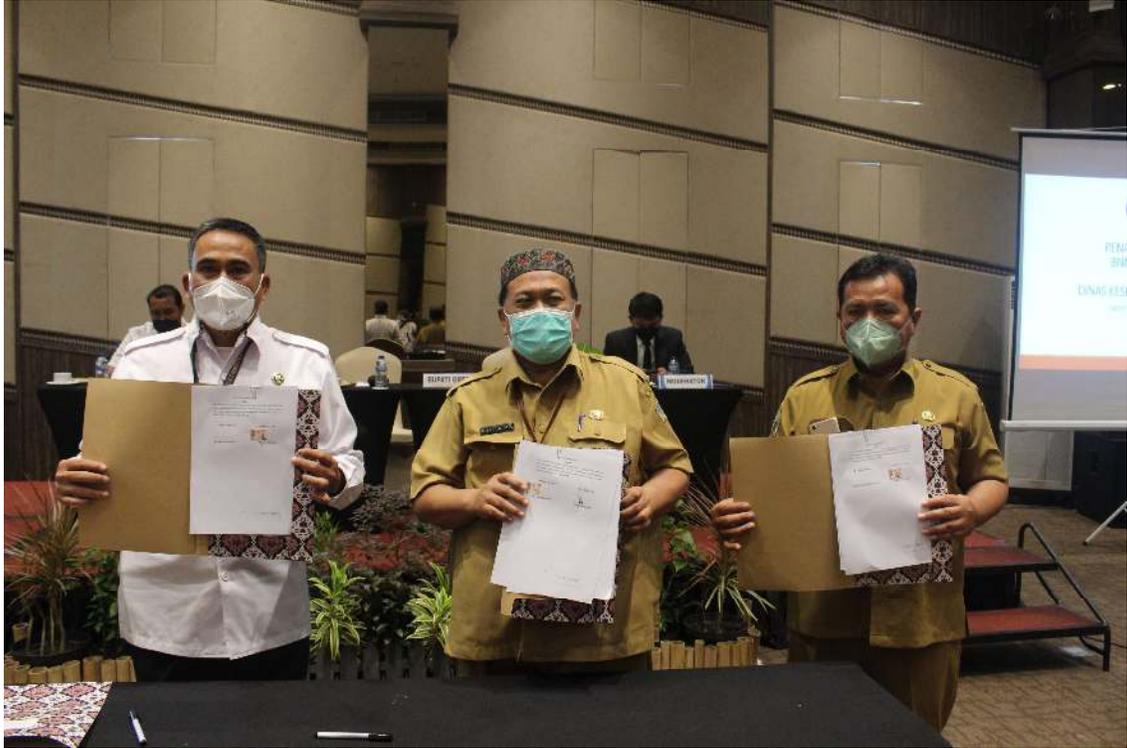
TP PKK DESA DOMAS



SMA MUHAMMADIYAH 01 GRESIK



SMK NEGERI 1 CERME



DINAS KBPPA KAB. GRESIK



DINAS KESEHATAN KAB. GRESIK



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)**

Jalan MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur 13630

Telepon : (62-21) 80871566, 80871567

Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593

E-mail : info@bnn.go.id Website : www.bnn.go.id

Nomor : B/3964/XI/DE/PC.00.01/2022/BNN Jakarta, 30 November 2022
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Hasil Penghitungan Indeks Ketahanan Diri Remaja
Terhadap Penyalahgunaan Narkoba (Dektari)
Direktorat Informasi dan Edukasi Tahun 2022

Kepada :

- Yth. 1. Para Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi;
2. Para Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.**

di

Tempat

1. Rujukan:

- a. Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional;
- c. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
- d. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/ Kota;
- e. Peraturan Kepala BNN Nomor 6 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional Tahun 2020-2024;.
- f. Buku Panduan Indeks Ketahanan Diri Remaja Tahun 2020, Direktorat Informasi dan Edukasi Deputi Bidang Pencegahan BNN RI;
- g. Surat Edaran Kepala BNN Nomor: SE/ 127/ IX/ DE/ PC.00/ 2020/ BNN tentang Penghitungan Indeks Ketahanan Diri Remaja melalui Aplikasi Dektari;
- h. Program kerja Deputi Bidang Pencegahan T.A. 2022.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, diinformasikan kepada Kepala BNNP dan BNNK hasil penghitungan Indeks Ketahanan Diri Remaja terhadap Penyalahgunaan Narkoba (Dektari) yang merupakan pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Direktorat Informasi dan Edukasi Tahun 2022 sesuai Peraturan Kepala BNN Nomor 6 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional Tahun 2020-2024, dengan hasil sebagai berikut:

/ a. Perhitungan

- a. Penghitungan Dektari menggunakan aplikasi mobile Dektari Aja terhadap 72.735 remaja usia 12 – 21 tahun (pelajar atau mahasiswa) yang telah dilakukan kegiatan penyuluhan/ sosialisasi sebanyak **1.975** oleh penyuluh narkoba di BNNP dan BNNK.
- b. Hasil angka penghitungan Dektari Tahun 2022 adalah **52,30 (tinggi)** dengan target **52 (tinggi)**, dengan klasifikasi hasil capaian wilayah:
- c. Kategori Sangat Tinggi ($\geq 53,71$) sebanyak 47 Satker
- d. Kategori Tinggi (49,74 – 53,50) sebanyak 127 Satker
- e. Kategori Rendah (45,98 – 49,73) sebanyak 33 Satker
- f. Kategori Sangat Rendah ($\leq 45,97$) sebanyak 0 Satker
- g. Hasil Penghitungan Terlampir.

3. Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

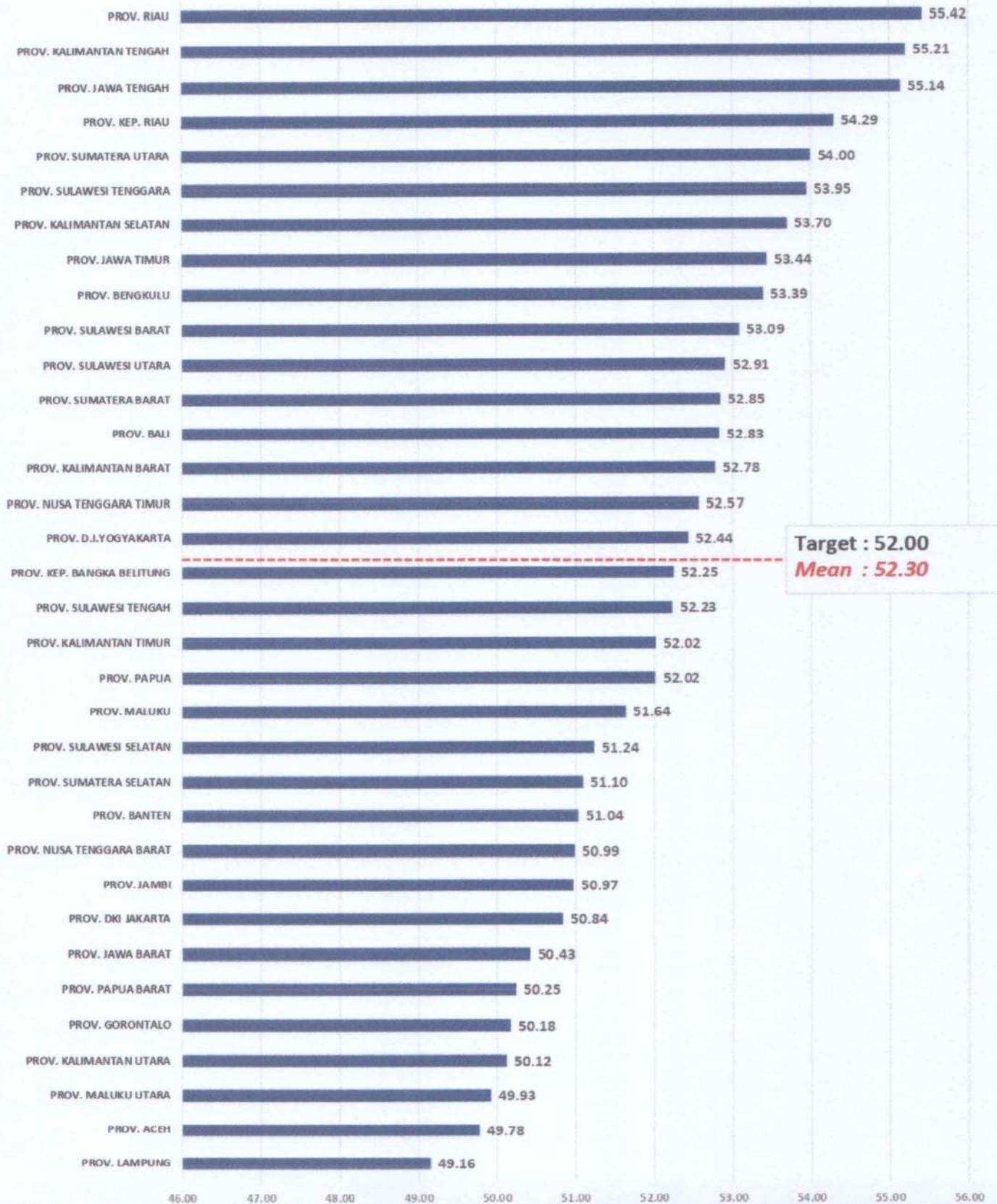
a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional
Deputi Pencegahan

Drs. Richard M. Nainggolan, M.M., MBA

Tembusan:

1. Kepala BNN
2. Sekretaris Utama BNN
3. Inspektur Utama BNN

**GRAFIK HASIL PERHITUNGAN INDEKS KETAHANAN DIRI REMAJA
PER PROVINSI TAHUN 2022**



REKAPITULASI PERHITUNGAN INDEKS KETAHANAN DIRI REMAJA
TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOBA (DEKTARI) TA 2022

NO	SATUAN KERJA	NILAI DEKTARI		KATEGORI
		2021	2022	
1	BNNP ACEH	48.16	49.14	Rendah
	BNN KABUPATEN ACEH SELATAN	50.54	49.57	Rendah
	BNN KABUPATEN GAYO LUES	49.69	50.46	Tinggi
	BNN KABUPATEN PIDIE JAYA	43.44	50.09	Tinggi
	BNN KOTA SABANG	48.45	49.19	Rendah
	BNN KOTA LHOKSEUMAWE	49.06	51.45	Tinggi
	BNN KOTA LANGSA	52.15	50.52	Tinggi
	BNN KABUPATEN BIREUEN	50.13	49.61	Rendah
	BNN KABUPATEN ACEH TAMIANG	49.40	48.69	Rendah
	BNN KABUPATEN PIDIE	48.14	49.75	Tinggi
	BNN KOTA BANDA ACEH	52.25	49.12	Rendah
	DEKTARI PROV. ACEH	49.22	49.78	Tinggi
2	BNNP SUMATERA UTARA	57.71	53.28	Tinggi
	BNN KABUPATEN KARO	54.93	53.12	Tinggi
	BNN KOTA BINJAI	49.54	58.23	Sangat Tinggi
	BNN KOTA TANJUNG BALAI	54.25	53.01	Tinggi
	BNN KOTA GUNUNGSITOLI	53.49	51.22	Tinggi
	BNN KABUPATEN DELI SERDANG	55.95	54.37	Sangat Tinggi
	BNN KOTA PEMATANG SIANTAR	54.60	53.06	Tinggi
	BNN KABUPATEN LANGKAT	53.51	52.26	Tinggi
	BNN KABUPATEN ASAHAN	55.63	53.24	Tinggi
	BNN KABUPATEN MANDAILING NATAL	53.93	59.40	Sangat Tinggi
	BNN KABUPATEN TAPANULI SELATAN	53.72	53.21	Tinggi
	BNN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI	55.42	58.05	Sangat Tinggi
	BNN KOTA TEBING TINGGI	51.54	52.68	Tinggi
	BNN KABUPATEN SIMALUNGUN	55.26	53.01	Tinggi
	BNN KABUPATEN LABUHANBATU UTARA	43.94	53.10	Tinggi
	BNN KABUPATEN BATU BARA	52.12	52.70	Tinggi
	DEKTARI PROV. SUMATERA UTARA	53.47	54.00	Sangat Tinggi

3	BNNP SUMATERA BARAT	50.27	50.35	Tinggi
	BNN KOTA SAWAHLUNTO	52.68	53.24	Tinggi
	BNN KOTA PAYAKUMBUH	53.74	50.98	Tinggi
	BNN KABUPATEN SOLOK	45.43	57.21	Sangat Tinggi
	BNN KABUPATEN PASAMAN BARAT	53.81	52.45	Tinggi
	DEKTARI PROV. SUMATERA BARAT	51.19	52.85	Tinggi
4	BNNP RIAU	49.47	54.78	Sangat Tinggi
	BNN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI	57.31	57.14	Sangat Tinggi
	BNN KABUPATEN PELALAWAN	53.99	55.75	Sangat Tinggi
	BNN KOTA PEKANBARU	50.37	54.87	Sangat Tinggi
	BNN KOTA DUMAI	53.62	54.55	Sangat Tinggi
	DEKTARI PROV. RIAU	52.95	55.42	Sangat Tinggi
5	BNNP JAMBI	49.73	51.37	Tinggi
	BNN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR	49.57	51.17	Tinggi
	BNN KOTA JAMBI	47.67	48.62	Rendah
	BNN KABUPATEN BATANGHARI	48.20	52.72	Tinggi
	DEKTARI PROV. JAMBI	48.79	50.97	Tinggi
6	BNNP SUMATERA SELATAN	48.38	50.50	Tinggi
	BNN KABUPATEN OGAN ILIR	49.96	49.75	Tinggi
	BNN KOTA PAGARALAM	47.96	53.94	Sangat Tinggi
	BNN KOTA LUBUKLINGGAU	47.34	52.27	Tinggi
	BNN KABUPATEN EMPAT LAWANG	46.20	49.84	Tinggi
	BNN KOTA PRABUMULIH	49.71	52.97	Tinggi
	BNN KABUPATEN MUARA ENIM	50.34	50.97	Tinggi
	BNN KABUPATEN MUSI RAWAS	50.64	50.43	Tinggi
	BNN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR	49.99	50.84	Tinggi
	BNN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR	48.88	49.46	Rendah
	DEKTARI PROV. SUMATERA SELATAN	48.94	51.10	Tinggi
7	BNNP LAMPUNG	49.70	49.50	Rendah
	BNN KABUPATEN TANGGAMUS	47.73	49.71	Rendah
	BNN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN	50.46	49.84	Tinggi
	BNN KOTA METRO	48.03	49.16	Rendah
	BNN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR	49.65	48.20	Rendah
	BNN KABUPATEN WAY KANAN	47.09	48.54	Rendah
	DEKTARI PROV. LAMPUNG	48.78	49.16	Rendah

8	BNNP KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	49.69	50.13	Tinggi
	BNN KABUPATEN BANGKA	53.75	52.76	Tinggi
	BNN KOTA PANGKAL PINANG	51.21	53.32	Tinggi
	BNN KABUPATEN BELITUNG	53.44	52.35	Tinggi
	BNN KABUPATEN BANGKA SELATAN	53.57	52.69	Tinggi
	DEKTARI PROV. KEP. BANGKA BELITUNG	52.33	52.25	Tinggi
9	BNNP KEPULAUAN RIAU	53.91	54.10	Sangat Tinggi
	BNN KABUPATEN KARIMUN	56.93	56.27	Sangat Tinggi
	BNN KOTA BATAM	48.20	55.42	Sangat Tinggi
	BNN KOTA TANJUNG PINANG	48.68	51.38	Tinggi
	DEKTARI PROV. KEP. RIAU	51.93	54.29	Sangat Tinggi
10	BNNP BENGKULU	55.31	53.95	Sangat Tinggi
	BNN KOTA BENGKULU	54.29	52.53	Tinggi
	BNN KABUPATEN BENGKULU SELATAN	54.72	53.69	Sangat Tinggi
	DEKTARI PROV. BENGKULU	54.78	53.39	Tinggi
11	BNNP DKI JAKARTA	49.80	50.14	Tinggi
	BNN KOTA JAKARTA SELATAN	48.04	50.08	Tinggi
	BNN KOTA JAKARTA TIMUR	48.01	50.05	Tinggi
	BNN KOTA JAKARTA UTARA	49.16	53.07	Tinggi
	DEKTARI PROV. DKI JAKARTA	48.75	50.84	Tinggi
12	BNNP BANTEN	48.89	49.71	Rendah
	BNN KOTA TANGERANG SELATAN	52.10	52.37	Tinggi
	BNN KOTA CILEGON	49.25	50.69	Tinggi
	BNN KOTA TANGERANG	55.15	51.37	Tinggi
	DEKTARI PROV. BANTEN	51.35	51.04	Tinggi
13	BNNP JAWA BARAT	48.23	49.57	Rendah
	BNN KABUPATEN BOGOR	48.11	53.02	Tinggi
	BNN KABUPATEN CIANJUR	54.40	52.02	Tinggi
	BNN KOTA BANDUNG	48.38	51.54	Tinggi
	BNN KOTA CIREBON	49.96	48.90	Rendah
	BNN KOTA CIMAH	48.16	51.31	Tinggi
	BNN KABUPATEN SUKABUMI	48.39	49.28	Rendah
	BNN KABUPATEN GARUT	49.52	49.73	Rendah
	BNN KABUPATEN KUNINGAN	49.03	49.90	Tinggi
	BNN KABUPATEN CIAMIS	50.45	49.84	Tinggi
	BNN KOTA DEPOK	49.27	49.73	Rendah
	BNN KABUPATEN KARAWANG	48.27	49.63	Rendah

	BNN KABUPATEN BANDUNG BARAT	51.58	50.93	Tinggi
	BNN KOTA TASIKMALAYA	48.83	50.06	Tinggi
	BNN KABUPATEN SUMEDANG	48.02	50.91	Tinggi
	DEKTARI PROV. JAWA BARAT	49.37	50.43	Tinggi
14	BNNP JAWA TENGAH	53.81	55.38	Sangat Tinggi
	BNN KABUPATEN TEMANGGUNG	53.69	54.85	Sangat Tinggi
	BNN KOTA TEGAL	56.37	56.18	Sangat Tinggi
	BNN KABUPATEN BANYUMAS	50.19	56.42	Sangat Tinggi
	BNN KABUPATEN CILACAP	53.69	55.71	Sangat Tinggi
	BNN KABUPATEN KENDAL	50.46	56.46	Sangat Tinggi
	BNN KABUPATEN BATANG	53.82	52.68	Tinggi
	BNN KABUPATEN PURBALINGGA	49.68	58.23	Sangat Tinggi
	BNN KABUPATEN MAGELANG	53.77	53.19	Tinggi
	BNN KOTA SURAKARTA	53.67	52.35	Tinggi
	DEKTARI PROV. JAWA TENGAH	52.92	55.14	Sangat Tinggi
15	BNNP DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	48.57	52.95	Tinggi
	BNN KABUPATEN SLEMAN	48.33	51.54	Tinggi
	BNN KOTA YOGYAKARTA	49.65	52.08	Tinggi
	BNN KABUPATEN BANTUL	49.84	53.18	Tinggi
	DEKTARI PROV. D.I.YOGYAKARTA	49.10	52.44	Tinggi
16	BNNP JAWA TIMUR	48.56	55.51	Sangat Tinggi
	BNN KABUPATEN SUMENEP	48.96	54.74	Sangat Tinggi
	BNN KOTA MOJOKERTO	49.72	51.46	Tinggi
	BNN KOTA MALANG	56.44	56.32	Sangat Tinggi
	BNN KOTA BATU	52.61	52.52	Tinggi
	BNN KABUPATEN TULUNGAGUNG	49.76	54.09	Sangat Tinggi
	BNN KABUPATEN NGANJUK	50.23	56.89	Sangat Tinggi
	BNN KABUPATEN SIDOARJO	50.00	53.14	Tinggi
	BNN KOTA SURABAYA	53.76	52.40	Tinggi
	BNN KOTA KEDIRI	54.91	54.49	Sangat Tinggi
	BNN KABUPATEN MALANG	56.47	57.00	Sangat Tinggi
	BNN KABUPATEN GRESIK	49.74	49.15	Rendah
	BNN KABUPATEN TRENGGALEK	51.06	51.32	Tinggi
	BNN KABUPATEN LUMAJANG	55.13	52.42	Tinggi
	BNN KABUPATEN BLITAR	50.38	54.34	Sangat Tinggi

	BNN KABUPATEN KEDIRI	54.46	53.01	Tinggi
	BNN KABUPATEN PASURUAN	45.57	48.57	Rendah
	BNN KABUPATEN TUBAN	49.34	54.54	Sangat Tinggi
	DEKTARI PROV. JAWA TIMUR	51.51	53.44	Tinggi
17	BNNP KALIMANTAN BARAT	49.91	52.49	Tinggi
	BNN KABUPATEN BENGKAYANG	53.33	53.21	Tinggi
	BNN KABUPATEN SINTANG	55.03	55.52	Sangat Tinggi
	BNN KOTA PONTIANAK	49.93	50.41	Tinggi
	BNN KOTA SINGKAWANG	49.48	52.42	Tinggi
	BNN KABUPATEN SANGGAU	53.07	52.83	Tinggi
	BNN KABUPATEN MEMPAWAH	53.17	53.00	Tinggi
	BNN KABUPATEN KUBU RAYA	49.14	52.35	Tinggi
	DEKTARI PROV. KALIMANTAN BARAT	51.63	52.78	Tinggi
18	BNNP KALIMANTAN TENGAH	49.51	55.24	Sangat Tinggi
	BNN KOTA PALANGKARAYA	49.12	53.23	Tinggi
	BNN KABUPATEN KOTA WARINGIN BARAT	55.51	57.15	Sangat Tinggi
	DEKTARI PROV. KALIMANTAN TENGAH	51.38	55.21	Sangat Tinggi
19	BNNP KALIMANTAN SELATAN	50.81	54.42	Sangat Tinggi
	BNN KABUPATEN BARITO KUALA	53.09	54.49	Sangat Tinggi
	BNN KOTA BANJARMASIN	54.09	53.04	Tinggi
	BNN KOTA BANJARBARU	50.87	54.93	Sangat Tinggi
	BNN KABUPATEN BALANGAN	53.83	53.13	Tinggi
	BNN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN	54.38	53.12	Tinggi
	BNN KABUPATEN TANAH LAUT	54.16	52.69	Tinggi
	BNN KABUPATEN TABALONG	50.38	54.44	Sangat Tinggi
	BNN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA	52.05	53.03	Tinggi
	DEKTARI PROV. KALIMANTAN SELATAN	52.63	53.70	Sangat Tinggi
20	BNNP KALIMANTAN TIMUR	49.33	52.68	Tinggi
	BNN KOTA BALIKPAPAN	51.18	51.14	Tinggi
	BNN KOTA SAMARINDA	49.30	49.47	Rendah
	BNN KOTA BONTANG	49.64	54.80	Sangat Tinggi
	DEKTARI PROV. KALIMANTAN TIMUR	49.86	52.02	Tinggi
21	BNNP KALIMANTAN UTARA	49.97	49.86	Tinggi

	BNN KOTA TARAKAN	49.93	50.83	Tinggi
	BNN KABUPATEN NUNUKAN	49.91	49.68	Rendah
	DEKTARI PROV. KALIMANTAN UTARA	49.94	50.12	Tinggi
22	BNNP SULAWESI UTARA	52.76	53.07	Tinggi
	BNN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW	48.79	53.00	Tinggi
	BNN KOTA BITUNG	49.65	49.94	Tinggi
	BNN KOTA MANADO	55.12	55.34	Sangat Tinggi
	BNN KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE	55.28	53.18	Tinggi
	DEKTARI PROV. SULAWESI UTARA	52.32	52.91	Tinggi
23	BNNP SULAWESI TENGAH	51.05	49.81	Tinggi
	BNN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN	51.78	52.43	Tinggi
	BNN KABUPATEN MOROWALI	49.61	50.43	Tinggi
	BNN KOTA PALU	49.71	57.33	Sangat Tinggi
	BNN KABUPATEN DONGGALA	53.64	52.68	Tinggi
	BNN KABUPATEN POSO	49.48	52.62	Tinggi
	BNN KABUPATEN TOJO UNA-UNA	49.49	50.30	Tinggi
	DEKTARI PROV. SULAWESI TENGAH	50.68	52.23	Tinggi
24	BNNP SULAWESI SELATAN	49.63	52.70	Tinggi
	BNN KABUPATEN TANA TORAJA	50.99	52.36	Tinggi
	BNN KABUPATEN BONE	49.94	48.12	Rendah
	BNN KOTA PALOPO	54.22	51.77	Tinggi
	DEKTARI PROV. SULAWESI SELATAN	51.20	51.24	Tinggi
25	BNNP SULAWESI TENGGARA	54.02	59.13	Sangat Tinggi
	BNN KABUPATEN MUNA	54.88	52.67	Tinggi
	BNN KABUPATEN KOLAKA	50.82	50.01	Tinggi
	BNN KOTA KENDARI	54.79	54.55	Sangat Tinggi
	BNN KOTA BAU-BAU	55.32	53.38	Tinggi
	DEKTARI PROV. SULAWESI TENGGARA	53.96	53.95	Sangat Tinggi
26	BNNP SULAWESI BARAT	54.03	54.38	Sangat Tinggi
	BNN KABUPATEN POLEWALI MANDAR	46.58	51.80	Tinggi
	DEKTARI PROV. SULAWESI BARAT	50.31	53.09	Tinggi

27	BNNP MALUKU	49.85	50.27	Tinggi
	BNN KABUPATEN BURU SELATAN	49.86	52.00	Tinggi
	BNN KOTA TUAL	51.30	52.65	Tinggi
	DEKTARI PROV. MALUKU	50.34	51.64	Tinggi
28	BNNP MALUKU UTARA	48.79	50.70	Tinggi
	BNN KABUPATEN PULAU MOROTAI	48.52	46.59	Rendah
	BNN KOTA TIDORE KEPULAUAN	55.83	52.79	Tinggi
	BNN KABUPATEN HALMAHERA UTARA	48.93	49.63	Rendah
	DEKTARI PROV. MALUKU UTARA	50.52	49.93	Tinggi
29	BNNP BALI	52.08	53.22	Tinggi
	BNN KOTA DENPASAR	50.48	52.99	Tinggi
	BNN KABUPATEN BADUNG	54.41	52.98	Tinggi
	BNN KABUPATEN GIANYAR	49.47	53.25	Tinggi
	BNN KABUPATEN BULELENG	53.68	53.46	Tinggi
	BNN KABUPATEN KLUNGKUNG	49.15	51.93	Tinggi
	BNN KABUPATEN KARANGASEM	53.77	51.99	Tinggi
	DEKTARI PROV. BALI	51.86	52.83	Tinggi
30	BNNP NUSA TENGGARA BARAT	49.69	49.65	Rendah
	BNN KABUPATEN BIMA	46.52	49.73	Rendah
	BNN KOTA MATARAM	51.97	54.89	Sangat Tinggi
	BNN KABUPATEN SUMBAWA BARAT	50.84	47.67	Rendah
	BNN KABUPATEN SUMBAWA	52.31	53.03	Tinggi
	DEKTARI PROV. NUSA TENGGARA BARAT	50.27	50.99	Tinggi
31	BNNP NUSA TENGGARA TIMUR	52.58	53.09	Tinggi
	BNN KABUPATEN BELU	55.60	57.25	Sangat Tinggi
	BNN KOTA KUPANG	49.94	50.49	Tinggi
	BNN KABUPATEN ROTE NDAO	50.26	49.47	Rendah
	DEKTARI PROV. NUSA TENGGARA TIMUR	52.10	52.57	Tinggi
32	BNNP GORONTALO	47.92	50.27	Tinggi
	BNN KABUPATEN BOALEMO	49.12	48.88	Rendah
	BNN KOTA GORONTALO	49.30	50.88	Tinggi

	BNN KABUPATEN BONE BOLANGO	49.22	48.91	Rendah
	BNN KABUPATEN GORONTALO	46.90	50.88	Tinggi
	BNN KABUPATEN GORONTALO UTARA	47.70	51.23	Tinggi
	DEKTARI PROV. GORONTALO	48.36	50.18	Tinggi
33	BNNP PAPUA	53.76	52.68	Tinggi
	BNN KABUPATEN MIMIKA	51.39	51.67	Tinggi
	BNN KABUPATEN JAYAPURA	51.83	51.69	Tinggi
	DEKTARI PROV. PAPUA	52.33	52.02	Tinggi
34	BNNP PAPUA BARAT	49.54	50.25	Tinggi
	DEKTARI PROV. PAPUA BARAT	49.54	50.25	Tinggi
	NILAI DEKTARI TAHUN	51.02	52.30	Tinggi

Tabel 4.19.

Klasifikasi Indeks Rata-rata Ketahanan Diri (anti) Narkoba

Klasifikasi	Interval Ketahanan Diri (anti) Narkoba
Sangat rendah	≤ 45.97
Rendah	45.98 – 49.73
Tinggi	49.74 – 53.50
Sangat tinggi	≥ 53.51

a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional
Deputi Pencegahan



Drs. Richard M. Nainggolan, M.M., MBA



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)**

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur

Telepon : (62-21) 80871566 - 80871567

Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593

e-mail : info@bnn.go.id website www.bnn.go.id

Nomor : B/ 43 24 /XII/DE/PM.00.03/2022/BNN
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : 1 berkas
Perihal : Penyampaian Hasil Penghitungan
Indeks KOTAN.

Jakarta, 26 Desember 2022

Kepada

Yth. **1. Para Kepala BNN Provinsi;
2. Para Kepala BNN Kabupaten/Kota.**

di

Tempat

1. Rujukan :
 - a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
 - c. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2021 tentang Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba;
 - d. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bahwa Kebijakan Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba (KOTAN) merupakan program Prioritas Nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2020-2024). Sesuai arah kebijakan dan sasaran strategis upaya pencapaian visi misi Presiden, Kebijakan KOTAN sebagai penjabaran prioritas pembangunan dari tujuan dan sasaran strategis tingkat lembaga dalam mengantisipasi, mengadaptasi dan memitigasi ancaman narkoba.
3. Implementasi Kebijakan Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba telah dilaksanakan pada tahun 2022 yang hasil penilaiannya disebut Indeksasi Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba (IKOTAN) dengan bobot per variabel sebagaimana terlampir.

4. Berkaitan dengan butir dua dan tiga di atas, terkait hasil IKOTAN agar Kepala BNNP/Kabupaten/Kota meningkatkan kolaborasi dengan pemangku kebijakan baik pemerintah daerah, sektor swasta, pendidikan, maupun masyarakat dalam percepatan mewujudkan Indonesia Bersinar,
5. Demikian untuk menjadi maklum.

**a.n Kepala Badan Narkotika Nasional
Deputi Pemberdayaan Masyarakat**



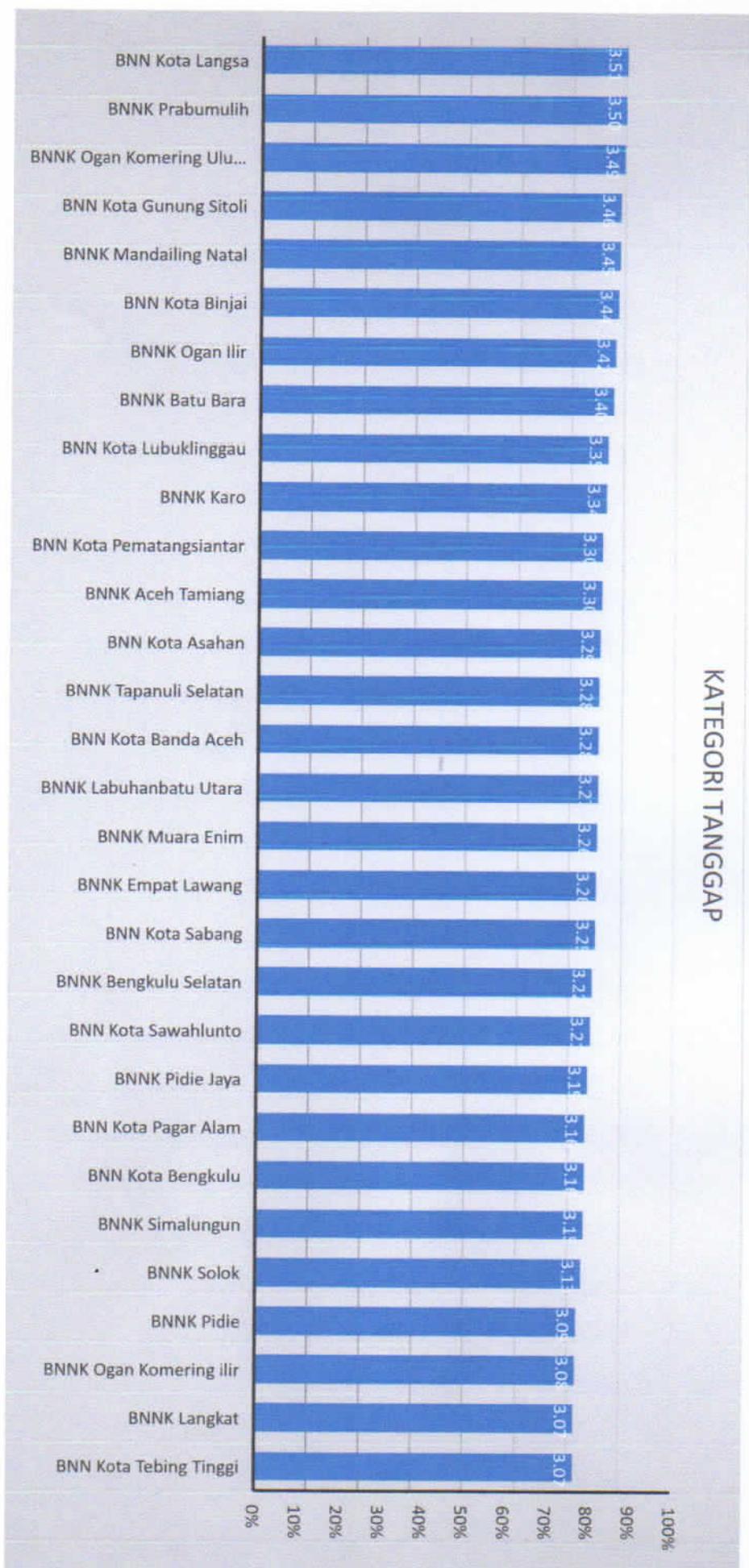
Tagam Siraga, S.H., M.M

Tembusan:

1. Kepala BNN;
2. Sekretaris Utama BNN;
3. Inspektur Utama BNN.

GRAFIK HASIL KOTAN TAHUN 2022

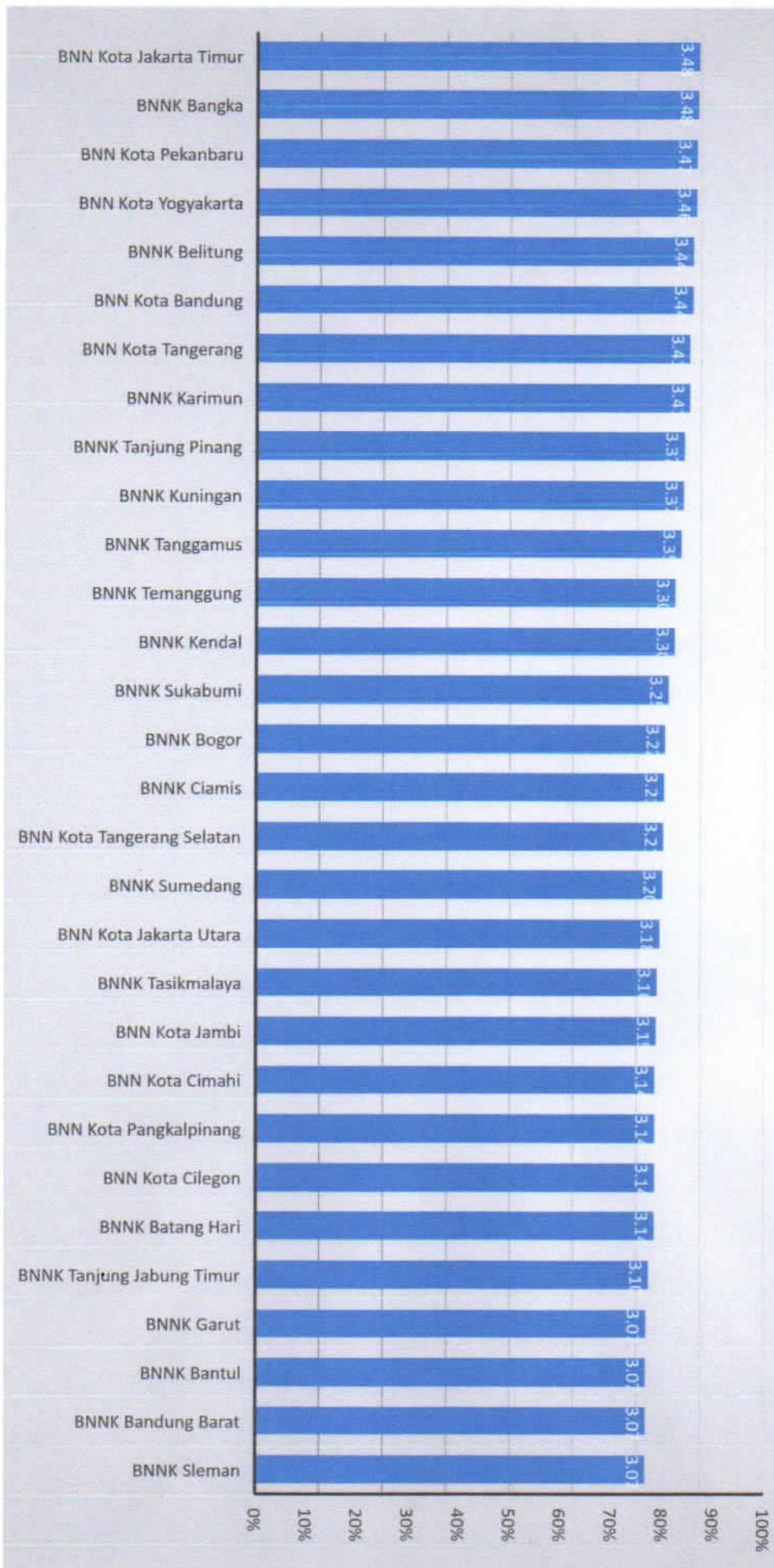
KATEGORI TANGGAP



LAMPIRAN
SURAT
NOMOR : B/ 4321 /XII/DE/PM.001/2022/BNN
TANGGAL : 26 DESEMBER 2022

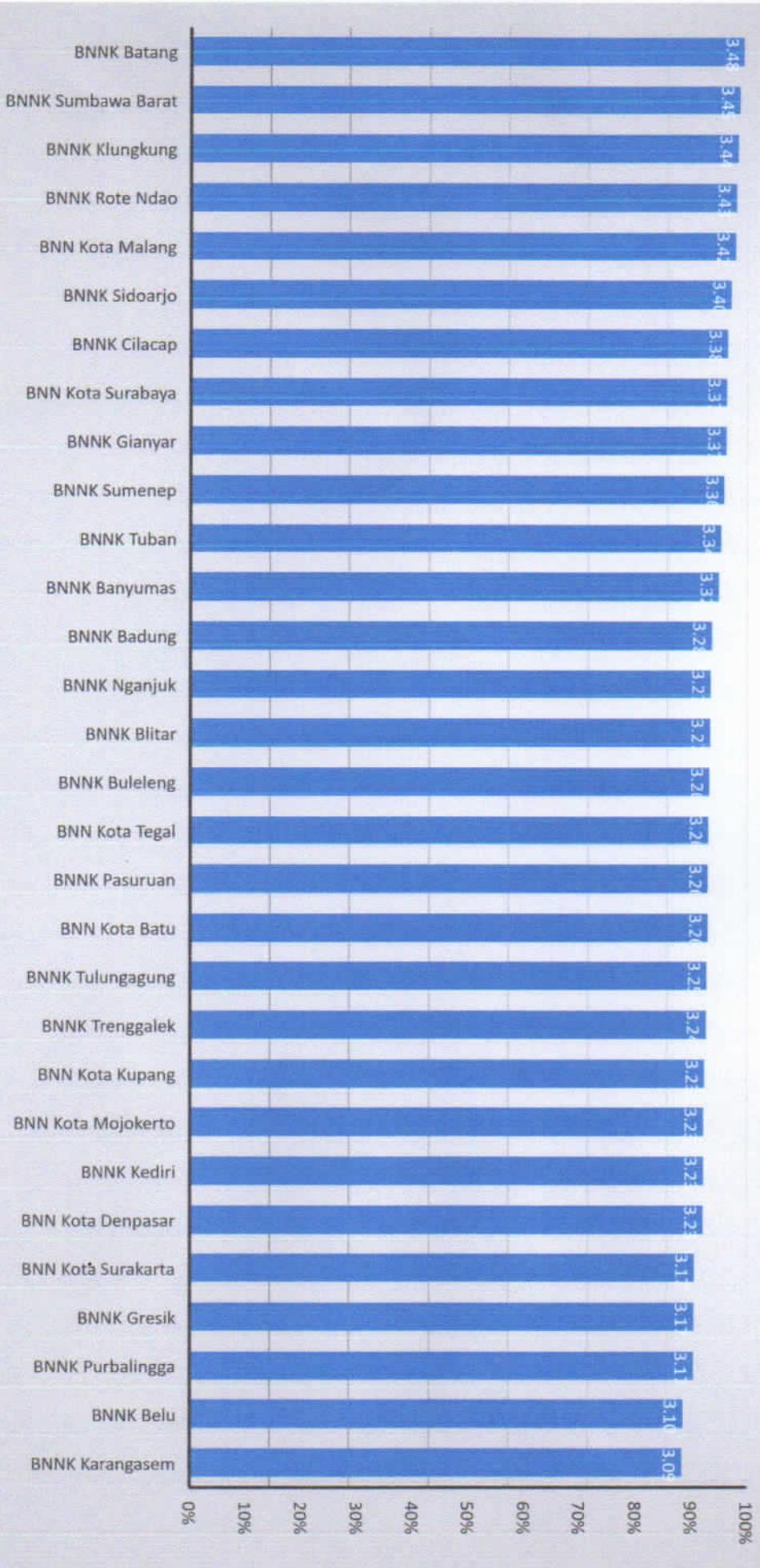
KEPALA
BNN

KATEGORI TANGGAP



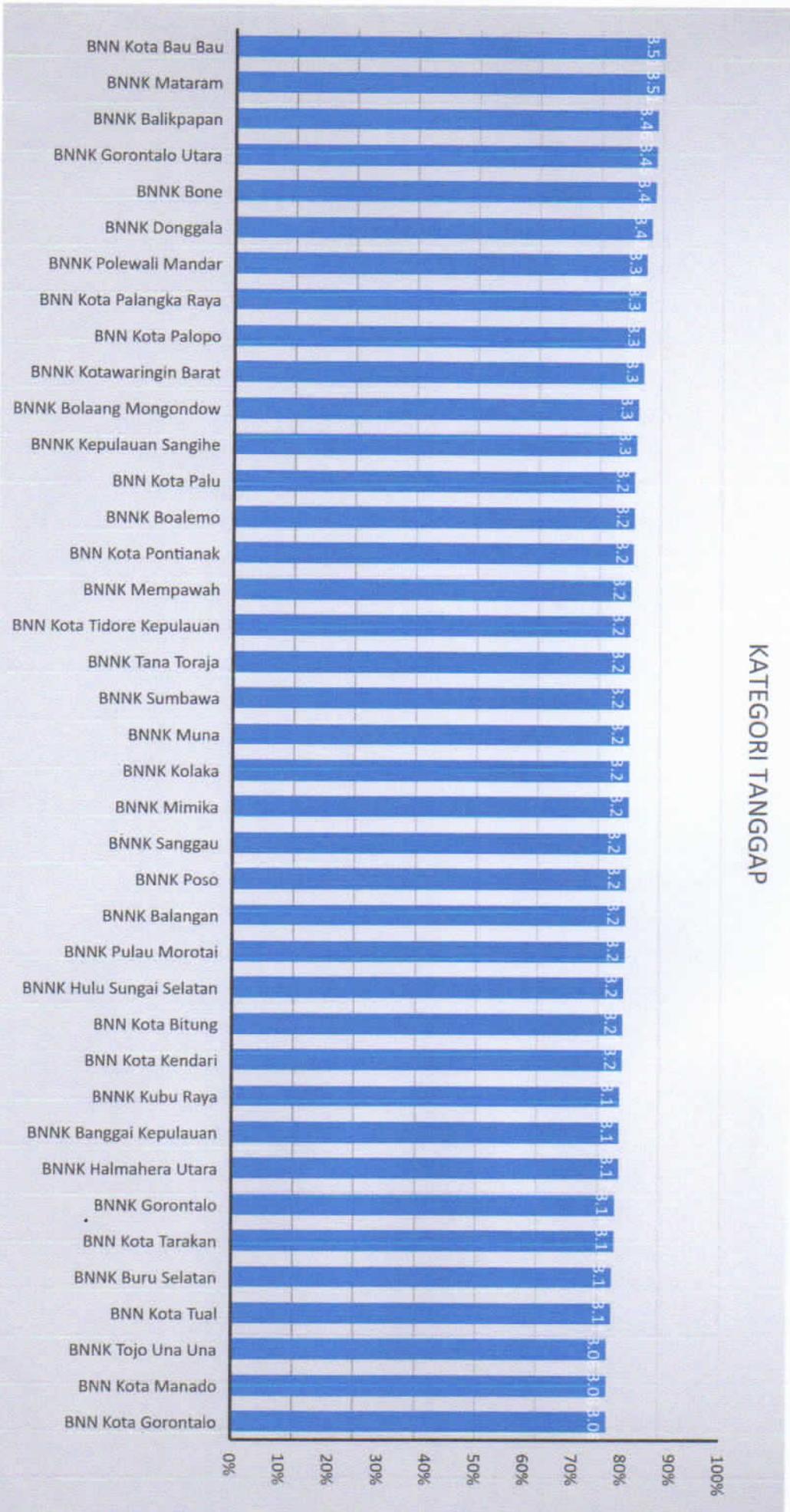
LAMPIRAN
SURAT _____ KEPALA _____ BNN
NOMOR : B/ 4324 /XII/DE/PM.00/2022/BNN
TANGGAL : 26 DESEMBER 2022

KATEGORI TANGGAP



LAMPIRAN
SURAT KEPALA BNN
NOMOR : B/ 4324 /XII/DE/PM.00/2022/BNN
TANGGAL : 26 DESEMBER 2022

KATEGORI TANGGAP



LAMPIRAN
 SURAT _____ KEPALA _____ BNN
 NOMOR : B/ 4324 /XII/DE/PM.00/2022/BNN
 TANGGAL : 26 DESEMBER 2022

DAFTAR SATKER DAN NILAI BOBOT 5 VARIABEL KOTAN

NO	SATKER	SKOR					INDEKS 2022 (Skala 1-4)	KATEGORI
		Ketahanan Keluarga	Ketahanan Masyarakat	Kewilayahan	Kelembagaan	Hukum		
1	BNNP Aceh	22.37	20.66	7.65	19.27	11.75	3.27	Tanggap
2	BNNK Gayo Lues	22.80	22.50	8.18	22.44	13.10	3.56	Sangat Tanggap
3	BNNK Aceh Selatan	21.85	18.94	7.09	17.09	10.69	3.03	Cukup Tanggap
4	BNNK Pidie	20.69	19.39	7.23	18.83	11.02	3.09	Tanggap
5	BNNK Pidie Jaya	22.23	20.18	7.62	17.49	12.19	3.19	Tanggap
6	BNNK Aceh Tamiang	23.10	20.97	7.58	19.81	11.01	3.30	Tanggap
7	BNNK Bireuen	22.07	20.08	7.27	16.89	10.21	3.06	Cukup Tanggap
8	BNN Kota Sabang	22.42	20.31	7.57	19.69	11.37	3.25	Tanggap
9	BNN Kota Lhokseumawe	20.79	19.71	7.37	18.97	8.84	3.03	Cukup Tanggap
10	BNN Kota Langsa	23.60	22.17	8.31	21.26	12.37	3.51	Tanggap
11	BNN Kota Banda Aceh	22.28	20.61	7.63	19.02	12.36	3.28	Tanggap
12	BNNP Sumatera Utara	22.14	20.98	7.92	20.27	12.01	3.33	Tanggap
13	BNNK Mandailing Natal	22.57	22.25	8.21	20.26	13.06	3.45	Tanggap
14	BNNK Deli Serdang	23.77	23.89	8.27	23.56	11.98	3.66	Sangat Tanggap
15	BNNK Simalungun	21.16	19.71	7.47	18.12	12.38	3.15	Tanggap

LAMPIRAN
 SURAT KEPALA BNN
 NOMOR : B/ 4324 /XII/DE/PM.00/2022/BNN
 TANGGAL : 26 DESEMBER 2022

NO	SATKER	SKOR						INDEKS 2022 (Skala 1-4)	KATEGORI
		Ketahanan Keluarga	Ketahanan Masyarakat	Kewilayahan	Kelembagaan	Hukum			
16	BNNK Serdang Bedagai	21.65	19.36	7.32	17.42	10.79	3.06	Cukup Tanggap	
17	BNN Kota Pematangsiantar	22.05	21.38	7.72	19.84	11.55	3.30	Tanggap	
18	BNN Kota Asahan	20.98	20.30	8.15	20.04	12.66	3.29	Tanggap	
19	BNN Kota Tebing Tinggi	21.55	19.30	7.52	17.03	11.26	3.07	Tanggap	
20	BNN Kota Tanjungbalai	23.82	23.09	8.97	22.85	13.30	3.68	Sangat Tanggap	
21	BNNK Tapanuli Selatan	21.79	20.55	7.90	19.93	11.76	3.28	Tanggap	
22	BNN Kota Binjai	22.44	21.54	8.01	21.35	12.64	3.44	Tanggap	
23	BNNK Langkat	20.57	19.05	7.15	19.47	10.47	3.07	Tanggap	
24	BNN Kota Gunung Sitoli	22.21	22.64	8.35	21.72	11.48	3.46	Tanggap	
25	BNNK Labuhanbatu Utara	22.14	20.31	7.63	19.59	12.14	3.27	Tanggap	
26	BNNK Batu Bara	21.76	20.72	8.33	21.19	12.96	3.40	Tanggap	
27	BNNK Karo	22.37	20.21	8.06	20.73	12.03	3.34	Tanggap	
28	BNNP Sumatera Barat	22.11	19.48	7.21	17.60	10.93	3.09	Tanggap	
29	BNN Kota Payakumbuh	21.61	17.87	7.05	16.09	10.13	2.91	Cukup Tanggap	
30	BNN Kota Sawahlunto	22.24	19.94	7.49	18.99	11.61	3.21	Tanggap	
31	BNNK Pasaman Barat	21.75	19.02	6.29	17.11	11.13	3.01	Cukup Tanggap	
32	BNNK Solok	22.50	20.28	7.37	17.46	10.72	3.13	Tanggap	
33	BNNP Sumatera Selatan	22.11	20.93	7.75	19.51	11.87	3.29	Tanggap	

LAMPIRAN
 SURAT KEPALA BNN
 NOMOR : B/ 4314 /XII/DE/PM.00/2022/BNN
 TANGGAL : 16 DESEMBER 2022

NO	SATKER	SKOR						INDEKS 2022 (Skala 1-4)	KATEGORI
		Ketahanan Keluarga	Ketahanan Masyarakat	Kewilayahan	Kelembagaan	Hukum			
52	BNN Kota Pekanbaru	23.46	22.45	7.15	20.37	13.31	3.47	Tanggap	
53	BNNK Pelalawan	23.99	23.66	9.37	23.87	14.21	3.80	Sangat Tanggap	
54	BNNK Kuantan Singingi	23.74	23.15	8.93	22.08	14.15	3.68	Sangat Tanggap	
55	BNNP Kepulauan Riau	23.16	22.27	8.22	20.73	12.40	3.47	Tanggap	
56	BNNK Karimun	22.72	22.51	7.75	20.42	11.96	3.41	Tanggap	
57	BNN Kota Batam	23.72	23.48	9.06	21.34	13.28	3.63	Sangat Tanggap	
58	BNNK Tanjung Pinang	23.03	20.95	7.87	20.45	11.98	3.37	Tanggap	
59	BNNP Bangka Belitung	21.25	20.52	7.72	19.83	11.34	3.23	Tanggap	
60	BNNK Bangka Selatan	19.32	18.77	7.53	18.57	10.88	3.00	Cukup Tanggap	
61	BNNK Bangka	22.50	22.65	8.32	21.69	11.82	3.48	Tanggap	
62	BNN Kota Pangkalpinang	21.11	19.62	7.47	19.24	11.12	3.14	Tanggap	
63	BNNK Belitung	22.31	22.47	8.05	21.03	12.17	3.44	Tanggap	
64	BNNP Lampung	22.59	21.51	7.42	19.07	11.75	3.29	Tanggap	
65	BNNK Tanggamus	21.82	21.22	7.71	20.82	12.16	3.35	Tanggap	
66	BNNK Lampung Selatan	23.48	22.90	8.31	22.20	13.14	3.60	Sangat Tanggap	
67	BNN Kota Metro	22.06	20.30	6.61	15.79	10.55	3.01	Cukup Tanggap	
68	BNNK Way Kanan	21.98	20.15	6.51	15.72	10.63	3.00	Cukup Tanggap	
69	BNNK Lampung Timur	23.48	22.90	8.31	22.24	12.68	3.58	Sangat Tanggap	
70	BNNP Banten	22.14	20.39	7.43	19.25	11.70	3.24	Tanggap	

LAMPIRAN
 SURAT KEPALA BNN
 NOMOR : B/ 4374 /XII/DE/PM.001/2022/BNN
 TANGGAL : 26 DESEMBER 2022

NO	SATKER	SKOR					INDEKS 2022 (Skala 1-4)	KATEGORI
		Ketahanan Keluarga	Ketahanan Masyarakat	Kewilayahan	Kelembagaan	Hukum		
71	BNN Kota Tangerang Selatan	22.71	20.90	7.06	18.33	11.21	3.21	Tanggap
72	BNN Kota Cilegon	21.97	19.32	7.18	19.14	10.92	3.14	Tanggap
73	BNN Kota Tangerang	21.75	21.50	8.23	20.44	13.44	3.41	Tanggap
74	BNNP DKI Jakarta	22.00	19.41	7.24	16.93	11.81	3.10	Tanggap
75	BNN Kota Jakarta Timur	22.59	22.07	7.35	23.37	11.75	3.48	Tanggap
76	BNN Kota Jakarta Selatan	21.89	19.11	7.20	16.27	11.96	3.06	Cukup Tanggap
77	BNN Kota Jakarta Utara	22.41	20.20	7.36	18.39	11.16	3.18	Tanggap
78	BNNP Jawa Barat	22.25	20.46	7.46	18.18	11.35	3.19	Tanggap
79	BNNK Karawang	21.11	18.76	6.98	15.36	10.77	2.92	Cukup Tanggap
80	BNNK Sukabumi	22.67	21.19	7.75	18.19	11.38	3.25	Tanggap
81	BNNK Bogor	22.63	20.55	7.55	18.42	11.34	3.22	Tanggap
82	BNNK Sumedang	22.81	20.13	7.61	17.76	11.69	3.20	Tanggap
83	BNNK Tasikmalaya	22.39	20.40	7.28	18.01	10.86	3.16	Tanggap
84	BNNK Ciamis	22.52	20.49	7.70	17.78	11.86	3.21	Tanggap
85	BNNK Kuningan	23.08	22.50	7.88	19.00	11.69	3.37	Tanggap
86	BNN Kota Cirebon	21.29	19.49	6.82	18.03	10.63	3.05	Cukup Tanggap
87	BNN Kota Depok	23.32	23.73	8.74	21.40	13.27	3.62	Sangat Tanggap
88	BNNK Cianjur	19.77	18.70	6.85	18.51	10.74	2.98	Cukup Tanggap

LAMPIRAN
 SURAT _____ KEPALA _____ BNN
 NOMOR : B/ 4311 /XII/DE/PM.00/2022/BNN
 TANGGAL : 26 DESEMBER 2022

NO	SATKER	SKOR						INDEKS 2022 (Skala 1-4)	KATEGORI
		Ketahanan Keluarga	Ketahanan Masyarakat	Kewilayahan	Kelembagaan	Hukum			
89	BNNK Garut	22.28	19.52	7.36	16.76	10.96	3.07	Tanggap	
90	BNN Kota Bandung	23.37	21.73	7.84	20.58	12.39	3.44	Tanggap	
91	BNN Kota Cimahi	22.39	20.03	7.33	17.23	11.59	3.14	Tanggap	
92	BNNK Bandung Barat	22.17	19.46	7.03	17.50	10.64	3.07	Tanggap	
93	BNNP DI Yogyakarta	22.67	20.35	7.43	18.91	11.15	3.22	Tanggap	
94	BNN Kota Yogyakarta	23.14	21.45	8.06	21.62	12.33	3.46	Tanggap	
95	BNNK Bantul	22.68	20.06	6.96	17.11	9.99	3.07	Tanggap	
96	BNNK Sleman	22.22	19.50	7.12	17.41	10.49	3.07	Tanggap	
97	BNNP Jawa Tengah	22.49	21.06	7.86	19.84	11.78	3.32	Tanggap	
98	BNNK Kendal	22.69	20.65	7.67	19.63	11.81	3.30	Tanggap	
99	BNNK Temanggung	21.98	20.95	7.89	20.60	11.10	3.30	Tanggap	
100	BNNK Banyumas	21.93	20.68	7.95	19.99	12.54	3.32	Tanggap	
101	BNNK Purbalingga	22.44	20.43	7.43	18.00	10.83	3.17	Tanggap	
102	BNNK Batang	24.00	21.33	8.70	20.21	12.70	3.48	Tanggap	
103	BNNK Cilacap	22.54	21.64	7.77	20.52	11.92	3.38	Tanggap	
104	BNNK Magelang	23.06	22.35	8.39	22.06	13.55	3.58	Sangat Tanggap	
105	BNN Kota Surakarta	22.57	19.98	7.54	18.14	11.07	3.17	Tanggap	
106	BNN Kota Tegal	21.33	21.60	7.59	19.93	11.02	3.26	Tanggap	
107	BNNP Jawa Timur	22.59	21.15	8.00	19.94	11.93	3.34	Tanggap	

LAMPIRAN
 SURAT KEPALA BNN
 NOMOR : B/ 4324 /XII/DE/PM.00/2022/BNN
 TANGGAL : 26 DESEMBER 2022

NO	SATKER	SKOR					INDEKS 2022 (Skala 1-4)	KATEGORI
		Ketahanan Keluarga	Ketahanan Masyarakat	Kewilayahan	Kelembagaan	Hukum		
108	BNNK Malang	24.22	23.86	9.15	22.75	12.88	3.71	Sangat Tanggap
109	BNNK Tulungagung	22.26	20.16	7.57	19.37	11.84	3.25	Tanggap
110	BNNK Pasuruan	22.36	20.33	8.01	19.59	11.10	3.26	Tanggap
111	BNNK Sumenep	22.86	21.12	8.15	19.98	11.79	3.36	Tanggap
112	BNNK Gresik	20.53	20.46	7.55	19.28	11.44	3.17	Tanggap
113	BNNK Lumajang	23.29	22.41	9.06	22.12	14.19	3.64	Sangat Tanggap
114	BNNK Kediri	22.78	20.35	7.39	18.63	11.53	3.23	Tanggap
115	BNNK Tuban	22.87	20.95	7.86	20.10	11.65	3.34	Tanggap
116	BNN Kota Malang	21.57	21.44	8.50	21.02	13.06	3.42	Tanggap
117	BNN Kota Surabaya	22.87	21.13	7.70	21.07	11.49	3.37	Tanggap
118	BNN Kota Kediri	23.15	22.97	8.44	21.60	13.41	3.58	Sangat Tanggap
119	BNNK Sidoarjo	23.12	21.08	8.17	20.59	12.01	3.40	Tanggap
120	BNN Kota Batu	22.63	20.89	7.66	18.82	11.39	3.26	Tanggap
121	BNNK Trenggalek	22.41	21.03	7.67	18.82	11.17	3.24	Tanggap
122	BNNK Nganjuk	22.23	20.90	7.81	19.05	11.81	3.27	Tanggap
123	BNN Kota Mojokerto	22.81	20.45	7.62	18.47	11.35	3.23	Tanggap
124	BNNK Blitar	22.49	20.98	8.16	18.87	11.24	3.27	Tanggap
125	BNNP Bali	22.19	20.89	7.88	19.70	11.52	3.29	Tanggap

LAMPIRAN
 SURAT KEPALA BNN
 NOMOR : B/ 4314 /XII/DE/PM.00/2022/BNN
 TANGGAL : 26 DESEMBER 2022

NO	SATKER	SKOR VARIABEL						INDEKS 2022 (Skala 1-4)	KATEGORI
		Ketahanan Keluarga	Ketahanan Masyarakat	Kewilayahan	Kelembagaan	Hukum			
143	BNN Kota Banjarbaru	24.90	25.00	9.41	25.00	14.23	3.94	Sangat Tanggap	
144	BNNK Balangan	22.58	20.23	7.66	18.80	11.32	3.22	Tanggap	
145	BNNK Tanah Laut	19.47	19.15	7.24	18.21	11.22	3.01	Cukup Tanggap	
146	BNNK Tabalong	23.04	22.41	8.41	21.45	13.55	3.55	Sangat Tanggap	
147	BNNK Hulu Sungai Selatan	22.35	21.28	7.62	17.82	11.20	3.21	Tanggap	
148	BNNK Hulu Sungai Utara	23.01	22.41	8.62	21.60	13.45	3.56	Sangat Tanggap	
149	BNN Kota Banjarmasin	23.74	22.23	8.83	21.89	13.40	3.60	Sangat Tanggap	
150	BNNP Kalimantan Barat	21.91	19.94	7.56	18.45	11.20	3.16	Tanggap	
151	BNNK Bengkayang	21.85	19.16	7.24	17.59	10.40	3.05	Cukup Tanggap	
152	BNNK Kubu Raya	21.21	19.57	7.75	18.83	12.11	3.18	Tanggap	
153	BNNK Sintang	22.08	18.83	7.17	17.20	10.09	3.01	Cukup Tanggap	
154	BNNK Sanggau	21.68	20.20	7.82	19.40	11.54	3.23	Tanggap	
155	BNN Kota Singkawang	21.68	19.62	7.27	17.02	10.61	3.05	Cukup Tanggap	
156	BNN Kota Pontianak	22.47	20.91	7.78	19.24	11.64	3.28	Tanggap	
157	BNNK Mempawah	21.78	20.57	7.82	19.45	11.93	3.26	Tanggap	
158	BNNP Kalimantan Timur	22.59	21.14	7.63	18.85	11.41	3.26	Tanggap	
159	BNNK Samarinda	22.33	18.89	6.01	13.18	7.68	2.72	Cukup Tanggap	
160	BNNK Balikpapan	22.71	21.56	8.16	21.05	13.03	3.46	Tanggap	

LAMPIRAN
 SURAT _____ KEPALA _____ BNN
 NOMOR : B/ 4344 /XII/DE/PM.00/2022/BNN
 TANGGAL : 26 DESEMBER 2022

NO	SATKER	SKOR					VARIABEL	INDEKS 2022 (Skala 1-4)	KATEGORI
		Ketahanan Keluarga	Ketahanan Masyarakat	Kewilayahan	Kelembagaan	Hukum			
161	BNNK Bontang	22.72	22.99	9.14	22.84	13.88	3.66	Sangat Tanggap	
162	BNNP Kalimantan Tengah	22.78	21.07	7.69	20.64	11.84	3.36	Tanggap	
163	BNNK Kotawaringin Barat	23.06	21.23	7.53	20.25	11.85	3.36	Tanggap	
164	BNN Kota Palangka Raya	22.51	20.91	7.87	21.13	11.83	3.37	Tanggap	
165	BNNP Kalimantan Utara	21.93	19.01	7.36	17.95	10.12	3.05	Cukup Tanggap	
166	BNN Kota Tarakan	22.15	19.27	7.70	19.34	9.96	3.14	Tanggap	
167	BNNK Nunukan	21.75	18.78	7.07	16.80	10.25	2.99	Cukup Tanggap	
168	BNNP Sulawesi Selatan	22.18	20.56	7.77	21.45	12.01	3.36	Tanggap	
169	BNNK Tana Toraja	21.87	19.77	7.66	20.36	11.68	3.25	Tanggap	
170	BNNK Bone	22.72	21.48	7.81	22.17	11.99	3.45	Tanggap	
171	BNN Kota Palopo	21.94	20.40	7.82	21.59	12.38	3.36	Tanggap	
172	BNNP Sulawesi Tengah	21.89	20.09	7.51	20.60	11.50	3.26	Tanggap	
173	BNNK Banggai Kepulauan	21.87	19.41	7.47	19.43	11.20	3.17	Tanggap	
174	BNNK Poso	20.51	19.61	7.64	21.58	11.29	3.23	Tanggap	
175	BNNK Tojo Una Una	21.77	18.64	7.20	18.52	10.81	3.08	Tanggap	
176	BNN Kota Palu	22.25	20.02	7.60	20.98	11.32	3.29	Tanggap	
177	BNNK Morowali	23.89	24.03	7.38	21.09	13.50	3.60	Sangat Tanggap	
178	BNNK Donggala	22.84	22.04	7.41	21.54	11.65	3.42	Tanggap	

LAMPIRAN
SURAT
 NOMOR : B/ 4324 /XII/DE/PM.001/2022/BNN
 TANGGAL : 16 DESEMBER 2022
 KEPALA BNN

NO	SATKER	SKOR					INDEKS 2022 (Skala 1-4)	KATEGORI
		Ketahanan Keluarga	Ketahanan Masyarakat	Kewilayahan	Kelembagaan	Hukum		
179	BNNP Sulawesi Tenggara	22.42	20.25	7.63	21.08	11.45	3.31	Tanggap
180	BNNK Muna	22.28	20.29	7.51	20.01	11.17	3.25	Tanggap
181	BNNK Kolaka	22.08	20.27	7.17	20.82	10.88	3.25	Tanggap
182	BNN Kota Kendari	22.28	19.52	7.39	19.82	11.00	3.20	Tanggap
183	BNN Kota Bau Bau	22.93	20.95	8.26	23.22	12.50	3.51	Tanggap
184	BNNP Sulawesi Barat	22.34	21.44	7.64	20.90	12.15	3.38	Tanggap
185	BNNK Polewali Mandar	22.34	21.44	7.64	20.90	12.15	3.38	Tanggap
186	BNNP Sulawesi Utara	21.71	19.88	7.50	20.22	11.62	3.24	Tanggap
187	BNNK Kepulauan Sangihe	21.88	19.62	7.64	21.19	12.23	3.30	Tanggap
188	BNNK Bolaang Mongondow	21.69	20.77	7.64	20.90	11.91	3.32	Tanggap
189	BNN Kota Bitung	21.60	19.80	7.44	19.69	11.55	3.20	Tanggap
190	BNN Kota Manado	21.62	19.12	7.22	18.65	10.31	3.08	Tanggap
191	BNNP Gorontalo	21.98	19.45	7.47	19.51	10.62	3.16	Tanggap
192	BNNK Boalemo	22.04	19.90	7.76	20.66	11.80	3.29	Tanggap
193	BNNK Bone Bolango	21.76	18.70	7.43	18.43	9.47	3.03	Cukup Tanggap
194	BNN Kota Gorontalo	21.92	19.13	7.26	18.74	9.85	3.08	Tanggap
195	BNNK Gorontalo Utara	22.47	21.32	7.88	22.15	12.55	3.45	Tanggap
196	BNNK Gorontalo	21.98	19.24	7.27	19.20	10.86	3.14	Tanggap

LAMPIRAN
 SURAT _____ KEPALA _____ BNN
 NOMOR : B/4324/XII/DE/PM.00/2022/BNN
 TANGGAL : 26 DESEMBER 2022

NO	SATKER	SKOR VARIABEL					INDEKS 2022 (Skala 1-4)	KATEGORI
		Ketahanan Keluarga	Ketahanan Masyarakat	Kewilayahan	Kelembagaan	Hukum		
197	BNNP Maluku	22.25	19.33	7.33	18.91	10.08	3.12	Tanggap
198	BNNK Buru Selatan	22.30	19.59	7.36	19.07	9.63	3.12	Tanggap
199	BNN Kota Tual	22.20	19.05	7.30	18.66	10.62	3.11	Tanggap
200	BNNP Maluku Utara	21.46	20.27	7.46	20.46	11.01	3.23	Tanggap
201	BNNK Pulau Morotai	21.26	19.49	7.30	21.03	11.38	3.22	Tanggap
202	BNNK Halmahera Utara	21.74	19.48	7.23	20.03	10.88	3.17	Tanggap
203	BNN Kota Tidore Kepulauan	21.33	20.76	7.57	20.67	11.06	3.26	Tanggap
204	BNNP Papua	21.99	18.56	7.29	18.62	9.27	3.03	Cukup Tanggap
205	BNNK Jayapura	22.01	18.44	7.27	18.40	8.92	3.00	Cukup Tanggap
206	BNNK Mimika	21.72	19.79	7.48	20.56	11.60	3.25	Tanggap
207	BNNP Papua Barat	20.53	19.70	7.52	19.74	11.48	3.16	Tanggap
INDEKS NASIONAL		22.28	20.63	7.72	19.52	11.62	3.27	Tanggap

LAMPIRAN

SURAT KEPALA BNN
NOMOR : B/ 4324 /XII/DE/PM.00/2022/BNN
TANGGAL : 26 DESEMBER 2022

HASIL PENGHITUNGAN INDEKS KABUPATEN/KOTA TANGGAP ANCAMAN NARKOBA

1. 22 Kabupaten/Kota kategori Sangat Tanggap Range 3,533 – 4,000 ;

BNNK Gayo Lues, BNNK Deli Serdang, BNN Kota Tanjungbalai, BNNP Riau, BNN Kota Dumai, BNNK Pelalawan, BNNK Kuantan Singingi, BNN Kota Batam, BNNK Lampung Selatan, BNNK Lampung Timur, BNN Kota Depok, BNNK Magelang, BNNK Malang, BNNK Lumajang, BNN Kota Kediri, BNNK Barito Kuala, BNN Kota Banjarbaru, BNNK Tabalong, BNNK Hulu Sungai Utara, BNN Kota Banjarmasin, BNNK Bontang dan BNNK Morowali.

2. 160 Kabupaten/Kota kategori Tanggap Range 3,065 – 3,532 ;

BNNP Aceh, BNNK Pidie, BNNK Pidie Jaya, BNNK Aceh Tamiang, BNN Kota Sabang, BNN Kota Langsa, BNN Kota Banda Aceh, BNNP Sumatera Utara, BNNK Mandailing Natal, BNNK Simalungun, BNN Kota Pematangsiantar, BNN Kota Asahan, BNN Kota Tebing Tinggi, BNNK Tapanuli Selatan, BNN Kota Binjai, BNNK Langkat, BNN Kota Gunung Sitoli, BNNK Labuhanbatu Utara, BNNK Batu Bara, BNNK Karo, BNNP Sumatera Barat, BNN Kota Sawahlunto, BNNK Solok, BNNP Sumatera Selatan, BNN Kota Pagar Alam, BNN Kota Lubuklinggau, BNNK Prabumulih, BNNK Ogan Ilir, BNNK Ogan Komering ilir, BNNK Empat Lawang, BNNK Muara Enim, BNNK Ogan Komering Ulu Timur, BNNP Bengkulu, BNNK Bengkulu Selatan, BNN Kota Bengkulu, BNNP Jambi, BNNK Batang Hari, BNNK Tanjung Jabung Timur, BNN Kota Jambi, BNN Kota Pekanbaru, BNNP Kepulauan Riau, BNNK Karimun, BNNK Tanjung Pinang, BNNP Bangka Belitung, BNNK Bangka, BNN Kota Pangkalpinang, BNNK Belitung, BNNP Lampung, BNNK Tanggamus, BNNP Banten, BNN Kota Tangerang Selatan, BNN Kota Cilegon, BNN Kota Tangerang, BNNP DKI Jakarta, BNN Kota Jakarta Timur, BNN Kota Jakarta Utara, BNNP Jawa Barat, BNNK Sukabumi, BNNK Bogor, BNNK Tasikmalaya, BNNK Ciamis, BNNK Kuningan, BNNK Garut, BNN Kota Bandung, BNN Kota Cimahi, BNNK Bandung Barat, BNNP DI Yogyakarta, BNN Kota Yogyakarta, BNNK Bantul, BNNK Sleman, BNNP Jawa Tengah, BNNK Kendal, BNNK Temanggung, BNNK Banyumas, BNNK Purbalingga, BNNK Batang, BNNK Cilacap, BNN Kota Surakarta, BNN Kota Tegal, BNNP Jawa Timur, BNNK Tulungagung, BNNK Pasuruan, BNNK Sumenep, BNNK Gresik, BNNK Kediri, BNNK Tuban, BNN Kota Malang, BNN Kota Surabaya, BNNK Sidoarjo, BNN Kota Batu, BNNK Trenggalek, BNNK Nganjuk, BNN Kota Mojokerto, BNNK Blitar, BNNP Bali, BNNK Badung, BNNK Gianyar, BNNK Klungkung, BNNK Buleleng, BNNK Karangasem,

BNN Kota Denpasar, BNNP Nusa Tenggara Timur, BNN Kota Kupang, BNNK Belu, BNNK Rote Ndao, BNNP Nusa Tenggara Barat, BNNK Sumbawa Barat, BNNK Mataram, BNNK Sumbawa, BNNP Kalimantan Selatan, BNNK Balangan, BNNK Hulu Sungai Selatan, BNNP Kalimantan Barat, BNNK Kubu Raya, BNNK Sanggau, BNN Kota Pontianak, BNNK Mempawah, BNNP Kalimantan Timur, BNNK Balikpapan, BNNP Kalimantan Tengah, BNNK Kotawaringin Barat, BNN Kota Palangka Raya, BNN Kota Tarakan, BNNP Sulawesi Selatan, BNNK Tana Toraja, BNNK Bone, BNN Kota Palopo, BNNP Sulawesi Tengah, BNNK Banggai Kepulauan, BNNK Poso, BNNK Tojo Una Una, BNN Kota Palu, BNNK Donggala, BNNK Muna, BNNK Kolaka, BNN Kota Kendari, BNN Kota Bau Bau, BNNP Sulawesi Barat, BNNP Sulawesi Barat, BNNK Polewali Mandar, BNNP Sulawesi Utara, BNNK Kepulauan Sangihe, BNNK Bolaang Mongondow, BNN Kota Bitung, BNN Kota Manado, BNNP Gorontalo, BNNK Boalemo, BNN Kota Gorontalo, BNNK Gorontalo Utara, BNNK Gorontalo, BNNP Maluku, BNNK Buru Selatan, BNN Kota Tual, BNNP Maluku Utara, BNNK Pulau Morotai, BNNK Halmahera Utara, BNN Kota Tidore Kepulauan, BNNK Mimika dan BNNP Papua Barat.

3. 25 Kabupaten/Kota kategori Cukup Tanggap Range 2,600 – 3,064

BNNK Aceh Selatan, BNNK Bireuen, BNN Kota Lhokseumawe, BNNK Serdang Bedagai, BNN Kota Payakumbuh, BNNK Pasaman Barat, BNNK Musi Rawas, BNNK Bangka Selatan, BNN Kota Metro, BNNK Way Kanan, BNN Kota Jakarta Selatan, BNNK Karawang, BNN Kota Cirebon, BNNK Cianjur, BNNK Bima, BNNK Tanah Laut, BNNK Bengkayang, BNNK Sintang, BNN Kota Singkawang, BNNK Samarinda, BNNP Kalimantan Utara, BNNK Nunukan, BNNK Bone Bolango, BNNP Papua dan BNNK Jayapura.

**a.n Kepala Badan Narkotika Nasional
Deputi Pemberdayaan Masyarakat**



Tagam Sinaga, S.H., M.M



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
(NATIONAL NARCOTICS BOARD OF THE REPUBLIC OF INDONESIA)**

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur

Telepon : (62-21) 80871566, 80871567

Faksimili : (62-21) 80885225, 80871531, 80871592, 80871593

Email : info@bnn.go.id Website : www.bnn.go.id

Nomor : B/4072/XII/DE/PC.01.03/2022/BNN Jakarta, 7 Desember 2022
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Hasil Perhitungan Indeks Ketahanan Keluarga
Terhadap Penyalahguna Narkoba (Dektara)
Direktorat Advokasi Tahun 2022

Kepada :

Yth. **1. Para Kepala BNN Provinsi;**
2. Para Kepala BNN Kabupaten/Kota.

di

Tempat

1. Rujukan :

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- c. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
- d. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
- e. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional RI Nomor 6 Tahun 2020 tentang Renstra BNN 2020-2024;
- f. Program Kerja Deputi Bidang Pencegahan Tahun Anggaran 2022.

2. Sehubungan dengan rujukan di atas, bersama ini disampaikan kepada Kepala BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota hasil penghitungan Indeks Ketahanan Keluarga terhadap Penyalahgunaan Narkoba (Dektara) yang merupakan pencapaian Indikator Kinerja Direktorat Advokasi Tahun 2022 sesuai Peraturan Kepala BNN RI Nomor 6 Tahun 2020 tentang Renstra BNN 2020-2024, dengan hasil sebagai berikut :

- a. Penghitungan Indeks Ketahanan Keluarga menggunakan aplikasi Dektara yaitu setiap BNNKab/Kota dan BNNP memilih Desa/Kelurahan yang telah ditentukan, kemudian diambil sampel dari keluarga yang telah diintervensi (keluarga yang terdiri dari anak dan orangtua). Pengukuran ini dilakukan secara nasional di 34 provinsi dan data yang dikumpulkan di setiap provinsi berasal dari Kabupaten/Kota yang sudah ada BNN Kabupaten/Kota yaitu 173 Kabupaten/Kota.

- b. Hasil angka penghitungan Dektara Tahun 2022 adalah 84,274 (Kategori tinggi) dengan target angka 78,68 (Kategori Tinggi), Adapun klasifikasi capaian wilayah sebagai berikut :
- 1) Kategori sangat tinggi (88,31 – 100,00) sebanyak 55 Satuan Kerja
 - 2) Kategori tinggi (76,61 – 88,30) sebanyak 136 Satuan Kerja
 - 3) Kategori rendah (65,00 – 76,60) sebanyak 15 Satuan Kerja
 - 4) Kategori sangat rendah (25,00 – 64,99) sebanyak 1 Satuan Kerja
- Daftar hasil penghitungan terlampir.
3. Berkaitan dengan butir satu dan dua di atas, diucapkan terima kasih atas partisipasi jajaran Pencegahan dalam Proses Penghitungan Dektara Tahun 2022 dan semoga dapat terus meningkatkan hasil capaian kinerja wilayah pada tahun berikutnya.
4. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional
Deputi Pencegahan

Drs. Richard M. Nainggolan, S.H., M.M., MBA.

Tembusan :

1. Kepala BNN
2. Sekretaris Utama BNN
3. Inspektur Utama BNN

**REKAPITULASI PENGHITUNGAN INDEKS KETAHANAN KELUARGA
TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOBA (DEKTARA) TAHUN 2022**

NO	SATUAN KERJA	NILAI DEKTARA	KATEGORI
1	BNNP NANGGROE ACEH DARUSSALAM	75,714	RENDAH
2	BNN KABUPATEN ACEH SELATAN	70,179	RENDAH
3	BNN KABUPATEN GAYO LUES	80,089	TINGGI
4	BNN KABUPATEN PIDIE JAYA	83,304	TINGGI
5	BNN KOTA SABANG	94,643	SANGAT TINGGI
6	BNN KOTA LHOKSEUMAWE	79,821	TINGGI
7	BNN KOTA LANGSA	85,268	TINGGI
8	BNN KABUPATEN BIREUEN	84,643	TINGGI
9	BNN KABUPATEN ACEH TAMIANG	83,125	TINGGI
10	BNN KABUPATEN PIDIE	77,500	TINGGI
11	BNN KOTA BANDA ACEH	82,500	TINGGI
12	BNNP SUMATERA UTARA	83,929	TINGGI
13	BNN KABUPATEN KARO	86,607	TINGGI
14	BNN KOTA BINJAI	84,911	TINGGI
15	BNN KOTA TANJUNG BALAI	95,893	SANGAT TINGGI
16	BNN KOTA GUNUNGSITOLI	87,500	TINGGI
17	BNN KABUPATEN DELI SERDANG	84,286	TINGGI
18	BNN KOTA PEMATANG SIANTAR	85,357	TINGGI
19	BNN KABUPATEN LANGKAT	79,464	TINGGI
20	BNN KABUPATEN ASAHAN	82,857	TINGGI
21	BNN KABUPATEN MANDAILING NATAL	79,554	TINGGI
22	BNN KABUPATEN TAPANULI SELATAN	91,607	SANGAT TINGGI
23	BNN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI	92,500	SANGAT TINGGI
24	BNN KOTA TEBING TINGGI	85,000	TINGGI
25	BNN KABUPATEN SIMALUNGUN	83,482	TINGGI
26	BNN KABUPATEN LABUHANBATU UTARA	83,482	TINGGI
27	BNN KABUPATEN BATU BARA	77,411	TINGGI

LAMPIRAN

SURAT KEPALA BNN

NOMOR : B/4072/XII/DE/PC.01.03/2022/BNN

TANGGAL : 7 DESEMBER 2022

NO	SATUAN KERJA	NILAI DEKTARA	KATEGORI
28	BNNP SUMATERA BARAT	88,036	TINGGI
29	BNN KOTA SAWAHLUNTO	81,696	TINGGI
30	BNN KOTA PAYAKUMBUH	79,375	TINGGI
31	BNN KABUPATEN SOLOK	85,536	TINGGI
32	BNN KABUPATEN PASAMAN BARAT	79,554	TINGGI
33	BNNP RIAU	92,857	SANGAT TINGGI
34	BNN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI	86,964	TINGGI
35	BNN KABUPATEN PELALAWAN	86,339	TINGGI
36	BNN KOTA PEKANBARU	90,893	SANGAT TINGGI
37	BNN KOTA DUMAI	90,982	SANGAT TINGGI
38	BNNP JAMBI	93,571	SANGAT TINGGI
39	BNN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR	81,786	TINGGI
40	BNN KOTA JAMBI	73,214	RENDAH
41	BNN KABUPATEN BATANGHARI	77,411	TINGGI
42	BNNP LAMPUNG	89,732	SANGAT TINGGI
43	BNN KABUPATEN TANGGAMUS	81,964	TINGGI
44	BNN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN	92,143	SANGAT TINGGI
45	BNN KOTA METRO	78,571	TINGGI
46	BNN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR	75,536	RENDAH
47	BNN KABUPATEN WAY KANAN	89,554	SANGAT TINGGI
48	BNNP KEPULAUAN RIAU	90,625	SANGAT TINGGI
49	BNN KABUPATEN KARIMUN	92,411	SANGAT TINGGI
50	BNN KOTA BATAM	79,911	TINGGI
51	BNN KOTA TANJUNG PINANG	79,018	TINGGI
52	BNNP SUMATERA SELATAN	77,946	TINGGI
53	BNN KABUPATEN OGAN ILIR	79,196	TINGGI
54	BNN KOTA PAGARALAM	83,929	TINGGI
55	BNN KOTA LUBUKLINGGAU	81,518	TINGGI
56	BNN KABUPATEN EMPAT LAWANG	82,232	TINGGI
57	BNN KOTA PRABUMULIH	89,196	SANGAT TINGGI

LAMPIRAN

SURAT KEPALA BNN

NOMOR : B/4072/XII/DE/PC.01.03/2022/BNN

TANGGAL : 7 DESEMBER 2022

NO	SATUAN KERJA	NILAI DEKTARA	KATEGORI
58	BNN KABUPATEN MUARA ENIM	85,089	TINGGI
59	BNN KABUPATEN MUSI RAWAS	78,929	TINGGI
60	BNN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR	90,179	SANGAT TINGGI
61	BNN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR	91,607	SANGAT TINGGI
62	BNNP KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	77,143	TINGGI
63	BNN KABUPATEN BANGKA	80.000	TINGGI
64	BNN KOTA PANGKAL PINANG	87,857	TINGGI
65	BNN KABUPATEN BELITUNG	89,911	SANGAT TINGGI
66	BNN KABUPATEN BANGKA SELATAN	88,839	SANGAT TINGGI
67	BNNP BENGKULU	74,375	RENDAH
68	BNN KOTA BENGKULU	84,732	TINGGI
69	BNN KABUPATEN BENGKULU SELATAN	95,179	SANGAT TINGGI
70	BNNP DKI JAKARTA	88,214	TINGGI
71	BNN KOTA JAKARTA SELATAN	79,196	TINGGI
72	BNN KOTA JAKARTA TIMUR	84,464	TINGGI
73	BNN KOTA JAKARTA UTARA	85,714	TINGGI
74	BNNP BANTEN	73,839	RENDAH
75	BNN KOTA TANGERANG SELATAN	91,518	SANGAT TINGGI
76	BNN KOTA CILEGON	81,607	TINGGI
77	BNN KOTA TANGERANG	84,196	TINGGI
78	BNNP JAWA BARAT	77,946	TINGGI
79	BNN KABUPATEN BOGOR	87,143	TINGGI
80	BNN KABUPATEN CIANJUR	87,054	TINGGI
81	BNN KOTA BANDUNG	89,464	SANGAT TINGGI
82	BNN KOTA CIREBON	85,893	TINGGI
83	BNN KOTA CIMAHI	85,982	TINGGI
84	BNN KABUPATEN SUKABUMI	82,946	TINGGI
85	BNN KABUPATEN GARUT	86,429	TINGGI
86	BNN KABUPATEN KUNINGAN	81,161	TINGGI

LAMPIRAN

SURAT

KEPALA

BNN

NOMOR : B/4072/XII/DE/PC.01.03/2022/BNN

TANGGAL : 7 DESEMBER 2022

NO	SATUAN KERJA	NILAI DEKTARA	KATEGORI
87	BNN KABUPATEN CIAMIS	76,607	RENDAH
88	BNN KOTA DEPOK	84,911	TINGGI
89	BNN KABUPATEN KARAWANG	77,232	TINGGI
90	BNN KABUPATEN BANDUNG BARAT	92,500	SANGAT TINGGI
91	BNN KOTA TASIKMALAYA	83,661	TINGGI
92	BNN KABUPATEN SUMEDANG	89,107	SANGAT TINGGI
93	BNNP JAWA TENGAH	75,268	RENDAH
94	BNN KABUPATEN TEMANGGUNG	90,714	SANGAT TINGGI
95	BNN KOTA TEGAL	86,071	TINGGI
96	BNN KABUPATEN BANYUMAS	85,089	TINGGI
97	BNN KABUPATEN CILACAP	88,839	SANGAT TINGGI
98	BNN KABUPATEN KENDAL	89,464	SANGAT TINGGI
99	BNN KABUPATEN BATANG	84,018	TINGGI
100	BNN KABUPATEN PURBALINGGA	89,375	SANGAT TINGGI
101	BNN KABUPATEN MAGELANG	90,536	SANGAT TINGGI
102	BNN KOTA SURAKARTA	85,982	TINGGI
103	BNNP DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	91,696	SANGAT TINGGI
104	BNN KABUPATEN SLEMAN	89,018	SANGAT TINGGI
105	BNN KOTA YOGYAKARTA	90,714	SANGAT TINGGI
106	BNN KABUPATEN BANTUL	87,768	TINGGI
107	BNNP JAWA TIMUR	78,929	TINGGI
108	BNN KABUPATEN SUMENEP	83,214	TINGGI
109	BNN KOTA MOJOKERTO	81,964	TINGGI
110	BNN KOTA MALANG	90,536	SANGAT TINGGI
111	BNN KOTA BATU	82,232	TINGGI
112	BNN KABUPATEN TULUNGAGUNG	85,536	TINGGI
113	BNN KABUPATEN NGANJUK	77,589	TINGGI
114	BNN KABUPATEN SIDOARJO	81,607	TINGGI
115	BNN KOTA SURABAYA	87,143	TINGGI
116	BNN KOTA KEDIRI	89,554	SANGAT TINGGI

LAMPIRAN

SURAT KEPALA BNN

NOMOR : B/4072/XII/DE/PC.01.03/2022/BNN

TANGGAL : 7 DESEMBER 2022

NO	SATUAN KERJA	NILAI DEKTARA	KATEGORI
117	BNN KABUPATEN MALANG	85,446	TINGGI
118	BNN KABUPATEN GRESIK	96,339	SANGAT TINGGI
119	BNN KABUPATEN TRENGGALEK	87,946	TINGGI
120	BNN KABUPATEN LUMAJANG	91,071	SANGAT TINGGI
121	BNN KABUPATEN BLITAR	86,339	TINGGI
122	BNN KABUPATEN KEDIRI	88,393	SANGAT TINGGI
123	BNN KABUPATEN PASURUAN	78,929	TINGGI
124	BNN KABUPATEN TUBAN	87,143	TINGGI
125	BNNP KALIMANTAN BARAT	92,679	SANGAT TINGGI
126	BNN KABUPATEN BENGKAYANG	82,500	TINGGI
127	BNN KABUPATEN SINTANG	84,732	TINGGI
128	BNN KOTA PONTIANAK	79,018	TINGGI
129	BNN KOTA SINGKAWANG	80,179	TINGGI
130	BNN KABUPATEN SANGGAU	81,518	TINGGI
131	BNN KABUPATEN MEMPAWAH	87,679	TINGGI
132	BNN KABUPATEN KUBU RAYA	84,375	TINGGI
133	BNNP KALIMANTAN TENGAH	83,750	TINGGI
134	BNN KOTA PALANGKARAYA	79,196	TINGGI
135	BNN KABUPATEN KOTA WARINGIN BARAT	80,268	TINGGI
136	BNNP KALIMANTAN SELATAN	89,554	SANGAT TINGGI
137	BNN KABUPATEN BARITO KUALA	76,696	TINGGI
138	BNN KOTA BANJARMASIN	78,571	TINGGI
139	BNN KOTA BANJARBARU	84,911	TINGGI
140	BNN KABUPATEN BALANGAN	84,911	TINGGI
141	BNN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN	80,804	TINGGI
142	BNN KABUPATEN TANAH LAUT	83,839	TINGGI
143	BNN KABUPATEN TABALONG	79,554	TINGGI
144	BNN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA	90,625	SANGAT TINGGI
145	BNNP KALIMANTAN TIMUR	80,357	TINGGI
146	BNN KOTA BALIKPAPAN	81,607	TINGGI

LAMPIRAN

SURAT KEPALA BNN

NOMOR : B/4074/XII/DE/PC.01.03/2022/BNN

TANGGAL : 7 DESEMBER 2022

NO	SATUAN KERJA	NILAI DEKTARA	KATEGORI
147	BNN KOTA SAMARINDA	88,125	TINGGI
148	BNN KOTA BONTANG	99,107	SANGAT TINGGI
149	BNNP NUSA TENGGARA BARAT	79,286	TINGGI
150	BNN KABUPATEN BIMA	83,125	TINGGI
151	BNN KOTA MATARAM	95,268	SANGAT TINGGI
152	BNN KABUPATEN SUMBAWA BARAT	82,411	TINGGI
153	BNN KABUPATEN SUMBAWA	78,750	TINGGI
154	BNNP KALIMANTAN UTARA	78,661	TINGGI
155	BNN KOTA TARAKAN	84,286	TINGGI
156	BNN KABUPATEN NUNUKAN	85,179	TINGGI
157	BNNP SULAWESI UTARA	87,768	TINGGI
158	BNN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW	79,821	TINGGI
159	BNN KOTA BITUNG	85,179	TINGGI
160	BNN KOTA MANADO	87,411	TINGGI
161	BNN KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE	93,125	SANGAT TINGGI
162	BNNP SULAWESI TENGAH	83,125	TINGGI
163	BNN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN	89,018	SANGAT TINGGI
164	BNN KABUPATEN MOROWALI	89,286	SANGAT TINGGI
165	BNN KOTA PALU	92,143	SANGAT TINGGI
166	BNN KABUPATEN DONGGALA	82,143	TINGGI
167	BNN KABUPATEN POSO	80,357	TINGGI
168	BNN KABUPATEN TOJO UNA-UNA	80,804	TINGGI
169	BNNP SULAWESI SELATAN	82,946	TINGGI
170	BNN KABUPATEN TANA TORAJA	85,268	TINGGI
171	BNN KABUPATEN BONE	81,607	TINGGI
172	BNN KOTA PALOPO	92,232	SANGAT TINGGI
173	BNNP SULAWESI TENGGARA	83,839	TINGGI
174	BNN KABUPATEN MUNA	70,893	RENDAH
175	BNN KABUPATEN KOLAKA	92,143	SANGAT TINGGI

LAMPIRAN

SURAT KEPALA BNN

NOMOR : B/4072/XII/DE/PC.01.03/2022/BNN

TANGGAL : 7 DESEMBER 2022

NO	SATUAN KERJA	NILAI DEKTARA	KATEGORI
176	BNN KOTA KENDARI	77,321	TINGGI
177	BNN KOTA BAU-BAU	91,607	SANGAT TINGGI
178	BNNP SULAWESI BARAT	77,768	TINGGI
179	BNN KABUPATEN POLEWALI MANDAR	78,661	TINGGI
180	BNNP MALUKU	85,982	TINGGI
181	BNN KABUPATEN BURU SELATAN	80,804	TINGGI
182	BNN KOTA TUAL	80,000	TINGGI
183	BNNP MALUKU UTARA	91,696	SANGAT TINGGI
184	BNN KABUPATEN PULAU MOROTAI	75,357	RENDAH
185	BNN KOTA TIDORE KEPULAUAN	75,179	RENDAH
186	BNN KABUPATEN HALMAHERA UTARA	69,732	RENDAH
187	BNNP BALI	91,250	SANGAT TINGGI
188	BNN KOTA DENPASAR	64,821	SANGAT RENDAH
189	BNN KABUPATEN BADUNG	89,196	SANGAT TINGGI
190	BNN KABUPATEN GIANYAR	89,643	SANGAT TINGGI
191	BNN KABUPATEN BULELENG	83,036	TINGGI
192	BNN KABUPATEN KLUNGKUNG	87,589	TINGGI
193	BNN KABUPATEN KARANGASEM	89,375	SANGAT TINGGI
194	BNNP NUSA TENGGARA TIMUR	85,893	TINGGI
195	BNN KABUPATEN BELU	75,804	RENDAH
196	BNN KOTA KUPANG	74,911	RENDAH
197	BNN KABUPATEN ROTE NDAO	78,482	TINGGI
198	BNNP GORONTALO	82,768	TINGGI
199	BNN KABUPATEN BOALEMO	80,804	TINGGI
200	BNN KOTA GORONTALO	93,125	SANGAT TINGGI
201	BNN KABUPATEN BONE BOLANGO	88,304	TINGGI
202	BNN KABUPATEN GORONTALO	81,250	TINGGI
203	BNN KABUPATEN GORONTALO UTARA	84,911	TINGGI
204	BNNP PAPUA	69,464	RENDAH
205	BNN KABUPATEN MIMIKA	78,929	TINGGI

LAMPIRAN

SURAT KEPALA BNN

NOMOR : B/4072/XII/DE/PC.01.03/2022/BNN

TANGGAL : 7 DESEMBER 2022

NO	SATUAN KERJA	NILAI DEKTARA	KATEGORI
206	BNN KABUPATEN JAYAPURA	82,679	TINGGI
207	BNNP PAPUA BARAT	93,839	SANGAT TINGGI
NILAI DEKTARA TAHUN 2022		84,274	TINGGI

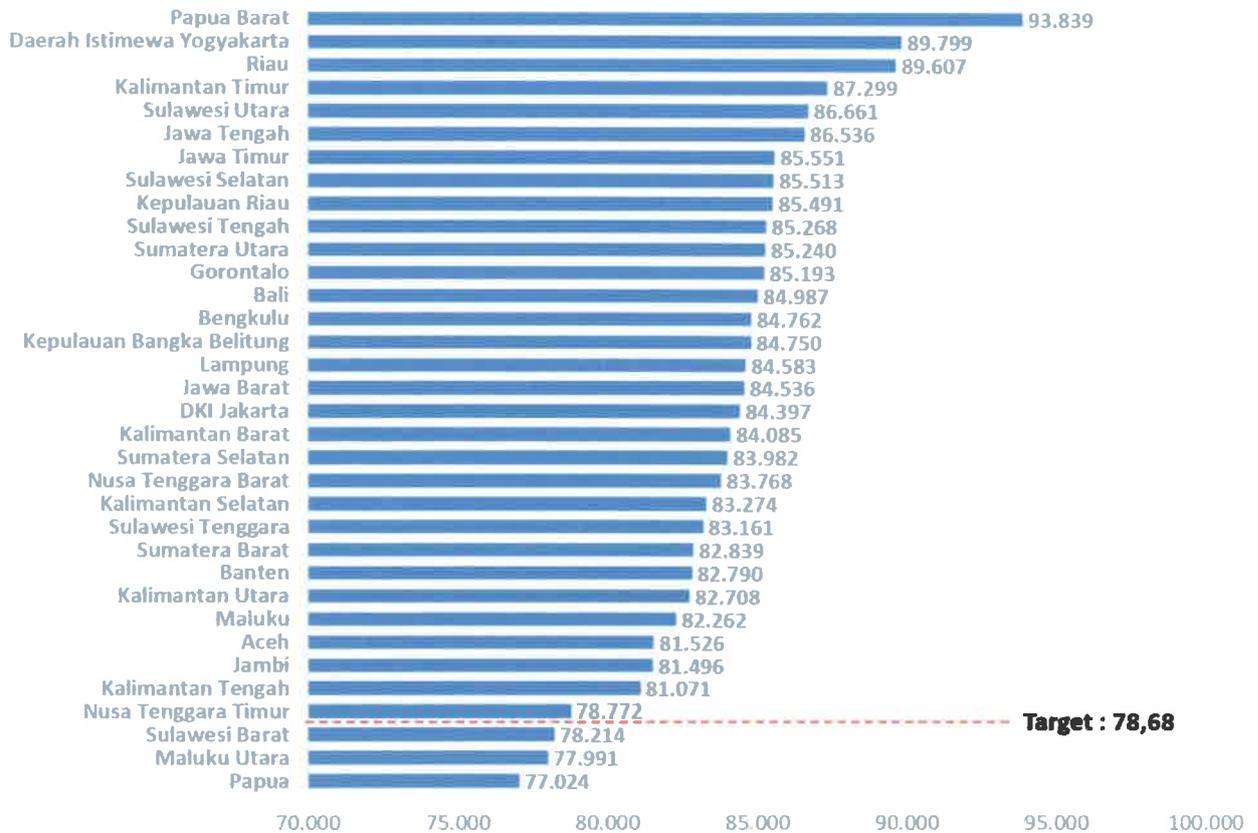
LAMPIRAN

SURAT KEPALA BNN

NOMOR : B/4072/XII/DE/PC.01.03/2022/BNN

TANGGAL : 7 DESEMBER 2022

**GRAFIK HASIL PENGHITUNGAN INDEKS KETAHANAN KELUARGA
TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOBA (DEKTARA) TAHUN 2022**



a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional
Deputi Pencegahan



Drs. Richard M. Nainggolan, S.H., M.M., MBA.

**HASIL PENGUKURAN INDEKS KEMANDIRIAN PARTISIPATIF
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BNN KABUPATEN GRESIK TAHUN 2022**

NO	VARIABEL	MUTU	PERTANYAAN		BOBOT	BAKESBANGPOL	TP PKK KAB. GRESIK	DINAS PENDIDIKAN KAB. GRESIK	PT. KIG
						PEMERINTAH	MASYARAKAT	PENDIDIKAN	SWASTA
1	MANUSIA		1		10	10	10	10	10
			2		10	10	10	10	10
2	METODE		1		5	5	5	5	0
			2		5	5	5	5	0
3	ANGGARAN		1		20	20	20	20	0
4	SISTEM		1		4	4	4	4	4
			2		4	4	0	4	4
			3		4	4	4	4	4
			4		4	4	0	4	4
			5		4	4	4	4	4
5	SARPRAS		1		4	4	0	0	4
			2		2	2	2	0	0
			3		1	1	0	0	3
			4		3	3	0	3	3
6	KEGIATAN		1		2	2	0	2	2
			2		1	1	1	1	1
			3		1	1	1	1	1
			4		1	1	1	1	1
			5		3	3	3	3	3
			6		3	3	0	0	3
			7		2	2	2	0	0
			8		2	2	2	2	2
			9		2	2	2	2	2
			10		2	2	2	2	0
			11		1	1	1	1	0
JUMLAH						100	79	88	65
						25	25	25	25
HASIL IKP						4	3.16	3.52	2.6
						Sangat Mandiri	Sangat Mandiri	Mandiri	Sangat Mandiri

IKP BNNK GRESIK

3.32 SANGAT MANDIRI

DATA DUKUNG KEGIATAN P4GN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN GRESIK DENGAN BNN KABUPATEN GRESIK

1. Sosialisasi P4GN dan Forum Group Discussion (FGD)

Implementasi Perda Gresik 11 Tahun 2020 di Ruang Mandhala Bakti Praja oleh Bakesbangpol Kab. Gresik

TANGGAL PELAKSANAAN

08 September 2022

TEMPAT PELAKSANAAN

Ruang Mandala Bhakti Praja Pemkab. Gresik

SASARAN KEGIATAN

Camat Sekabupaten Gresik dan Ormas

URAIAN KEGIATAN

Pelaksanaan perda membutuhkan peraturan bupati sebagai pelaksanaannya, perda harusnya sudah ditindaklanjuti dengan munculnya perbup pada akhir 2022. Akan dirumuskan oleh DPRD Kabupaten Gresik terkait pembentukan satgas dimasing-masing OPD serta DPRD akan memanggil bagian hukum untuk membahas terkait Peraturan bupati terkait pencegahan dan penanganan narkoba. diharapkan peserta membentuk satgas P4GN di Masing-masing satker/Dinas sebagai amanat Instruksi Presiden nomor 02 tahun 2022. Dibentuk tim terpadu sebagai amanat dari Permendagri No. 12 tahun 2019. Peraturan Bupati terkait tindak lanjut dari Perda 11 tahun 2022



DATA DUKUNG KEGIATAN P4GN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN GRESIK DENGAN BNN KABUPATEN GRESIK

2. Dukungan dalam rangka Pengumpulan Data Kota/Kabupaten Tanggap Ancaman Narkoba

TANGGAL PELAKSANAAN

21 November 2022

TEMPAT PELAKSANAAN

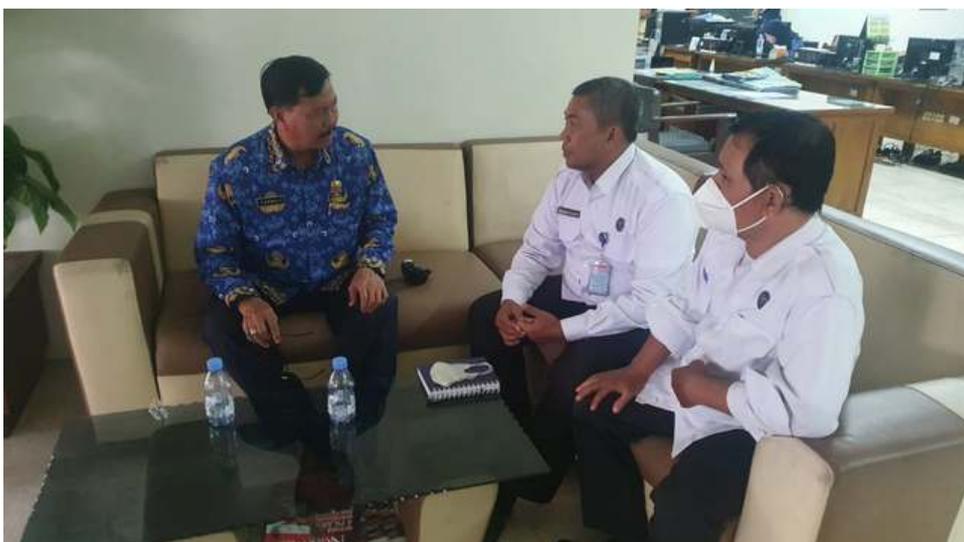
Bakesbanpol. Gresik

SASARAN KEGIATAN

Seluruh Pegawai Bakesbangpol Gresik

URAIAN KEGIATAN

Bakesbangpol Kab. Gresik mendukung BNN dalam Pengumpulan Data Ikotan



Instansi/Lembaga yang turut berpartisipasi dalam Program Pemberdayaan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah

Nama/Instansi/Lembaga : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik
(Karmaji : 082264216789)

NO	VARIABEL	MUTU	PERTANYAAN	BOBOT	NILAI
1	MANUSIA		1	10	10
			2	10	10
2	METODE		1	5	5
			2	5	5
3	ANGGARAN		1	20	20
4	SISTEM		1	4	4
			2	4	4
			3	4	4
			4	4	4
			5	4	0
5	SARPRAS		1	4	0
			2	2	0
			3	1	0
			4	3	3
6	KEGIATAN		1	2	2
			2	1	1
			3	1	1
			4	1	1
			5	3	3
			6	3	3
			7	2	2
			8	2	0
			9	2	0
			10	2	0
			11	1	1
JUMLAH					83
					25
HASIL IKP					3,32
					Sangat Mandiri

NB :

Bakesbangpol Kabupaten Gresik Selaku Leading Sector RAN P4GN Kabupaten Gresik Yang Sedang Proses Penerbitan Peraturan Bupati Dari 2022 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Penanggulangan Narkotika Dan Prekursor Narkotika

DATA DUKUNG KEGIATAN P4GN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GRESIK DENGAN BNN KABUPATEN GRESIK

1. DIKELUARKAN SURAT EDARAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GRESIK TERKAIT SOSIALISASI P4GN MELALUI MENGGELORAKAN LAGU MARS BNN DITINGKAT SD DAN SMP DIBAWAH DINAS PENDIDIKAN KAB. GRESIK

TANGGAL PELAKSANAAN

08 Agustus 2022

TEMPAT PELAKSANAAN

Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik

SASARAN KEGIATAN

Seluruh SD dan SMP dibawah Naungan Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik

URAIAN KEGIATAN

Koordinasi dalam rangka pelaksanaan Sosialisasi P4GN melalui lagu Mars BNN ditingkat SD dan SMP Sekabupaten Gresik, dimana lagu Mars BNN dinyanyikan oleh seluruh siswa usai Sosialisasi P4GN maupun pada saat Upacara Bendera Hari Senin Usahi menyanyikan lagu indonesia raya dan mengheningkan Cipta. guna menanamkan dalam diri peserta didik agar slalu ingat bahaya narkoba dan menumbuhkan karakter ketahanan diri yang kuat. terlapor di aplikasi MMS BNN



DATA DUKUNG KEGIATAN P4GN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GRESIK DENGAN BNN KABUPATEN GRESIK

2. Pemantauan Pelaksanaan Menggelorakan Lagu Mars BNN di tingkat SD dan SMP oleh Kasi Kurikulum SD dan Kasi Kurikulum SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik

TANGGAL PELAKSANAAN

01 November 2022

TEMPAT PELAKSANAAN

Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik

SASARAN KEGIATAN

Seluruh Siswa SD dan SMP SeKabupaten Gresik

URAIAN KEGIATAN

Dinas Pendidikan Kab. Gresik mendukung BNN dalam pelaksanaan implementasi P4GN melalui sosialisasi P4GN dengan lagu Mars BNN



DATA DUKUNG KEGIATAN P4GN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GRESIK DENGAN BNN KABUPATEN GRESIK

3. Dukungan dalam rangka Pengumpulan Data Kota/Kabupaten Tanggap Ancaman Narkoba

TANGGAL PELAKSANAAN

22 November 2022

TEMPAT PELAKSANAAN

Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik

SASARAN KEGIATAN

Seluruh Pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik

URAIAN KEGIATAN

Dinas Pendidikan Kab. Gresik mendukung BNN dalam Pengumpulan Data Ikotan



DATA DUKUNG KEGIATAN P4GN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GRESIK DENGAN BNN KABUPATEN GRESIK

4. Sarasehan bersama ormas pendidikan oleh Dewan Pendidikan Kabupaten Gresik

TANGGAL PELAKSANAAN

06 Desember 2022

TEMPAT PELAKSANAAN

Aula Masjid Agung Gresik

SASARAN KEGIATAN

Seluruh Ormas Pendidikan Di Kabupaten Gresik

URAIAN KEGIATAN

Kegiatan dilaksanakan oleh Dewan Pendidikan Kabupaten Gresik bekerjasama dengan Gannas Annar MUI Gresik, Sarasehan Ormas Pendidikan yang bertemakan Peran Ormas Pendidikan dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, dihadiri oleh 100 Orang dari Ormas Pendidikan yang ada di kabupaten Gresik.



Instansi/Lembaga yang turut berpartisipasi dalam Program Pemberdayaan Masyarakat di Lingkungan Pendidikan

Nama/Instansi/Lembaga : Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik
(Sholikh 081336673395)

NO	VARIABEL	MUTU	PERTANYAAN	BOBOT	NILAI
1	MANUSIA		1	10	10
			2	10	10
2	METODE		1	5	5
			2	5	5
3	ANGGARAN		1	20	20
4	SISTEM		1	4	4
			2	4	4
			3	4	4
			4	4	4
			5	4	4
5	SARPRAS		1	4	0
			2	2	0
			3	1	0
			4	3	3
6	KEGIATAN		1	2	2
			2	1	1
			3	1	1
			4	1	1
			5	3	3
			6	3	1
			7	2	0
			8	2	0
			9	2	0
			10	2	0
			11	1	1
JUMLAH					83
					25
HASIL IKP					3,32
					Sangat Mandiri

NB :

Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik sangat mendukung RAN P4GN salah satunya dengan mengeluarkan Surat Edaran untuk Kepala Sekolah SD dan SMP dalam menggelorakan lagu Mars BNN dan pelaksanaan Sosialisasi di lingkungan Pendidikan.



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Arif Rahman Hakim No. 2 Gresik, Telp (031) 3981315
Website : dispendik.gresikkab.go.id Email : dispendik@gresikkab.go.id
GRESIK 61111

Gresik, 18 Oktober 2022

Kepada Yth :

Nomor : 420/4925/437.53/2022
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Pemberitahuan**

1. Kepala UPT SD / SMP Negeri
2. Kepala SD / SMP Swasta
Se – Kabupaten Gresik

Di

Gresik

Menindaklanjuti surat dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kabupaten Gresik Nomor: B/322/X/Ka/PC.01.03/2022/BNNK, tanggal 5 Oktober 2022 perihal : Implementasi Mars BNN pada SD dan SMP Kab. Gresik.

Serta Rujukan :

- a. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- c. Instruksi Presiden Nomor 02 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024
- d. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 11 Tahun 2020 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- f. MoU BNN RI dan Kemendikbud RI Bomor NK/51/VII/2012/BNN tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Melalui Pendidikan dan Kebudayaan.

Sehubungan dengan rujukan tersebut, salah satu bentuk strategi diri dan membentuk karakter Ketahanan diri terhadap ancaman bahaya narkoba sejak dini, maka bersama surat ini diharap untuk **menyanyikan Lagu Mars BNN RI setelah Lagu Indonesia Raya pada saat Upacara Bendera** di sekolah saudara.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Gresik



S. HARIYANTO, S.Pd. MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19720422 199802 1 001



**KABUPATEN
GRESIK**

**KONSEPSI
IMPLEMENTASI LAGU MARS BNN PADA TINGKAT SD DAN SMP
DI WILAYAH KABUPATEN GRESIK
TAHUN 2022**



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL
KABUPATEN GRESIK**

I. LATAR BELAKANG

Badan Narkotika Nasional (BNN) merupakan lembaga pemerintahan Kementerian yang berkedudukan di bawah presiden dan bertanggung jawab kepada presiden yang mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkotika serta prekursor narkotika. Dengan tugas pokok dan fungsi sebagai Pelaksana kebijakan teknis P4GN di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat dan rehabilitasi, Pelaksanaan kebijakan teknis P4GN di bidang pemberantasan dalam rangka pemetaan jaringan kejahatan terorganisasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol dalam wilayah Kabupaten Gresik serta Pelaksanaan kerjasama dengan instansi terkait.

BNN Kabupaten Gresik Menjalankan visi misi BNN Republik Indonesia Restra 2022 – 2024 tentang mandat Presiden Republik Indonesia yakni terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong royong serta terwujudnya masyarakat yang terlindungi dan terselamatkan dari kejahatan narkotika.

Selain itu BNN membentuk Relawan, Penggiat dan Satgas Anti Narkoba yang merupakan Sinergi dan kolaborasi BNN dengan Stakeholder terkait dalam upaya P4GN. Dengan menggelorakan lagu Mars BNN sebagai cikal bakal implementasi *War On Drugs* sebagai pembentukan karakter ketahanan diri remaja.

Banyaknya permasalahan yang mungkin timbul dari penyalahgunaan narkoba dikalangan pendidikan dan masyarakat tentu saja menimbulkan kekhawatiran dan pertanyaan bagaimana mengatasi hal ini atau setidaknya dapat menekan laju prevalensinya, hal ini menimbulkan kekhawatiran dan perlu perhatian yang lebih serius. Oleh karena itu, Permasalahan narkoba menjadi masalah semua sector, tidak hanya BNN dan Kepolisian.

Permasalahan Narkoba sudah menyasar kepada semua tingkat pendidikan di SD dan SMP. Angka dinamis terhadap penyalahgunaan narkotika yang terjadi terutama pada lingkungan pendidikan.

Ketahanan diri remaja yang lemah seringkali menjadi salah satu sebab remaja menyalahgunakan narkoba. Sehingga perlu adanya peningkatan karakter remaja agar memiliki ketahanan diri remaja anti narkoba melalui menghayati lagu mars BNN serta mampu untuk menggelorakan yang diawali dengan menjadikan sebagai lagu wajib yang

dinyanyikan pada saat apel atau upacara sekolah setelah menyanyikan lagu Indonesia raya.

II. TAHAPAN PELAKSANAAN

1. Jangka Pendek (1 – 3 Bulan)
Masa pengenalan dan kampanye lagu Mars BNN RI
2. Jangka Menengah (4 – 6 Bulan)
Masa Monitoring dan Evaluasi
3. Jangka Panjang
Direkomendasikan menjadi lagu wajib (MARS BNN) di lingkungan pendidikan SD dan SMP

III. PERAN *STAKEHOLDER*

1. Partisipasi pemerintah dan seluruh komponen masyarakat dalam menangani permasalahan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap narkotika telah di instruksikan oleh Presiden RI dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden RI Nomor 02 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika telah menginstruksikan kepada seluruh kepala daerah dari tingkat atas sampai bawah sehingga pemerintah dapat berpartisipasi aktif untuk melakukan upaya P4GN sesuai dengan peran tugasnya masing-masing.
3. Kerjasama dalam menangani perkara narkoba diharapkan ada persamaan persepsi agar tepat dan efisien.

IV. SASARAN ALTERNATIF SOLUSI

Pada implementasi ini, perlu adanya persamaan persepsi agar tepat dan efisien.

V. PELAKSANAAN EVALUASI

Berkaitan dengan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan menggelorakan lagu Mars BNN pada sekolah-sekolah di Wilayah Kabupaten Gresik perlu dilaksanakan peninjauan dan monitoring yang komprehensif dengan harapan hasil yang diperoleh dapat maksimal serta siswa dapat menghayati dan hafal lagu Mars BNN RI serta mampu mengimplementasikan makna yang terkandung dalam Mars BNN.

VI. PENGUMUMAN (*REWARD DAN PUNISHMENT*)

Dikoordinasikan dengan Instansi atau Stakeholder terkait untuk adanya *Reward* dan *Punishment*

DATA DUKUNG KEGIATAN P4GN PT. KIG GRESIK DENGAN BNN KABUPATEN GRESIK

1. Dukungan dalam rangka Pengumpulan Data Kota/Kabupaten Tanggap Ancaman Narkoba

TANGGAL PELAKSANAAN

23 November 2022

TEMPAT PELAKSANAAN

PT. KIG

SASARAN KEGIATAN

Seluruh Pegawai PT. KIG

URAIAN KEGIATAN

PT. KIG mendukung BNN dalam Pengumpulan Data Ikotan



Instansi/Lembaga yang turut berpartisipasi dalam Program Pemberdayaan Masyarakat di Lingkungan Swasta dan Dunia Usaha

Nama/Instansi/Lembaga : PT. Kawasan Industri Gresik
(Achmad Muis 085645499424)

NO	VARIABEL	MUTU	PERTANYAAN	BOBOT	NILAI
1	MANUSIA		1	10	10
			2	10	10
2	METODE		1	5	5
			2	5	5
3	ANGGARAN		1	20	20
4	SISTEM		1	4	4
			2	4	0
			3	4	4
			4	4	0
			5	4	4
5	SARPRAS		1	4	0
			2	2	2
			3	1	0
			4	3	3
6	KEGIATAN		1	2	0
			2	1	1
			3	1	1
			4	1	1
			5	3	3
			6	3	0
			7	2	2
			8	2	2
			9	2	2
			10	2	2
			11	1	0
JUMLAH					81
					25
HASIL IKP					3,24
					Mandiri

NB :

Telah terlaksana Bimbingan Teknis Penggiat P4GN yang diikuti oleh PT. KIG dan terbentuk 10 Penggiat P4GN dari lingkungan PT. KIG

DATA DUKUNG KEGIATAN P4GN TP PKK KABUPATEN GRESIK DENGAN BNN KABUPATEN GRESIK

1. PENANDATANGANAN MOU DAN BIMBINGAN TEKNIS P4GN TP PKK KABUPATEN GRESIK

TANGGAL PELAKSANAAN

24 - 25 Maret 2022

TEMPAT PELAKSANAAN

HOTEL HORIZON GKB GRESIK

SASARAN KEGIATAN

TP PKK SE-KABUPATEN GRESIK

URAIAN KEGIATAN

Terbentuknya komitmen bersama bahwa pencegahan penyalahgunaan narkoba adalah masalah bersama dan harus disikapi secara bersama, dan terbentuk penggiat anti narkoba di lingkungan masyarakat sebanyak 20 orang. Dan terlaksananya penandatanganan MoU Antara Ketua TP PKK Kabupaten Gresik, TP PKK 3 Desa Bersinar tahun 2022 dalam implementasi P4GN



DATA DUKUNG KEGIATAN P4GN TP PKK KABUPATEN GRESIK DENGAN BNN KABUPATEN GRESIK

2. TP PKK DESA DOMAS MENJADI NARASUMBER INTERVENSI
PELAKSANAAN PROGRAM KETAHANAN KELUARGA ANTI NARKOBA

TANGGAL PELAKSANAAN

28 Juli 2022

TEMPAT PELAKSANAAN

Cafe Wargul Hulaan Menganti

SASARAN KEGIATAN

20 Orang yang terdiri dari 10 Orang Tua dan 10 Anak

URAIAN KEGIATAN

Ketua TP PKK Desa domas Menjadi Narasumber terkait Nilai-Nilai Positif Keluarga



DATA DUKUNG KEGIATAN P4GN TP PKK KABUPATEN GRESIK DENGAN BNN KABUPATEN GRESIK

3. KETUA POKJA 1 TP PKK KABUPATEN GRESIK MENJADI NARASUMBER INTERVENSI PELAKSANAAN PROGRAM KETAHANAN KELUARGA ANTI NARKOBA

TANGGAL PELAKSANAAN

03 Agustus 2022

TEMPAT PELAKSANAAN

Cafe Wargul Hulaan Menganti

SASARAN KEGIATAN

20 Orang yang terdiri dari 10 Orang Tua dan 10 Anak

URAIAN KEGIATAN

Ketua TP PKK Desa domas Menjadi Narasumber terkait Nilai-nilai dalam keluarga dan Komunikasi Efektif



DATA DUKUNG KEGIATAN P4GN TP PKK KABUPATEN GRESIK DENGAN BNN KABUPATEN GRESIK

4. Dukungan dalam rangka Pengumpulan Data Kota/Kabupaten Tanggap Ancaman Narkoba

TANGGAL PELAKSANAAN

24 November 2022

TEMPAT PELAKSANAAN

Kantor TP PKK Kabupaten Gresik

SASARAN KEGIATAN

Seluruh Anggota tP PKK Kabupaten Gresik

URAIAN KEGIATAN

TP PKK Kab. Gresik mendukung BNN dalam Pengumpulan Data Ikotan



Instansi/Lembaga yang turut berpartisipasi dalam Program Pemberdayaan Masyarakat di Lingkungan Masyarakat

Nama/Instansi/Lembaga : TP PKK Kabupaten Gresik
(Ny. Hajar Idris : 085645334466)

NO	VARIABEL	MUTU	PERTANYAAN	BOBOT	NILAI
1	MANUSIA		1	10	10
			2	10	10
2	METODE		1	5	5
			2	5	5
3	ANGGARAN		1	20	20
4	SISTEM		1	4	4
			2	4	0
			3	4	4
			4	4	0
			5	4	4
5	SARPRAS		1	4	0
			2	2	2
			3	1	0
			4	3	3
6	KEGIATAN		1	2	0
			2	1	1
			3	1	1
			4	1	1
			5	3	3
			6	3	0
			7	2	2
			8	2	2
			9	2	2
			10	2	2
			11	1	1
JUMLAH					82
					25
HASIL IKP					3,28
					Sangat Mandiri

NB :

Telah terlaksana adanya MoU antara Ketua TP PKK Kabupaten Gresik, Ketua TP PKK 3 Desa bersinar tahun 2022 (domas, menganti, hulaan) dengan BNN Kabupaten Gresik. Dan PKK memiliki program TISAGALUH Dalam upaya P4GN.

DATA INDEKS KEPUASAN LAYANAN KLINIK REHABILITASI
BNN KABUPATEN GRESIK
TAHUN 2022

Jawa Timur	3,615	3,429	3,522
BNN Kota Mojokerto	3,985	4,000	3,991
BNN Kota Batu	3,737	3,900	3,764
BNNP Jawa Timur	3,945	3,463	3,707
BNN Kabupaten Kediri	3,275	3,281	3,687
BNN Kabupaten Sidoarjo	3,600	3,596	3,597
BNN Kabupaten Tulungagung	3,525	-	3,561
BNN Kabupaten Trenggalek	3,236	3,375	3,500
BNN Kabupaten Blitar	3,444	3,700	3,472
BNN Kabupaten Malang	3,313	3,538	3,425
BNN Kabupaten Nganjuk	3,390	3,425	3,409
BNN Kabupaten Tuban	3,381	3,475	3,403
BNN Kota Malang	3,388	3,269	3,328
BNN Kota Surabaya	3,673	3,717	3,322
BNN Kabupaten Lumajang	3,946	3,483	3,275
BNN Kota Kediri	3,097	3,291	3,168
BNN Kabupaten Gresik	3,013	3,161	3,115
BNN Kabupaten Sumenep	3,010	3,115	3,098
BNN Kab Pasuruan	-	-	-



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)**

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur

Telepon : (62-21) 80871566, 80871567

Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593

e-mail : info@bnn.go.id website : www.bnn.go.id

Nomor : B/ 4333 /XII/DE/RH.03/2022/BNN Jakarta, 26 Desember 2022
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Pemberitahuan Hasil Monitoring IBM
Bulan November-Desember 2022

Kepada

Yth. **1. Kepala BNN Provinsi seluruh Indonesia**
2. Kepala BNN Kota/ Kabupaten seluruh Indonesia

di

Tempat

1. Rujukan:

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- c. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
- d. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi Berkelanjutan;
- e. Surat Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor: KEP/234/III/DE/RH.03/2022/BNN tanggal 1 Maret 2022 tentang Penetapan Unit Intervensi Berbasis Masyarakat di Lingkungan BNN Provinsi/ Kabupaten/ Kota TA. 2022;
- f. Surat Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor: KEP/260/III/DE/RH.03/2022/BNN tanggal 14 Maret 2022 tentang Penetapan Unit Intervensi Berbasis Masyarakat di Lingkungan BNN Provinsi/ Kabupaten/ Kota Tahap Kedua TA. 2022;
- g. Surat Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor: KEP/407/IV/DE/RH.03/2022/BNN tanggal 28 April 2022 tentang Penetapan Unit Intervensi Berbasis Masyarakat di Lingkungan BNN Provinsi/ Kabupaten/ Kota Tahap Ketiga TA. 2022;
- h. Program Kerja Deputi Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Tahun Anggaran 2022.

/2. Sehubungan

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada Kepala bahwa Direktorat Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat (Dit. PLRKM) Deputi Bidang Rehabilitasi BNN telah melakukan monitoring pelaksanaan program IBM pada bulan November s.d. Desember 2022. Tujuan kegiatan ini adalah memperoleh data & informasi capaian kinerja unit IBM serta tantangannya untuk menentukan kebijakan program di tahun anggaran selanjutnya.
3. Hasil monitoring program IBM sebagai berikut (data terlampir):

a. Fase perkembangan unit IBM

Merupakan capaian fase perkembangan unit IBM berdasarkan hasil diskusi dengan petugas BNNP/K/Kota tentang pelaksanaan kegiatan, layanan dan tata kelola IBM. Monitoring dilakukan kepada 307 unit IBM yang tersebar di 34 provinsi dan 173 kabupaten/kota. Capaiannya sebagai berikut:

- Sebanyak 23 unit (7,49%) memenuhi fase Rintisan
- Sebanyak 44 unit (14,33%) memenuhi fase Tumbuh
- Sebanyak 101 unit (32,90%) memenuhi fase Berkembang
- Sebanyak 90 unit (29,32%) memenuhi fase Tangguh
- Sebanyak 25 unit (8,14%) memenuhi fase Prima
- Sebanyak 24 unit (7,82%) belum memenuhi indikator fase perkembangan, sehingga berada dalam kategori Pra Fase.

Berdasarkan capaian fase perkembangan, unit IBM yang telah operasional adalah 260 unit (84,69%). Unit IBM disebut operasional setelah memenuhi indikator minimal fase Tumbuh, karena seluruh subkomponen Tata Kelola terpenuhi, telah mampu melakukan seluruh kegiatan IBM (sosialisasi, pemetaan dan penjangkauan), serta menjangkau klien untuk dilakukan skrining menggunakan formulir DAST-10 (*Drug Abuse Screening Test*) untuk diberikan layanan intervensi hingga bina lanjut.

b. Gambaran kegiatan & profil klien IBM

Merupakan penjabaran hasil kegiatan yang dilakukan oleh Agen Pemulihan dengan pendampingan petugas BNNP & BNNK/Kota juga profil klien yang dilayani pada tahun 2022, berdasarkan data yang diperoleh dari monitoring program IBM pada awal bulan Desember 2022. Gambarannya sebagai berikut:

- Kegiatan sosialisasi IBM dilakukan sebanyak 1.398 kali dengan metode formal, informal, serta menggunakan media sosial dengan jumlah penerima sosialisasi 24.385 orang. Kegiatan ini bertujuan memberikan informasi tentang program IBM kepada masyarakat dan pemangku kepentingan di desa/kelurahan.

/- Kegiatan

- Kegiatan pemetaan dilakukan sebanyak 822 kali dengan jumlah 944 RW dan 1.868 RT, dan perkiraan jumlah penyalah guna narkoba sebanyak 5.085 orang. Kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh informasi dan gambaran terkait penyalahgunaan narkoba di wilayah desa/kelurahan.
- Kegiatan penjangkauan dilakukan sebanyak 2.530 kali, dan yang berhasil masuk dalam kegiatan IBM sebanyak 2.331 orang. Kegiatan ini bertujuan untuk mendekati penyalah guna narkoba dan keluarga/ orang terdekatnya agar mengikuti layanan di IBM.
- Jumlah klien IBM yang mengikuti layanan pada tahun 2022 sebanyak 2.331 orang dengan profil berikut:
 - Mayoritas klien (41,39%) berada dalam kelompok usia 17-25 tahun
 - Pendidikan terakhir klien mayoritas adalah SMA/ sederajat (55,10%)
 - Pekerjaan klien pada saat mengikuti layanan IBM mayoritas adalah pelajar/ mahasiswa (24,92%)
 - Jenis zat utama yang disalahgunakan adalah amphetamine/ methamphetamine (30,74%), diikuti dengan sedatif (9,45%) dan kanabis (7,49%). Sebagian besar klien (29,61%) juga mengonsumsi alkohol secara berlebihan.
 - Mayoritas klien mulai pertama kali menyalahgunakan narkoba pada usia 17-25 tahun, dengan jenis zat amphetamine/methamphetamine, diikuti dengan sedatif dan jenis zat lainnya (tramadol, ehabon, inhalan, trihex, dextrro, carnophen, kratom, PCC, termasuk rokok), juga alkohol.

c. Hasil pemantauan program IBM terhadap lingkungan & masyarakat

Merupakan hasil survey menggunakan skala *likert* kepada masyarakat di wilayah desa/ kelurahan lokasi IBM untuk mengetahui dampak kegiatan IBM bagi lingkungan dan masyarakat. Jumlah responden yang mengisi kuesioner sebanyak 690 orang, mayoritas berada dalam kelompok usia 26-35 dan 36-45 tahun serta merupakan warga di lingkungan desa/kelurahan lokasi IBM. Berdasarkan data yang terkumpul diketahui bahwa mayoritas responden (87,83%) mengetahui tentang keberadaan IBM. Selain itu, pertanyaan 1-6 dalam survey memperoleh skor 3 dari 4, artinya IBM memberikan dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat di wilayah desa/kelurahan dalam hal penanganan penyalah guna narkoba.

/d. Hasil

d. Hasil identifikasi masalah & rekomendasi

Merupakan tantangan dalam implementasi program IBM serta hal-hal yang perlu ditindaklanjuti dan diantisipasi untuk mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan & layanan IBM di wilayah pada tahun 2023. Hasil identifikasi dikategorikan menjadi 5 kategori, yaitu:

- Sumber Daya Manusia/ SDM (*man*), baik AP maupun petugas BNNP/K/Kota
- Anggaran (*money*)
- Materi/ konten layanan yang diberikan (*material*)
- Peralatan/ perlengkapan kegiatan & layanan (*machine*)
- Metode pelaksanaan kegiatan (*method*)

4. Berdasarkan butir tiga di atas, bersama ini kami sampaikan apresiasi kepada bidang/ seksi Rehabilitasi di BNNP dan BNNK/Kota atas implementasi program IBM tahun 2022. Diharapkan kinerja pada tahun 2022 dalam membina dan mendampingi tim Agen Pemulihan (AP) dapat ditingkatkan, sehingga tujuan IBM yakni peningkatan akses layanan rehabilitasi hingga ke tingkat desa/ kelurahan dapat diwujudkan.
5. Demikian untuk menjadi maklum.

**a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional
Deputi Rehabilitasi**

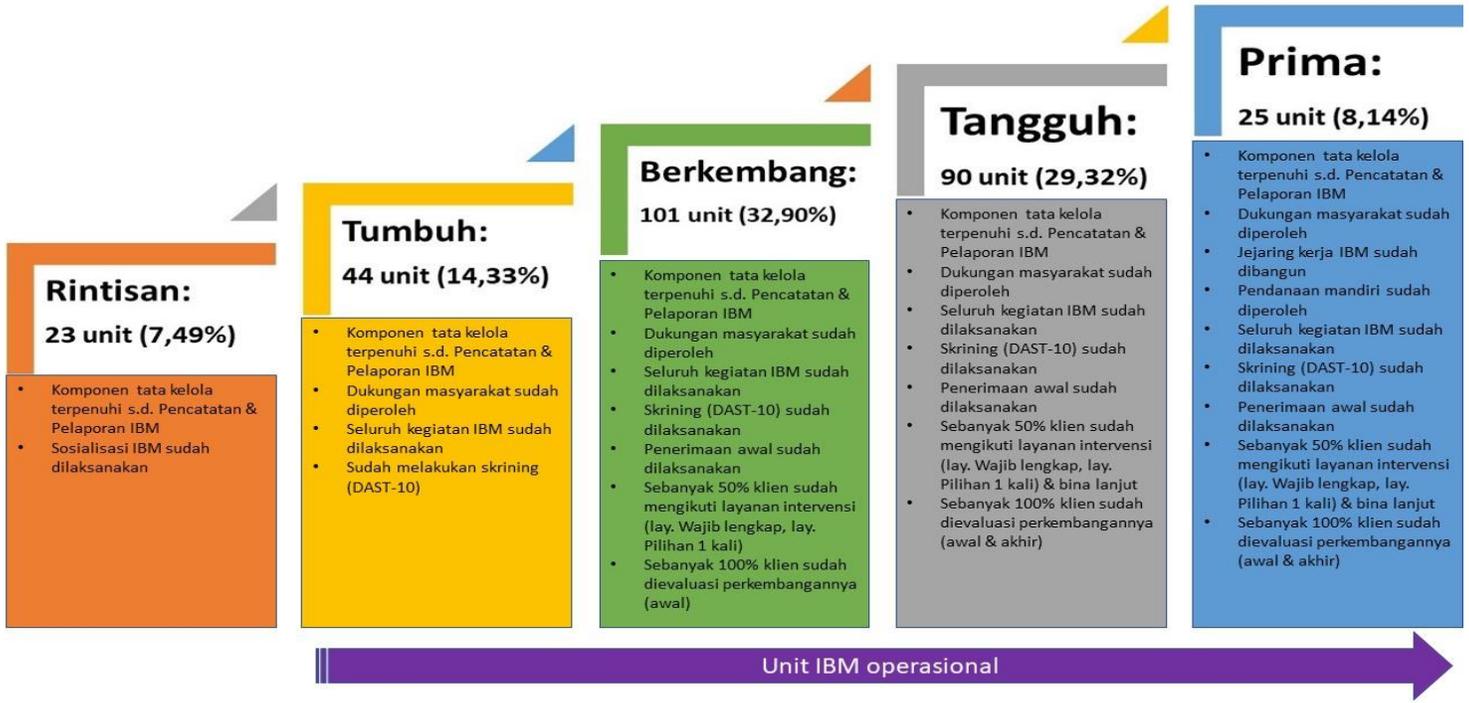


Dra. Riza Sarasvita, M.Si, MHS, Ph.D

Tembusan :

1. Kepala BNN
2. Sekretaris Utama BNN
3. Inspektur Utama BNN

**FASE PERKEMBANGAN UNIT IBM BINAAN BNNP & BNNK/ KOTA
TAHUN ANGGARAN 2022**



No	Provinsi	BNNP/K/Kota	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kota/Kab
Prima					
1	Sumatera Utara	BNN Kab. Mandailing Natal	Desa Huraba I	Kec. Siabu	Kab. Mandailing Natal
2	Sumatera Selatan	BNN Kab. Ogan Ilir	Desa Tanjung Pinang II	Kec. Tanjung Batu	Kab. Ogan Ilir
3	Kep. Bangka Belitung	BNN Kota Pangkalpinang	Desa Air Mesu Timur	Kec. Pangkalan Baru	Kab. Bangka Tengah
4	Kep. Bangka Belitung	BNN Kab. Bangka	Desa Pemali	Kec. Pemali	Kab. Bangka
5	Jawa Barat	BNNP Jawa Barat	Desa Cileunyi Wetan	Kec. Cileunyi	Kab. Bandung
6	Jawa Barat	BNN Kab. Bogor	Desa Gunung Putri	Kec. Gunung Putri	Kab. Bogor
7	Jawa Barat	BNN Kota Cirebon	Kel. Pulasaren	Kec. Pekalipan	Kota Cirebon
8	Jawa Tengah	BNNP Jawa Tengah	Kel. Tawangsari	Kec. Semarang Barat	Kota Semarang
9	Jawa Tengah	BNN Kota Surakarta	Kel. Joyotakan	Kec. Serengan	Kota Surakarta
10	Jawa Tengah	BNN Kab. Batang	Desa Kaliboyo	Kec. Tulis	Kab. Batang
11	Jawa Tengah	BNN Kab. Cilacap	Desa Bulupayung	Kec. Kesugihan	Kab. Cilacap
12	Jawa Tengah	BNN Kab. Cilacap	Desa Slarang	Kec. Kesugihan	Kab. Cilacap
13	DI Yogyakarta	BNNP DI Yogyakarta	Kalurahan Jatisarono	Kapanewon Nanggulan	Kab. Kulon Progo
14	Jawa Timur	BNNP Jawa Timur	Desa Alang - Alang	Kec. Tragah	Kab. Bangkalan
15	Jawa Timur	BNN Kota Mojokerto	Kel. Gunung Gedangan	Kec. Magersari	Kota Mojokerto
16	Jawa Timur	BNN Kab. Blitar	Desa Penataran	Kec. Nglegok	Kab. Blitar
17	Jawa Timur	BNN Kota Batu	Desa Pesanggrahan	Kec. Batu	Kota Batu
18	Jawa Timur	BNN Kota Batu	Desa Torongrejo	Kec. Junrejo	Kota Batu
19	Jawa Timur	BNN Kab. Tuban	Desa Bogorejo	Kec. Merakurak	Kab. Tuban
20	Jawa Timur	BNN Kab. Kediri	Desa Darungan	Kec. Pare	Kab. Kediri

No	Provinsi	BNNP/K/Kota	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kota/Kab
21	Kalimantan Barat	BNN Kab. Kubu Raya	Desa Sungai Raya	Kec. Sungai Raya	Kab. Kubu Raya
22	Kalimantan Barat	BNN Kab. Mempawah	Desa Anjungan Dalam	Kec. Anjungan	Kab. Mempawah
23	Kalimantan Tengah	BNN Kab. Kotawaringin Barat	Desa Pasir Panjang	Kec. Arut Selatan	Kab. Kotawaringin Barat
24	Sulawesi Tengah	BNN Kota Palu	Kel. Tatura Utara	Kec. Palu Selatan	Kota Palu
25	Bali	BNN Kab. Buleleng	Desa Bubunan	Kec. Seririt	Kab. Buleleng
Tangguh					
1	Aceh	BNN Kab. Bireuen	Gampong Kuala Jeumpa	Kec. Jeumpa	Kab. Bireuen
2	Aceh	BNN Kab. Bireuen	Gampong Mon Keulayu	Kec. Gandapura	Kab. Bireuen
3	Aceh	BNN Kab. Gayo Lues	Gampong Penosan	Kec. Blang Jerango	Kab. Gayo Lues
4	Sumatera Utara	BNNP Sumatera Utara	Kel. Asam Kumbang	Kec. Medan Selayang	Kota Medan
5	Sumatera Utara	BNN Kab. Karo	Kel. Gundaling I	Kec. Berastagi	Kab. Karo
6	Sumatera Utara	BNN Kota Binjai	Kel. Kebun Lada	Kec. Binjai Utara	Kota Binjai
7	Sumatera Utara	BNN Kota Tanjung Balai	Kel. Kapias Pulau Buaya	Kec. Teluk Nibung	Kota Tanjungbalai
8	Sumatera Utara	BNN Kota Gunung Sitoli	Desa Saewe	Kec. Gunungsitoli	Kota Gunungsitoli
9	Sumatera Utara	BNN Kab. Deli Serdang	Desa Rantau Panjang	Kec. Pantai Labu	Kab. Deli Serdang
10	Sumatera Utara	BNN Kota Pematangsiantar	Kec. Siantar Martoba	Kec. Siantar Martoba	Kota Pematangsiantar
11	Sumatera Utara	BNN Kab. Langkat	Desa Karang Rejo	Kec. Stabat	Kab. Langkat
12	Sumatera Utara	BNN Kab. Asahan	Desa Suka Damai Barat	Kec. Pulo Bandring	Kab. Asahan
13	Sumatera Utara	BNN Kab. Tapanuli Selatan	Desa Siamporik Dolok	Kec. Angkola Selatan	Kab. Tapanuli Selatan
14	Sumatera Utara	BNN Kab. Serdang Bedagai	Kec. Sei Bamban	Kec. Sei Bamban	Kab. Serdang Bedagai
15	Sumatera Barat	BNNP Sumatera Barat	Kel. Pagambiran Ampalu Nan XX	Kec. Lubuk Begalung	Kota Padang
16	Sumatera Barat	BNN Kota Payakumbuh	Kel. Koto Tengah	Kec. Payakumbuh Barat	Kota Payakumbuh
17	Riau	BNNP Riau	Desa Candi Rejo	Kec. Pasir Penyau	Kab. Indragiri Hulu
18	Riau	BNNP Riau	Desa Pandau Jaya	Kec. Siak Hulu	Kab. Kampar
19	Sumatera Selatan	BNN Kota Lubuk Linggau	Kel. Karya Bakti	Kec. Lubuklinggau Timur II	Kota Lubuklinggau
20	Sumatera Selatan	BNN Kab. Ogan Komering Ilir	Desa Talang Pangeran	Kec. Teluk Gelam	Kab. Ogan Komering Ilir
21	Sumatera selatan	BNN Kab. Ogan Komering Ulu Timur	Desa Negeri Ratu	Kec. Bunga Mayang	Kab. Ogan Komering Ulu Timur
22	Kep. Bangka Belitung	BNNP Kep. Bangka Belitung	Kel. Tanjung	Kec. Muntok	Kab. Bangka Barat
23	Kep. Bangka Belitung	BNN Kab. Belitung	Desa Air Merbau	Kec. Tanjung Pandan	Kab. Belitung
24	Kepulauan Riau	BNN Kota Batam	Kel. Tanjung Sengkuang	Kec. Batu Ampar	Kota Batam
25	Bengkulu	BNN Kab. Bengkulu Selatan	Desa Simpang Pino	Kec. Ulu Manna	Kab. Bengkulu Selatan
26	Bengkulu	BNN Kota Bengkulu	Kel. Pasar Baru	Kec. Teluk Segara	Kota Bengkulu
27	DKI Jakarta	BNNP DKI Jakarta	Kel. Kampung Rawa	Kec. Johar Baru	Kota Jakarta Pusat
28	DKI Jakarta	BNN Kota Jakarta Selatan	Kel. Cipete Utara	Kec. Kebayoran Baru	Kota Jakarta Selatan
29	DKI Jakarta	BNN Kota Jakarta Selatan	Kel. Pondok Labu	Kec. Cilandak	Kota Jakarta Selatan
30	DKI Jakarta	BNN Kota Jakarta Timur	Kel. Kebon Manggis	Kec. Matraman	Kota Jakarta Timur
31	DKI Jakarta	BNN Kota Jakarta Utara	Kel. Pademangan timur	Kec. Pademangan	Kota Jakarta Utara
32	Banten	BNNP Banten	Kel. Cipondoh	Kec. Cipondoh	Kota Tangerang
33	Banten	BNN Kota Tangerang Selatan	Kel. Buaran	Kec. Serpong	Kota Tangerang Selatan
34	Jawa Barat	BNNP Jawa Barat	Desa Bojongloa	Kec. Rancaekek	Kab. Bandung
35	Jawa Barat	BNNP Jawa Barat	Desa Ciater	Kec. Ciater	Kab. Subang
36	Jawa Barat	BNN Kota Cimahi	Kel. Cipageran	Kec. Cimahi Utara	Kota Cimahi
37	Jawa Barat	BNN Kota Depok	Kel. Depok	Kec. Pancoran Mas	Kota Depok
38	Jawa Barat	BNN Kota Tasikmalaya	Kel. Linggajaya	Kec. Mangkubumi	Kota Tasikmalaya

No	Provinsi	BNNP/K/Kota	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kota/Kab
39	Jawa Barat	BNN Kota Tasikmalaya	Kel. Ciherang	Kec. Cibeureum	Kota Tasikmalaya
40	Jawa Tengah	BNNP Jawa Tengah	Kel. Purwoyoso	Kec. Ngaliyan	Kota Semarang
41	Jawa Tengah	BNNP Jawa Tengah	Kel. Pekunden	Kec. Semarang Tengah	Kota Semarang
42	Jawa Tengah	BNN Kab. Temanggung	Kel. Kebonsari	Kec. Temanggung	Kab. Temanggung
43	Jawa Tengah	BNN Kab. Magelang	Desa Pancuranmas	Kec. Secang	Kab. Magelang
44	Jawa Tengah	BNN Kab. Kendal	Desa Sambongsari	Kec. Weleri	Kab. Kendal
45	Jawa Tengah	BNN Kab. Purbalingga	Desa Meri	Kec. Kutasari	Kab. Purbalingga
46	Jawa Tengah	BNN Kab. Banyumas	Desa Dawuhan Wetan	Kec. Kedungbanteng	Kab. Banyumas
47	DI Yogyakarta	BNN Kota Yogyakarta	Kel. Keparakon	Kec. Mergangsan	Kota Yogyakarta
48	DI Yogyakarta	BNN Kab. Sleman	Kalurahan Wedomartani	Kapanewon Ngemplak	Kab. Sleman
49	Jawa Timur	BNNP Jawa Timur	Desa Lebaksono	Kec. Pungging	Kab. Mojokerto
50	Jawa Timur	BNN Kab. Gresik	Desa Domas	Kec. Menganti	Kab. Gresik
51	Jawa Timur	BNN Kab. Sidoarjo	Desa Rangkah Kidul	Kec. Sidoarjo	Kab. Sidoarjo
52	Jawa Timur	BNN Kab. Trenggalek	Desa Tasikmadu	Kec. Watulimo	Kab. Trenggalek
53	Jawa Timur	BNN Kab. Lumajang	Kel. Jogoyudan	Kec. Lumajang	Kab. Lumajang
54	Jawa Timur	BNN Kab. Nganjuk	Desa Waung	Kec. Baron	Kab. Nganjuk
55	Jawa Timur	BNN Kab. Tulungagung	Desa Balerejo	Kec. Kauman	Kab. Tulungagung
56	Jawa Timur	BNN Kab. Pasuruan	Desa Jatiarjo	Kec. Prigen	Kab. Pasuruan
57	Jawa Timur	BNN Kota Kediri	Kel. Bandar Lor	Kec. Mojoroto	Kota Kediri
58	Jawa Timur	BNN Kota Malang	Kel. Dinoyo	Kec. Lowokwaru	Kota Malang
59	Jawa Timur	BNN Kota Surabaya	Kel. Kupang Krajan	Kec. Sawahan	Kota Surabaya
60	Jawa Timur	BNN Kab. Malang	Desa Ngadilangkung	Kec. Kepanjen	Kab. Malang
61	Jawa Timur	BNN Kab. Sumenep	Desa Ellak Laok	Kec. Lenteng	Kab. Sumenep
62	Kalimantan Barat	BNN Kota Pontianak	Kel. Pal V	Kec. Pontianak Barat	Kota Pontianak
63	Kalimantan Barat	BNN Kab. Sanggau	Desa Pusat Damai	Kec. Parindu	Kab. Sanggau
64	Kalimantan Barat	BNN Kab. Bengkayang	Desa Sungai Pangkalan I	Kec. Sungai Raya	Kab. Bengkayang
65	Kalimantan Barat	BNN Kab. Sintang	Desa Baning Kota	Kec. Sintang	Kab. Sintang
66	Kalimantan Tengah	BNNP Kalimantan Tengah	Kel. Palangka	Kec. Jekan Raya	Kota Palangka Raya
67	Kalimantan Tengah	BNN Kota Palangkaraya	Kel. Petuk Katimpun	Kec. Jekan Raya	Kota Palangka Raya
68	Kalimantan Selatan	BNN Kab. Balangan	Desa Sungsum	Kec. Tebing Tinggi	Kab. Balangan
69	Kalimantan Selatan	BNN Kab. Barito Kuala	Kel. Pulau Sewangi	Kec. Alalak	Kab. Barito Kuala
70	Kalimantan Selatan	BNN Kab. Hulu Sungai Utara	Desa Panangkalaan	Kec. Amuntai Utara	Kab. Hulu Sungai Utara
71	Kalimantan Timur	BNN Kota Balikpapan	Kel. Batu Ampar	Kec. Balikpapan Utara	Kota Balikpapan
72	Kalimantan Utara	BNN Kota Tarakan	Kel. Mamburungan	Kec. Tarakan Timur	Kota Tarakan
73	Sulawesi Utara	BNNP Sulawesi Utara	Desa Warembungan	Kec. Pineleng	Kab. Minahasa
74	Sulawesi Utara	BNN Kab. Bolaang Mongondow	Desa Tapa Aog	Kec. Lolayan	Kab. Bolaang Mongondow
75	Sulawesi Utara	BNN Kota Bitung	Kel. Bitung Tengah	Kec. Maesa	Kota Bitung
76	Sulawesi Utara	BNN Kota Manado	Kel. Sindulang Dua	Kec. Tuminting	Kota Manado
77	Sulawesi Utara	BNN Kota Manado	Kel. Ternate Baru	Kec. Singkil	Kota Manado
78	Sulawesi Utara	BNN Kab. Kepulauan Sangihe	Kampung Petta Timur	Kec. Tabukan Utara	Kab. Kepulauan Sangihe
79	Sulawesi Tengah	BNN Kab. Tojo Una Una	Desa Sumoli	Kec. Ratolindo	Kab. Tojo Una Una
80	Sulawesi Selatan	BNNP Sulawesi Selatan	Kel. La'Latang	Kec. Tallo	Kota Makassar
81	Sulawesi Selatan	BNNP Sulawesi Selatan	Desa Kanjilo	Kec. Barombong	Kab. Gowa
82	Sulawesi Selatan	BNNP Sulawesi Selatan	Kel. Kampung Buyang	Kec. Mariso	Kota Makassar
83	Sulawesi Selatan	BNN Kab. Tana Toraja	Kel. Batupapan	Kec. Makale	Kab. Tana Toraja
84	Sulawesi Selatan	BNN Kab. Tana Toraja	Kel. Bombongan	Kec. Makale	Kab. Tana Toraja
85	Sulawesi Selatan	BNN Kota. Palopo	Kel. Sabbamparu	Kec. Wara Utara	Kota Palopo
86	Sulawesi Tenggara	BNN Kota Kendari	Kel. Punggaloba	Kec. Kendari Barat	Kota Kendari
87	Sulawesi Barat	BNNP Sulawesi Barat	Kel. Rimuku	Kec. Mamuju	Kab. Mamuju
88	Bali	BNNP Bali	Desa Marga Dauh Puri	Kec. Marga	Kab. Tabanan
89	Bali	BNN Kab. Karangasem	Desa Nongan	Kec. Rendang	Kab. Karangasem

No	Provinsi	BNNP/K/Kota	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kota/Kab
90	Papua Barat	BNNP Papua Barat	Kel. Sanggeng	Kec. Manokwari Barat	Kab. Manokwari
Berkembang					
1	Aceh	BNNP Aceh	Gampong Baro	Kec. Peukan Bada	Kab. Aceh Besar
2	Aceh	BNN Kota Banda Aceh	Gampong Lampulo	Kec. Kuta Alam	Kota Banda Aceh
3	Aceh	BNN Kab. Pidie Jaya	Gampong Keurisi Meunasah Raya	Kec. Jangka Buya	Kab. Pidie Jaya
4	Aceh	BNN Kota Lhokseumawe	Gampong Meunasah Mee	Kec. Muara Dua	Kota Lhokseumawe
5	Aceh	BNN Kota Lhokseumawe	Gampong Meunasah Mesjid	Kec. Muara Dua	Kota Lhokseumawe
6	Aceh	BNN Kab. Aceh Tamiang	Gampong Tanjung Karang	Kec. Karang Baru	Kab. Aceh Tamiang
7	Aceh	BNN Kab. Pidie	Gampong Dayah Muara Garot	Kec. Indra Jaya	Kab. Pidie
8	Aceh	BNN Kota Langsa	Gampong Alue Merbau	Kec. Langsa Timur	Kota Langsa
9	Aceh	BNN Kab. Aceh Selatan	Gampong Lhok Keutapang	Kec. Tapaktuan	Kab. Aceh Selatan
10	Aceh	BNN Kota Sabang	Gampong Iboih	Kec. Sukakarya	Kota Sabang
11	Sumatera Utara	BNNP Sumatera Utara	Kel. Tanjung Sari	Kec. Medan Selayang	Kota Medan
12	Sumatera Utara	BNNP Sumatera Utara	Kel. Belawan II	Kec. Medan Belawan	Kota Medan
13	Sumatera Utara	BNN Kota Tebing Tinggi	Kel. Bandar Utama	Kec. Tebing Tinggi Kota	Kota Tebing Tinggi
14	Sumatera Utara	BNN Kab. Labuhanbatu Utara	Desa Kampung Yaman	Kec. Aek Natas	Kab. Labuhanbatu Utara
15	Sumatera Utara	BNN Kab. Batu Bara	Desa Simpang Dolok	Kec. Datuk Lima Puluh	Kab. Batu Bara
16	Sumatera Barat	BNN Kab. Solok	Nagari Salayo	Kec. Kubung	Kab. Solok
17	Sumatera Barat	BNN Kab. Pasaman Barat	Nagari Lingkuang Aua	Kec. Pasaman	Kab. Pasaman Barat
18	Riau	BNN Kab. Kuantan Singingi	Desa Koto Taluk	Kec. Kuantan Tengah	Kab. Kuantan Singingi
19	Riau	BNN Kab. Pelalawan	Desa Lubuk Kembang Sari	Kec. Ukui	Kab. Pelalawan
20	Riau	BNN Kota Pekanbaru	Kel. Pesisir	Kec. Lima Puluh	Kota Pekanbaru
21	Riau	BNN Kota Dumai	Kel. Purnama	Kec. Dumai Barat	Kota Dumai
22	Jambi	BNNP Jambi	Kel. Kasang Jaya	Kec. Jambi Timur	Kota Jambi
23	Jambi	BNNP Jambi	Desa Kota Karang	Kec. Kumpuh Ulu	Kab. Muaro Jambi
24	Sumatera Selatan	BNNP Sumatera Selatan	Kel. 36 Ilir	Kec. Gandus	Kota Palembang
25	Sumatera Selatan	BNN Kota Pagar Alam	Kel. Beringin Jaya	Kec. Pagar Alam Utara	Kota Pagar Alam
26	Sumatera Selatan	BNN Kota Prabumulih	Desa Karang Bindu	Kec. Rambang Kapak Tengah	Kota Prabumulih
27	Sumatera Selatan	BNN Kab. Muara Enim	Desa Muara Lawai	Kec. Muara Enim	Kab. Muara Enim
28	Lampung	BNNP Lampung	Desa Gedong Tataan	Kec. Gedong Tataan	Kab. Pesawaran
29	Lampung	BNNP Lampung	Kampung Bandar Agung	Kec. Terusan Nunyai	Kab. Lampung Tengah
30	Lampung	BNN Kab. Lampung Selatan	Desa Bakauheni	Kec. Bakauheni	Kab. Lampung Selatan
31	Lampung	BNN Kab. Lampung Timur	Desa Labuhan Ratu I	Kec. Way Jepara	Kab. Lampung Timur
32	Lampung	BNN Kab. Way Kanan	Kampung Rambang Jaya	Kec. Blambangan Umpu	Kab. Way Kanan
33	Kep. Bangka Belitung	BNN Kab. Bangka	Kel. Sungailiat	Kec. Sungailiat	Kab. Bangka
34	Kep. Bangka Belitung	BNN Kab. Bangka Selatan	Desa Gadung	Kec. Toboali	Kab. Bangka Selatan
35	Kepulauan Riau	BNNP Kepulauan Riau	Kel. Batu Besar	Kec. Nongsa	Kota Batam
36	Kepulauan Riau	BNNP Kepulauan Riau	Kel. Kabil	Kec. Nongsa	Kota Batam
37	Kepulauan Riau	BNN Kota Tanjungpinang	Kel. Kampung Bugis	Kec. Tanjungpinang Kota	Kota Tanjungpinang
38	Kepulauan Riau	BNN Kab. Karimun	Desa Pangke Barat	Kec. Meral Barat	Kab. Karimun
39	Bengkulu	BNNP Bengkulu	Desa Sri Kuncoro	Kec. Pondok Kelapa	Kab. Bengkulu Tengah
40	Bengkulu	BNNP Bengkulu	Kel. Sumber Jaya	Kec. Kampung Melayu	Kota Bengkulu
41	Banten	BNN Kota Tangerang	Kel. Pinang	Kec. Pinang	Kota Tangerang

No	Provinsi	BNNP/K/Kota	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kota/Kab
42	Jawa Barat	BNN Kota Bandung	Kel. Lebakgede	Kec. Cobleng	Kota Bandung
43	Jawa Barat	BNN Kota Bandung	Kel. Babakan Surabaya	Kec. Kiaracondong	Kota Bandung
44	Jawa Barat	BNN Kota Bandung	Kel. Cikutra	Kec. Cibeunying Kidul	Kota Bandung
45	Jawa Barat	BNN Kota Bandung	Kel. Kebon Pisang	Kec. Sumur Bandung	Kota Bandung
46	Jawa Barat	BNN Kota Bandung	Kel. Kebon Waru	Kec. Batununggal	Kota Bandung
47	Jawa Barat	BNN Kab. Bandung Barat	Desa Cigugurgirang	Kec. Parongpong	Kab. Bandung Barat
48	Jawa Barat	BNN Kab. Cianjur	Desa Songgom	Kec. Gekbrong	Kab. Cianjur
49	Jawa Barat	BNN Kab. Sukabumi	Desa Kompa	Kec. Parungkuda	Kab. Sukabumi
50	Jawa Barat	BNN Kab. Sumedang	Desa Cihanjuang	Kec. Cimanggung	Kab. Sumedang
51	Jawa Barat	BNN Kab. Garut	Desa Jayaraga	Kec. Tarogong Kidul	Kab. Garut
52	Jawa Barat	BNN Kota Tasikmalaya	Kel. Sambong Jaya	Kec. Mangkubumi	Kota Tasikmalaya
53	Jawa Barat	BNN Kab. Kuningan	Desa Langseb	Kec. Lebakwangi	Kab. Kuningan
54	Jawa Barat	BNN Kab. Karawang	Desa Purwasari	Kec. Purwasari	Kab. Karawang
55	Jawa Tengah	BNN Kota Tegal	Kel. Bandung	Kec. Tegal Selatan	Kota Tegal
56	DI Yogyakarta	BNNP DI Yogyakarta	Kel. Wates	Kec. Wates	Kab. Kulon Progo
57	DI Yogyakarta	BNN Kab. Bantul	Kelurahan Mulyodadi	Kec. Bambanglipuro	Kab. Bantul
58	Jawa Timur	BNN Kota Mojokerto	Kelurahan Prajurit Kulon	Kec. Prajurit Kulon	Kota Mojokerto
59	Jawa Timur	BNN Kota Batu	Desa Giripurno	Kec. Bumiaji	Kota Batu
60	Jawa Timur	BNN Kab. Malang	Desa Sengguh	Kec. Kepanjen	Kab. Malang
61	Kalimantan Barat	BNNP Kalimantan Barat	Desa Penjajap	Kec. Pemangkat	Kab. Sambas
62	Kalimantan Barat	BNN Kota Singkawang	Kel. Roban	Kec. Singkawang Tengah	Kota Singkawang
63	Kalimantan Selatan	BNNP Kalimantan Selatan	Kel. Telawang	Kec. Banjarmasin Barat	Kota Banjarmasin
64	Kalimantan Selatan	BNNP Kalimantan Selatan	Kel. Mantuil	Kec. Banjarmasin Selatan	Kota Banjarmasin
65	Kalimantan Selatan	BNN Kota Banjarbaru	Kel. Bangkal	Kec. Cempaka	Kota Banjarbaru
66	Kalimantan Selatan	BNN Kab. Hulu Sungai Selatan	Desa Jembatan Merah	Kec. Padang Batung	Kab. Hulu Sungai Selatan
67	Kalimantan Selatan	BNN Kab. Tabalong	Desa Kasiau	Kec. Murung Pudak	Kab. Tabalong
68	Kalimantan Timur	BNNP Kalimantan Timur	Kel. Teluk Lingga	Kec. Sangatta Utara	Kab. Kutai Timur
69	Kalimantan Timur	BNN Kota Samarinda	Kel. Pelita	Kec. Samarinda Ilir	Kota Samarinda
70	Kalimantan Utara	BNNP Kalimantan Utara	Kel. Karang Anyar Pantai	Kec. Tarakan Barat	Kota Tarakan
71	Sulawesi Tengah	BNNP Sulawesi Tengah	Desa Mpanau	Kec. Sigi Biromaru	Kab. Sigi
72	Sulawesi Tengah	BNN Kab. Donggala	Desa Tondo	Kec. Sirenja	Kab. Donggala
73	Sulawesi Tengah	BNN Kab. Poso	Kel. Kayamanya	Kec. Poso Kota	Kab. Poso
74	Sulawesi Selatan	BNNP Sulawesi Selatan	Kel. Pandang	Kec. Panakukang	Kota Makassar
75	Sulawesi Selatan	BNNP Sulawesi Selatan	Kel. Pisang Selatan	Kec. Ujung Pandang	Kota Makassar
76	Sulawesi Selatan	BNNP Sulawesi Selatan	Desa Majannang	Kec. Maros Baru	Kab. Maros
77	Sulawesi Selatan	BNNP Sulawesi Selatan	Kel. Parang Tambung	Kec. Tamalate	Kota Makassar
78	Sulawesi Selatan	BNN Kab. Bone	Kel. Pompanua	Kec. Ajangale	Kab. Watampone
79	Sulawesi Tenggara	BNNP Sulawesi Tenggara	Kel. Sanua	Kec. Kendari Barat	Kota Kendari
80	Sulawesi Tenggara	BNNP Sulawesi Tenggara	Kel. Kemaraya	Kec. Kendari Barat	Kota Kendari
81	Sulawesi Tenggara	BNNP Sulawesi Tenggara	Kel. Kadia	Kec. Kadia	Kota Kendari
82	Sulawesi Tenggara	BNNP Sulawesi Tenggara	Kel. Bende	Kec. Kadia	Kota Kendari
83	Sulawesi Tenggara	BNN Kab. Muna	Kel. Watonea	Kec. Katobu	Kab. Muna
84	Sulawesi Tenggara	BNN Kab. Kolaka	Desa Watuliandu	Kec. Kolaka	Kab. Kolaka
85	Sulawesi Tenggara	BNN Kab. Kolaka	Kel. Kolakaasi	Kec. Latambaga	Kab. Kolaka
86	Sulawesi Tenggara	BNN Kota Baubau	Kel. Bukit Wolio Indah	Kec. Wolio	Kota Baubau
87	Sulawesi Barat	BNN Kab. Polewali Mandar	Kel. Polewali	Kec. Polewali	Kab. Polewali Mandar
88	Maluku	BNNP Maluku	Negeri Kailolo	Kec. Pulau Harukku	Kab. Maluku Tengah
89	Maluku	BNN Kab. Buru Selatan	Desa Namlea	Kec. Namlea	Kab. Buru

No	Provinsi	BNNP/K/Kota	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kota/Kab
90	Maluku	BNN Kota Tual	Kel. Ohoiyang Watdek	Kec. Kei Kecil	Kab. Maluku Tenggara
91	Maluku Utara	BNNP Maluku Utara	Kel. Stadion	Kec. Kota Ternate Tengah	Kota Ternate
92	Maluku Utara	BNN Kota Tidore Kepulauan	Kel. Tuguwaji	Kec. Tidore	Kota Tidore Kepulauan
93	Bali	BNN Kab. Klungkung	Desa Pesinggahan	Kec. Dawan	Kab. Klungkung
94	NTB	BNNP NTB	Desa Pemenang Barat	Kec. Pemenang	Kab. Lombok Utara
95	NTB	BNNP NTB	Desa Bengkel	Kec. Labuapi	Kab. Lombok Barat
96	NTB	BNN Kab. Bima	Kel. Tanjung	Kec. Rasanae Barat	Kota Bima
97	NTB	BNN Kota Mataram	Kel. Bintaro	Kec. Ampenan	Kota Mataram
98	NTB	BNN Kab. Sumbawa Barat	Desa Tapir	Kec. Seteluk	Kab. Sumbawa Barat
99	NTT	BNNP NTT	Kel. Oebobo	Kec. Oebobo	Kota Kupang
100	NTT	BNN Kota Kupang	Kel. Kayu Putih	Kec. Oebobo	Kota Kupang
101	Papua	BNN Kab. Mimika	Kampung Kadun Jaya	Kec. Wania	Kab. Mimika
Tumbuh					
1	Aceh	BNN Kota Lhokseumawe	Gampong Jurong	Kec. Sawang	Kab. Aceh Utara
2	Sumatera Barat	BNN Kota Sawahlunto	Desa Silungkang Tigo	Kec. Silungkang	Kota Sawahlunto
3	Jambi	BNNP Jambi	Desa Pulau Kayu Aro	Kec. Sekernan	Kab. Muaro Jambi
4	Jambi	BNN Kab. Tanjung Jabung Timur	Kel. Muara Sabak Ilir	Kec. Muara Sabak Timur	Kab. Tanjung Jabung Timur
5	Jambi	BNN Kota Jambi	Kel. Tanjung Sari	Kec. Jambi Timur	Kota Jambi
6	Jambi	BNN Kab. Batanghari	Desa Aro	Kec. Muara Bulian	Kab. Batanghari
7	Jambi	BNN Kab. Batanghari	Desa Ture	Kec. Pemayung	Kab. Batanghari
8	Jambi	BNN Kab. Batanghari	Desa Sungai Baung	Kec. Muara Bulian	Kab. Batanghari
9	Sumatera Selatan	BNNP Sumatera Selatan	Kel. Sukarami	Kec. Sukarami	Kota Palembang
10	Sumatera Selatan	BNN Kab. Empat Lawang	Desa Batu Panceh	Kec. Tebing Tinggi	Kab. Empat Lawang
11	Sumatera Selatan	BNN Kab. Musi Rawas	Desa Sukarena	Kec. Sukakarya	Kab. Musi Rawas
12	Lampung	BNN Kab. Tanggamus	Pekon Gunung Tiga	Kec. Pugung	Kab. Tanggamus
13	Lampung	BNN Kota Metro	Kel. Mulyojati	Kec. Metro Barat	Kota Metro
14	Kep. Bangka Belitung	BNNP Kep. Bangka Belitung	Kel. Kelapa	Kec. Kelapa	Kab. Bangka Barat
15	DKI Jakarta	BNN Kota Jakarta Timur	Kel. Lubang Buaya	Kec. Cipayung	Kota Jakarta Timur
16	Banten	Kota Tangerang Selatan	Kel. Setu	Kec. Setu	Kota Tangerang Selatan
17	Banten	BNN Kota Cilegon	Kel. Jombang Wetan	Kec. Jombang	Kota Cilegon
18	Jawa Barat	BNN Kab. Cianjur	Desa Sirnagalih	Kec. Cilaku	Kab. Cianjur
19	Jawa Barat	BNN Kab. Ciamis	Desa Margaluyu	Kec. Cikoneng	Kab. Ciamis
20	DI Yogyakarta	BNN Kota Yogyakarta	Kel. Bener	Kec. Tegalrejo	Kota Yogyakarta
21	DI Yogyakarta	BNN Kota Yogyakarta	Kel. Tegalrejo	Kec. Tegalrejo	Kota Yogyakarta
22	D.I. Yogyakarta	BNNK Yogyakarta	Kel. Brontokusuman	Kec. Mergangsan	Kota Yogyakarta
23	DI Yogyakarta	BNN Kab. Sleman	Desa Banyuraden	Kec. Gamping	Kab. Sleman
24	Kalimantan Selatan	BNN Kota Banjarmasin	Kel. Alalak Utara	Kec. Banjarmasin Utara	Kota Banjarmasin
25	Kalimantan Selatan	BNN Kab. Tanah Laut	Kel. Karang Taruna	Kec. Pelaihari	Kab. Tanah Laut
26	Kalimantan Timur	BNN Kota Bontang	Kel. Tanjung Laut Indah	Kec. Bontang Selatan	Kota Bontang
27	Kalimantan Utara	BNN Kab. Nunukan	Desa Seberang	Kec. Sebatik Utara	Kab. Nunukan
28	Sulawesi Tengah	BNN Kab. Poso	Kel. Bonesompe	Kec. Poso Kota Utara	Kab. Poso
29	Sulawesi Tengah	BNN Kab. Morowali	Desa Sakita	Kec. Bungku Tengah	Kab. Morowali
30	Sulawesi Selatan	BNNP Sulawesi Selatan	Desa Jombe	Kec. Turatea	Kab. Jeneponto
31	Sulawesi Selatan	BNN Kab. Tana Toraja	Kel. Tambunan	Kec. Makale Utara	Kab. Tana Toraja
32	Maluku Utara	BNN Kab. Pulau Morotai	Desa Wawama	Kec. Morotai Selatan	Kab. Pulau Morotai
33	Maluku Utara	BNN Kab. Halmahera Utara	Desa Rawajaya	Kec. Tobelo	Kab. Halmahera Utara
34	Bali	BNN Kab. Gianyar	Desa Sayan	Kec. Ubud	Kab. Gianyar
35	NTB	BNN Kab. Bima	Kel. Paruga	Kec. Rasanae Barat	Kota Bima
36	NTB	BNN Kota Mataram	Kel. Dasan Cermen	Kec. Sandubaya	Kota Mataram

No	Provinsi	BNNP/K/Kota	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kota/Kab
37	NTT	BNN Kab. Rote Ndao	Desa Baadale	Kec. Lobalain	Kab. Rote Ndao
38	Gorontalo	BNNP Gorontalo	Kel. Pulubala	Kec. Kota Tengah	Kota Gorontalo
39	Gorontalo	BNN Kab. Boalemo	Desa Tangkobu	Kec. Paguyaman	Kab. Boalemo
40	Gorontalo	BNN Kota Gorontalo	Kel. Limba U I	Kec. Kota Selatan	Kota Gorontalo
41	Gorontalo	BNN Kab. Bone Bolango	Desa Poowo	Kec. Kabila	Kab. Bone Bolango
42	Gorontalo	BNN Kab. Gorontalo Utara	Desa Bulalo	Kec. Kwandang	Kab. Gorontalo Utara
43	Papua	BNNP Papua	Kel. Imbi	Kec. Jayapura Utara	Kota Jayapura
44	Papua	BNN Kab. Jayapura	Kampung Nolakla	Kec. Sentani Timur	Kab. Jayapura
Rintisan					
1	Sumatera Utara	BNN Kab. Simalungun	Kel. Perdagangan III	Kec. Bandar	Kab. Simalungun
2	Sumatera Selatan	BNN Kab. Musi Rawas	Desa Semangus Baru	Kec. Muara Lakitan	Kab. Musi Rawas
3	Kep. Bangka Belitung	BNN Kab. Belitung	Desa Aik Pelempang Jaya	Kec. Tanjungpandan	Kab. Belitung
4	Kepulauan Riau	BNN Kota Batam	Kel. Taman Balai	Kec. Batam Kota	Kota Batam
5	Bengkulu	BNNP Bengkulu	Kel. Sawah Lebar	Kec. Ratu Agung	Kota Bengkulu
6	DKI Jakarta	BNN Kota Jakarta Timur	Kel. Palmeriam	Kec. Matraman	Kota Jakarta Timur
7	DKI Jakarta	BNN Kota Jakarta Timur	Kel. Penggilingan	Kec. Cakung	Kota Jakarta Timur
8	DKI Jakarta	BNN Kota Jakarta Timur	Kel. Pulogebang	Kec. Cakung	Kota Jakarta Timur
9	DKI Jakarta	BNN Kota Jakarta Timur	Kel. Cawang	Kec. Kramat Jati	Kota Jakarta Timur
10	Banten	BNNP Banten	Kel. Sukmajaya	Kec. Jombang	Kota Cilegon
11	Banten	BNN Kota Tangerang	Kel. Cibodasari	Kec. Cibodas	Kota Tangerang
12	Jawa Barat	BNN Kota Bandung	Kel. Sukamiskin	Kec. Arcamanik	Kota Bandung
13	Jawa Barat	BNN Kab. Bogor	Kel. Nanggung	Kec. Cibinong	Kab. Bogor
14	Jawa Tengah	BNN Kab. Cilacap	Desa Planjan	Kec. Kesugihan	Kab. Cilacap
15	Kalimantan Selatan	BNNP Kalimantan Selatan	Kel. Kelayan Tengah	Kec. Banjarmasin Selatan	Kota Banjarmasin
16	Kalimantan Timur	BNN Kota Bontang	Kel. Api-Api	Kec. Bontang Utara	Kota Bontang
17	Kalimantan Utara	BNNP Kalimantan Utara	Desa Gunung Putih	Kec. Tanjung Palas	Kab. Bulungan
18	Sulawesi Tengah	BNN Kab. Banggai Kepulauan	Desa Bonggan	Kec. Tinangkung	Kab. Banggai Kepulauan
19	Bali	BNN Kab. Badung	Kel. Kuta	Kec. Kuta	Kab. Badung
20	Bali	BNN Kota Denpasar	Desa Tegal Harum	Kec. Denpasar Barat	Kota Denpasar
21	NTB	BNN Kab. Bima	Kel. Monggonao	Kec. Mpunda	Kota Bima
22	NTB	BNN Kab. Sumbawa	Desa Batu Tering	Kec. Moyo Hulu	Kab. Sumbawa
23	NTT	BNN Kab. Belu	Desa Tulakadi	Kec. Tasifeto Timur	Kab. Belu
Pra Fase					
1	Aceh	BNN Kota Lhokseumawe	Gampong Lancok	Kec. Sawang	Kab. Aceh Utara
2	Sumatera Barat	BNNP Sumatera Barat	Nagari Sungai Buluh Selatan	Kec. Batang Anai	Kab. Padang Pariaman
3	Riau	BNN Kota Dumai	Kel. Kampung Baru	Kec. Bukit Kapur	Kota Dumai
4	Jambi	BNN Kab. Batanghari	Kel. Kembang Paseban	Kec. Mersam	Kab. Batanghari
5	Kep. Bangka Belitung	BNNP Kep. Bangka Belitung	Desa Tempilang	Kec. Tempilang	Kab. Bangka Barat
6	Kep. Bangka Belitung	BNN Kota Pangkalpinang	Kel. Pasir Putih	Kec. Bukit Intan	Kota Pangkalpinang
7	Kep. Bangka Belitung	BNN Kab. Bangka	Desa Kace Timur	Kec. Mendo Barat	Kab. Bangka
8	Kep. Bangka Belitung	BNN Kab. Bangka	Desa Jada Bahrin	Kec. Merawang	Kab. Bangka
9	Kep. Bangka Belitung	BNN Kab. Belitung	Desa Lalang	Kec. Manggar	Kab. Belitung Timur
10	Kep. Bangka Belitung	BNN Kab. Bangka Selatan	Desa Tiram	Kec. Tukak Sadai	Kab. Bangka Selatan
11	Jawa Timur	BNN Kab. Sidoarjo	Desa Bluru Kidul	Kec. Sidoarjo	Kab. Sidoarjo
12	Jawa Timur	BNN Kab. Trenggalek	Desa Watulimo	Kec. Watulimo	Kab. Trenggalek
13	Kalimantan Tengah	BNNP Kalimantan Tengah	Kel. Pahandut	Kec. Pahandut	Kota Palangka Raya
14	Kalimantan Selatan	BNN Kab. Balangan	Desa Lingsir	Kec. Paringin Selatan	Kab. Balangan
15	Sulawesi Tengah	BNNP Sulawesi Tengah	Desa Ngatabaru	Kec. Sigi Biromaru	Kab. Sigi

No	Provinsi	BNNP/K/Kota	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kota/Kab
16	Maluku Utara	BNNP Maluku Utara	Kel. Dufa-Dufa	Kec. Kota Ternate Utara	Kota Ternate
17	Bali	BNN Kota Denpasar	Desa Pemecutan Kelod	Kec. Denpasar Barat	Kota Denpasar
18	NTT	BNNP NTT	Kel. Fatululi	Kec. Oebobo	Kota Kupang
19	Gorontalo	BNNP Gorontalo	Desa Lombongo	Kec. Suwawa Tengah	Kab. Bone Bolango
20	Gorontalo	BNNP Gorontalo	Desa Ayula Tilango	Kec. Bulango Selatan	Kab. Bone Bolango
21	Gorontalo	BNNP Gorontalo	Desa Bubeya	Kec. Suwawa	Kab. Bone Bolango
22	Gorontalo	BNNP Gorontalo	Desa Boludawa	Kec. Suwawa	Kab. Bone Bolango
23	Gorontalo	BNN Kab. Bone Bolango	Desa Alale	Kec. Suwawa Tengah	Kab. Bone Bolango
24	Gorontalo	BNN Kab. Gorontalo	Desa Ilotidea	Kec. Tilango	Kab. Gorontalo

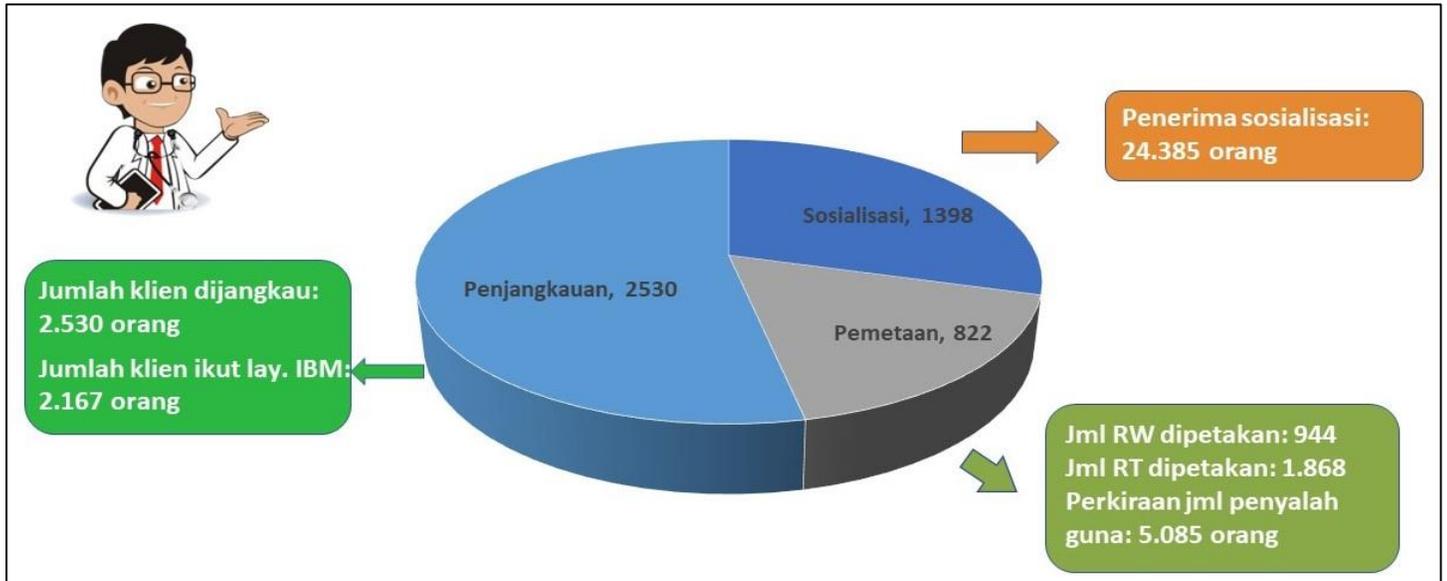
a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional
Deputi Rehabilitasi



Riza Sarasvita
Dra. Riza Sarasvita, M.Si, MHS, Ph.D

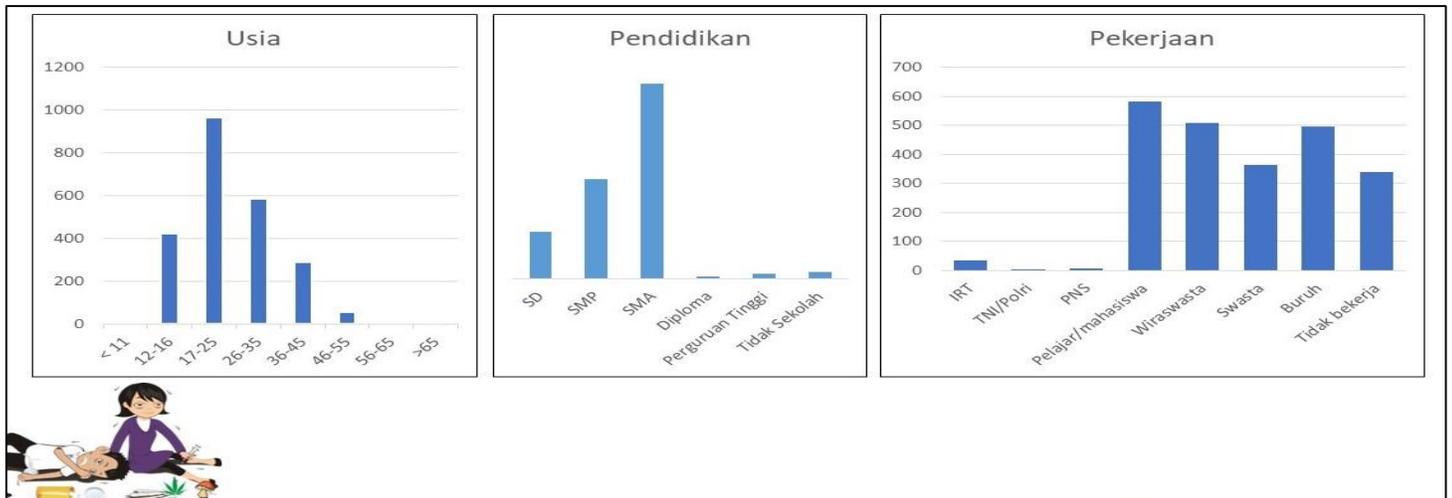
**GAMBARAN KEGIATAN & PROFIL KLIEN IBM BINAAN BNNP & BNNK/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2022**

A. Gambaran kegiatan IBM

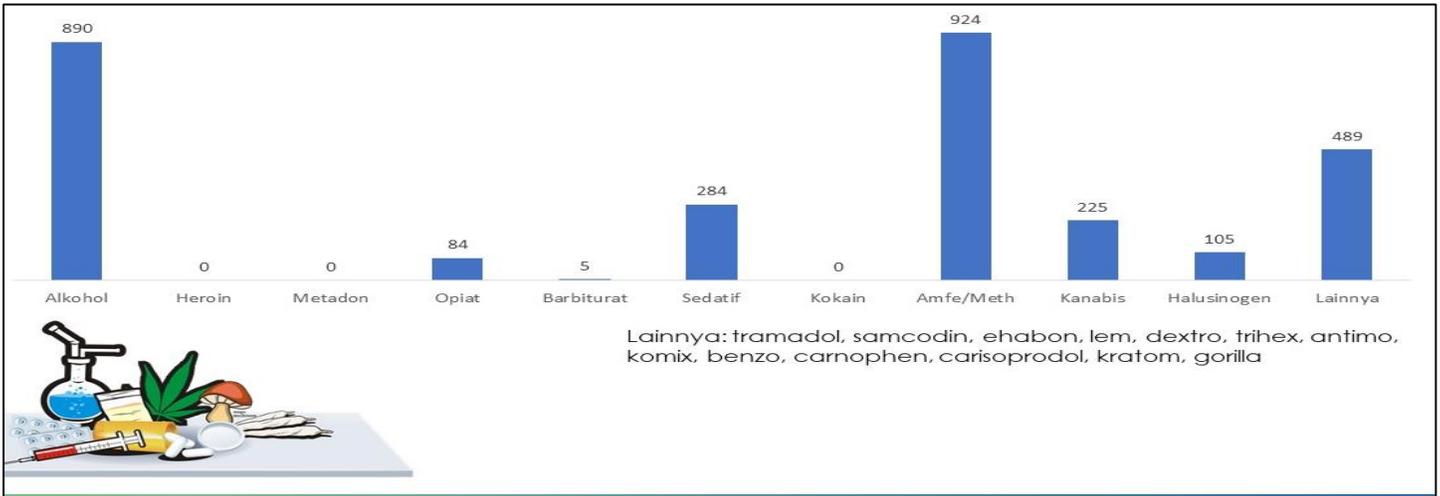


*data berdasarkan hasil monitoring pada awal bulan Desember 2022

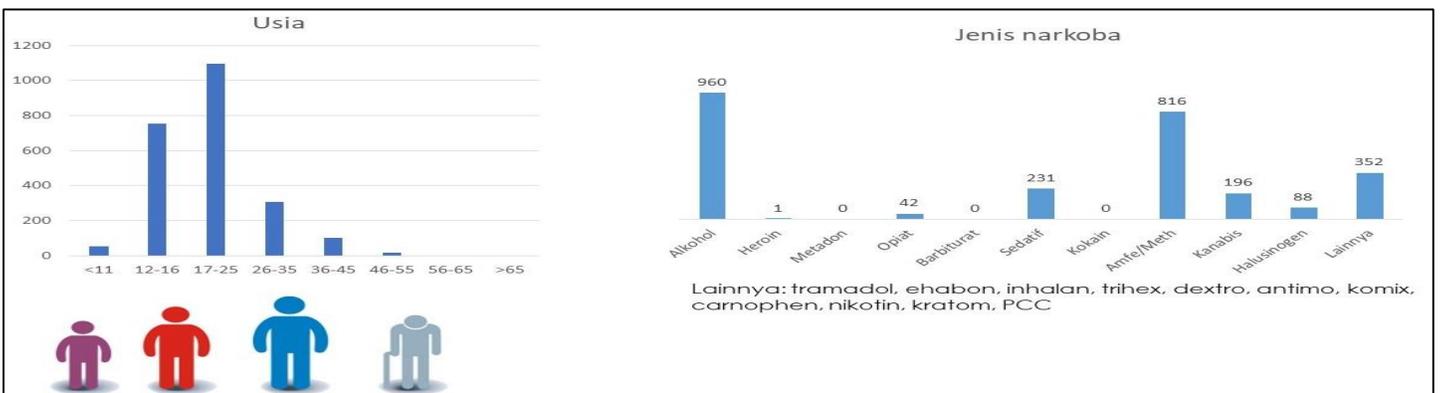
B. Profil klien IBM



Total klien IBM pada tahun 2022 adalah 2.331 orang, mayoritas berasal dari kelompok usia 17-25%, jenjang pendidikan terakhir yang ditempuh adalah SMA dan sederajat, dan saat mengikuti layanan IBM merupakan pelajar/mahasiswa.



Jenis zat utama yang disalahgunakan merupakan amphetamine/methamphetamine, diikuti dengan sedatif dan kanabis. Sebagian besar klien juga mengonsumsi alkohol secara berlebihan.



Mayoritas klien pertama kali menyalahgunakan narkoba pada kelompok usia 17-25 tahun, dengan jenis zat yang digunakan adalah amphetamine/methamphetamine, diikuti dengan sedatif dan jenis zat lainnya (tramadol, ehabon, inhalan, trihex, dextro, carnophen, kratom, PCC, termasuk rokok), juga alkohol

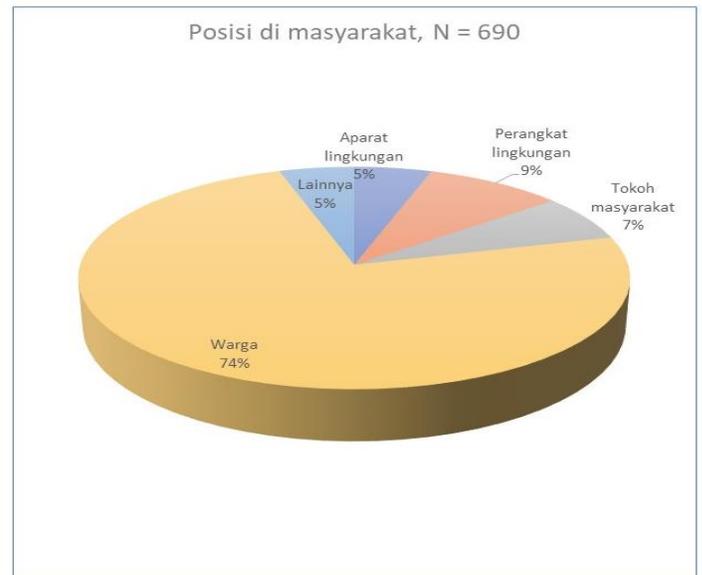
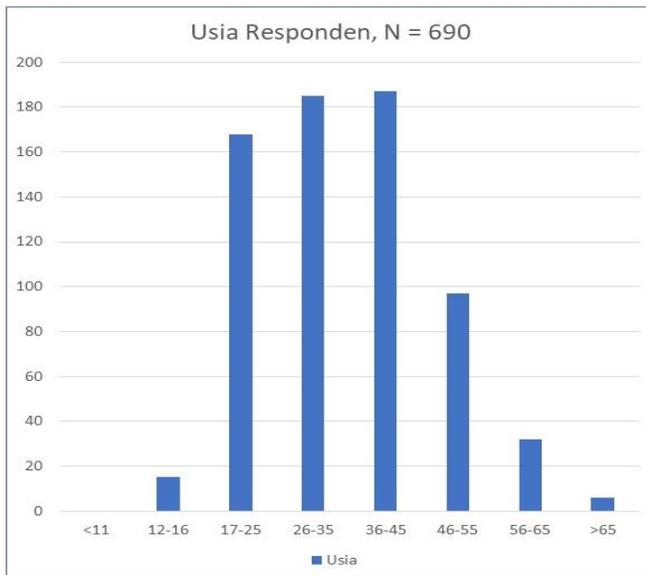
a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional
Deputi Rehabilitasi



Dra. Riza Sarasvita, M.Si, MHS, Ph.D

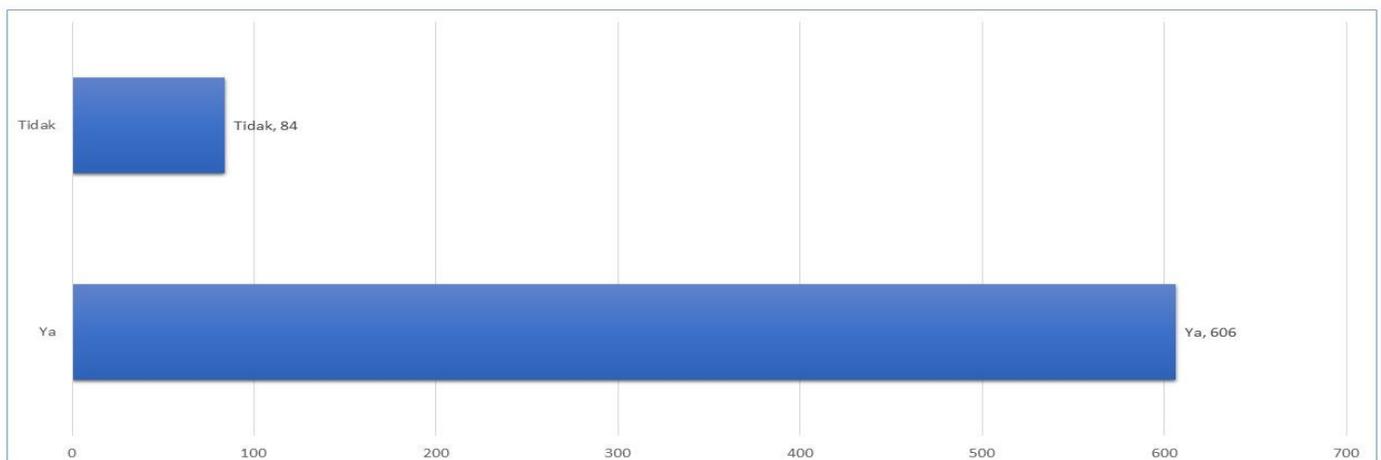
**HASIL PEMANTAUAN PROGRAM IBM TERHADAP LINGKUNGAN & MASYARAKAT
TAHUN ANGGARAN 2022**

A. Data demografi responden



Berdasarkan grafik tersebut, diketahui bahwa mayoritas responden survey berada dalam kelompok usia 26-35 dan 36-45 tahun, serta merupakan warga setempat di desa/ kelurahan lokasi IBM.

B. Pengetahuan tentang IBM



Berdasarkan grafik tersebut, diketahui bahwa mayoritas responden survey (87,83%) mengetahui tentang keberadaan IBM di desa/ kelurahan tempat mereka berdomisili.

C. Hasil survey

No.	Pernyataan	Definisi Operasional	Skor Rata-rata	Interpretasi
1	Penjelasan dari kader tentang program IBM kepada masyarakat sekitar	Mengenalkan dan melakukan sosialisasi tentang IBM dan menggerakkan partisipasi masyarakat untuk ikut mendukung kegiatan	3	Ada, cukup jelas maksud serta tujuan, tetapi hanya sedikit warga yang berpartisipasi
2	Perubahan perilaku penyalah guna narkoba setelah pelaksanaan program IBM di lingkungan Bapak/ Ibu	Menilai peran IBM dalam perubahan perilaku kelompok penyalah guna narkoba menurut pengamatan masyarakat	3	Sudah mulai tidak menimbulkan kegaduhan/ keributan yang negatif, para penyalah guna sudah tidak terlihat tetapi belum jelas apakah mereka semua sudah berubah
3	Keterlibatan masyarakat dalam membantu pemulihan penyalah guna narkoba di wilayah Bapak/ Ibu	Menilai keterlibatan masyarakat dalam membantu pemulihan penyalah guna narkoba	3	Ada keterlibatan warga yang diwakili pengurus tingkat desa/kelurahan, keluarga yang anggotanya mengalami permasalahan narkoba dan beberapa komponen masyarakat lain tetapi dalam jumlah sedikit (kurang dari 5 orang)

No.	Pernyataan	Definisi Operasional	Skor Rata-rata	Interpretasi
4	Pendampingan yang dilakukan AP dalam mengubah perilaku penyalah guna narkotika di lingkungan Bapak/ Ibu	Menilai peran AP dalam mendampingi dan memantau para penyalah guna narkotika	3	Agen Pemulihan melakukan pendampingan dan pemantauan secara bersungguh-sungguh pada penyalahguna narkotika
5	Peran AP untuk melibatkan keluarga dalam program IBM	Dampak yang optimal dapat terlihat dari pelibatan keluarga, karena keluarga berperan dalam proses pemulihan penyalah guna narkotika. Dengan melibatkan keluarga, keluarga paham masalah kecanduan dapat terjadi berulang, sehingga pandangan negatif tentang penyalah guna narkotika dari keluarga dapat diminimalkan/ dihilangkan	3	Agen Pemulihan melibatkan keluarga, ada upaya pemberian informasi dan pengetahuan, sehingga keluarga tidak lagi memandang negatif penyalahguna
6	Peran serta para penyalah guna narkotika yang mengikuti program IBM dalam kegiatan sosial di lingkungan tempat tinggal	Menilai, apakah setelah didampingi oleh IBM, mantan penyalah guna narkotika mulai peduli & terlibat dalam kegiatan sosial yang ada di masyarakat	3	Berperan dalam kegiatan

a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional
Deputi Rehabilitasi



Riza Sarasvita
Dra. Riza Sarasvita, M.Si, MHS, Ph.D

**DAFTAR HASIL IDENTIFIKASI MASALAH DAN REKOMENDASI PROGRAM IBM
TAHUN ANGGARAN 2022**

Kategori	No.	Hasil Identifikasi Masalah	Rekomendasi
SDM	1	Agen Pemulihan (AP) belum memahami alur layanan IBM	Petugas BNNP/K/Kota secara berkala melakukan asistensi dan pembinaan terhadap IBM binaan masing-masing
	2	AP tidak aktif dalam menjalankan kegiatan dan layanan IBM	Petugas BNNP/K/Kota memberikan motivasi dan aktif dalam menggerakkan AP
	3	Kepala Desa/ Lurah kurang mendukung program IBM	Petugas BNNP/K/Kota bersama AP melakukan advokasi dan meningkatkan koordinasi dengan Kepala Desa/ Lurah terkait pelaksanaan program IBM
	4	Masih tingginya stigma masyarakat sekitar	Dalam kegiatan sosialisasi, AP menekankan bahwa IBM adalah layanan kesehatan untuk mengetahui tingkat risiko penyalahgunaan narkotika
Anggaran	1	IBM belum memperoleh anggaran mandiri	1. Petugas BNNP/K/Kota bersama AP melakukan advokasi kepada Pemerintah Daerah/ Desa/ Kelurahan terkait penganggaran program IBM 2. Petugas BNNP/K/Kota mendampingi AP menyusun proposal untuk diajukan kepada pihak lain untuk memperoleh anggaran kegiatan
	2	Anggaran sudah dialokasikan melalui APBDes tetapi ada kendala dalam realisasinya	Petugas BNNP/K/Kota bersama AP melakukan koordinasi lanjutan untuk memastikan realisasi anggaran IBM kepada pihak desa
	3	Adanya anggaran operasional IBM dalam DIPA yang masih diblokir	Petugas BNNP/K/Kota melaksanakan kegiatan dan layanan sesuai dengan anggaran yang tersedia
Peralatan/ perlengkapan	1	Buku kegiatan & pemulihan masih menggunakan format lama	Petugas BNNP/K/Kota memperbaharui buku kegiatan & pemulihan menggunakan versi terbaru dan mensosialisasikannya kepada AP

Kategori	No.	Hasil Identifikasi Masalah	Rekomendasi
	2	Pencatatan & pendokumentasian pada buku kegiatan & pemulihan kurang lengkap	Petugas BNNP/K/Kota melakukan pendampingan terhadap AP untuk melengkapi pencatatan & pendokumentasian kegiatan & layanan IBM
	3	Belum tersedianya timeline sebagai bagian dari perencanaan kegiatan & layanan IBM	Petugas BNNP/K/Kota mendampingi AP dalam penyusunan timeline kegiatan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan
Materi/ konten	1	Kepala Desa/ Lurah enggan menerbitkan SK AP, karena menganggap akan bertanggung jawab dengan anggarannya	Petugas BNNP/K/Kota melakukan advokasi kepada Kepala Desa/ Lurah sejak awal pembentukan program IBM, sehingga pemahaman akan implementasi program semakin menyeluruh
	2	Penentuan lokasi Desa Bersinar dan IBM belum sejalan antara bidang P2M dan Rehabilitasi	Petugas BNNP/K/Kota melakukan sinergi & koordinasi antar bidang terkait penetapan lokasi Desa Bersinar dan IBM yang memungkinkan untuk menjalankan program dengan mempertimbangkan aspek jumlah penyalah guna narkoba, dukungan perangkat desa/ kelurahan, dukungan masyarakat, akses wilayah, serta SDM dan SDA yang potensial
Metode	1	Penilaian pascarehabilitasi belum dilaksanakan sebelum klien masuk ke tahap bina lanjut	Petugas BNNP/K/Kota memperhatikan kembali alur kegiatan & layanan IBM serta pedoman pascarehabilitasi
	2	Pemberian layanan terhadap klien tidak sesuai dengan alur layanan IBM	
	3	Jarak evaluasi perkembangan klien tahap 1 dan 2 kurang dari 3 bulan	

a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional
Deputi Rehabilitasi



Riza Sarasvita

Dra. Riza Sarasvita, M.Si, MHS, Ph.D



**KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR: KEP/ 260 /III/DE/RH.03/2022/BNN**

**TENTANG
PENETAPAN UNIT INTERVENSI BERBASIS MASYARAKAT
DI LINGKUNGAN BNN PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA TAHAP KEDUA
TAHUN ANGGARAN 2022**

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 70 huruf e dan f Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Badan Narkotika Nasional mempunyai tugas memberdayakan masyarakat serta memantau, mengarahkan dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. bahwa berdasarkan pasal 68 butir (2) huruf c, d dan e Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Masyarakat Desa berkewajiban mendorong terciptanya situasi yang aman, nyaman dan tenteram, memelihara dan mengembangkan nilai permusyawaratan, permufakatan, kekeluargaan dan kegotongroyongan, serta berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di Desa;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional Tahun 2020-2024, salah satu Indikator Kinerja Deputy Bidang Rehabilitasi adalah jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat;
- d. bahwa Badan Narkotika Nasional berupaya untuk meningkatkan ketersediaan intervensi penanganan penyalahgunaan narkotika sampai ke satuan pemerintahan terkecil yaitu Desa/ Kelurahan, salah satunya yaitu dengan memberdayakan fasilitas dan potensi masyarakat Desa/ Kelurahan sesuai dengan kearifan lokal bagi penyalah guna narkotika kategori ringan agar pulih, produktif dan berfungsi sosial;

/ e. bahwa...

- e. bahwa Badan Narkotika Nasional berupaya melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap anggota masyarakat di Desa/ Kelurahan yang melakukan intervensi penanganan penyalahgunaan narkotika di wilayahnya agar intervensi yang dilakukan sesuai dengan pedoman yang berlaku;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a s.d. huruf e, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional tentang Penetapan Unit Intervensi Berbasis Masyarakat di Lingkungan BNN Provinsi/ Kabupaten/ Kota Tahap Kedua Tahun Anggaran 2022.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 - 4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
 - 5. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024;
 - 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
 - 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 - 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - 9. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
 - 10. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/ Kota;
 - 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - 12. Program Kerja Deputy Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Tahun Anggaran 2022;
 - 13. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Badan Narkotika Nasional Tahun 2022 Satuan Kerja Deputy Bidang Rehabilitasi Nomor: SP DIPA-066.01.1.681642/2022 tanggal 17 November 2021.

/MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL TENTANG PENETAPAN UNIT INTERVENSI BERBASIS MASYARAKAT DI LINGKUNGAN BNN PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA TAHAP KEDUA TAHUN ANGGARAN 2022.**

KESATU : Menetapkan unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang tercantum dalam Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini menjadi unit pelaksana intervensi di bidang rehabilitasi terhadap penyalah guna narkoba yang dirancang dari masyarakat, untuk masyarakat dan oleh masyarakat melalui Agen Pemulihan dengan memanfaatkan fasilitas dan potensi masyarakat sesuai dengan kearifan lokal, di lingkungan BNN Provinsi/ Kabupaten/ Kota, terhitung mulai bulan ditetapkan sampai dengan bulan Desember 2022.

KEDUA : Pembinaan dan pengawasan Keputusan ini dilaksanakan oleh Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Nasional Provinsi, dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dengan catatan:

Bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala BNN
2. Sekretaris Utama BNN
3. Inspektur Utama BNN
4. Kepala BNNP/BNNK/Kota terkait
5. Yang bersangkutan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 14 Maret 2022

**a.n. KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
DEPUTI REHABILITASI**



Dra. RIZA SARASVITA, M.Si, MHS, Ph.D

**DAFTAR UNIT INTERVENSI BERBASIS MASYARAKAT
DI LINGKUNGAN BNN PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA TAHAP KEDUA
TAHUN ANGGARAN 2022**

No.	Provinsi	BNNP/Kab/Kota	Lokasi IBM		
			Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kota/ Kabupaten
1	Aceh	BNNP Aceh	Gampong Baro	Kec. Peukan Bada	Kab. Aceh Besar
2	Aceh	BNN Kab. Pidie Jaya	Gampong Keurisi Meunasah Raya	Kec. Jangka Buya	Kab. Pidie Jaya
3	Aceh	BNN Kab. Bireuen	Gampong Kuala Jeumpa	Kec. Jeumpa	Kab. Bireuen
4	Aceh	BNN Kab. Bireuen	Gampong Mon Keulayu	Kec. Gandapura	Kab. Bireuen
5	Aceh	BNN Kota Lhokseumawe	Gampong Jurong	Kec. Sawang	Kab. Aceh Utara
6	Aceh	BNN Kota Lhokseumawe	Gampong Lancok	Kec. Sawang	Kab. Aceh Utara
7	Aceh	BNN Kota Lhokseumawe	Gampong Meunasah Mee	Kec. Muara Dua	Kota Lhokseumawe
8	Aceh	BNN Kota Lhokseumawe	Gampong Meunasah Mesjid	Kec. Muara Dua	Kota Lhokseumawe
9	Aceh	BNN Kab. Aceh Tamiang	Gampong Tanjung Karang	Kec. Karang Baru	Kab. Aceh Tamiang
10	Aceh	BNN Kab. Pidie	Gampong Dayah Muara Garot	Kec. Indrajaya	Kab. Pidie
11	Aceh	BNN Kota Langsa	Gampong Alue Merbau	Kec. Langsa Timur	Kota Langsa
12	Aceh	BNN Kab. Aceh Selatan	Gampong Lhok Keutapang	Kec. Tapaktuan	Kab. Aceh Selatan
13	Aceh	BNN Kab. Gayo Lues	Gampong Penosan	Kec. Blang Jerango	Kab. Gayo Lues
14	Aceh	BNN Kota Sabang	Gampong Iboih	Kec. Sukakarya	Kota Sabang
15	Sumatera Utara	BNNP Sumatera Utara	Kel. Asam Kumbang	Kec. Medan Selayang	Kota Medan
16	Sumatera Utara	BNNP Sumatera Utara	Kel. Tanjung Sari	Kec. Medan Selayang	Kota Medan
17	Sumatera Utara	BNNP Sumatera Utara	Kel. Belawan II	Kec. Medan Belawan	Kota Medan
18	Sumatera Utara	BNN Kab. Karo	Kel. Gundaling I	Kec. Berastagi	Kab. Karo

No.	Provinsi	BNNP/Kab/Kota	Lokasi IBM		
			Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kota/ Kabupaten
19	Sumatera Utara	BNN Kab. Deli Serdang	Desa Rantau Panjang	Kec. Pantai Labu	Kab. Deli Serdang
20	Sumatera Utara	BNN Kab. Mandailing Natal	Desa Huraba I	Kec. Siabu	Kab. Mandailing Natal
21	Sumatera Utara	BNN Kab. Tapanuli Selatan	Desa Siamporik Dolok	Kec. Angkola Selatan	Kab. Tapanuli Selatan
22	Sumatera Utara	BNN Kota Tebing Tinggi	Kel. Bandar Utama	Kec. Tebing Tinggi Kota	Kota Tebing Tinggi
23	Sumatera Utara	BNN Kab. Simalungun	Kel. Perdagangan III	Kec. Bandar	Kab. Simalungun
24	Sumatera Utara	BNN Kab. Labuhanbatu	Desa Kampung Yaman	Kec. Aek Natas	Kab. Labuhanbatu Utara
25	Sumatera Barat	BNNP Sumatera Barat	Nagari Sungai Buluah Selatan	Kec. Batang Anai	Kab. Padang Pariaman
26	Sumatera Barat	BNNP Sumatera Barat	Kel. Pegambiran Ampalu Nan XX	Kec. Lubuk Begalung	Kota Padang
27	Riau	BNNP Riau	Desa Candi Rejo	Kec. Pasir Penyu	Kab. Indragiri Hulu
28	Riau	BNNP Riau	Desa Pandau Jaya	Kec. Siak Hulu	Kab. Kampar
29	Riau	BNN Kab. Pelalawan	Desa Lubuk Kembang Sari	Kec. Ukui	Kab. Pelalawan
30	Jambi	BNNP Jambi	Desa Kota Karang	Kec. Kumpeh Ulu	Kab. Muaro Jambi
31	Jambi	BNN Kab. Tanjung Jabung	Kel. Muara Sabak Ilir	Kec. Muara Sabak Timur	Kab. Tanjung Jabung Timur
32	Jambi	BNN Kota Jambi	Kel. Tanjung Sari	Kec. Jambi Timur	Kota Jambi
33	Jambi	BNN Kab. Batanghari	Desa Aro	Kec. Muara Bulian	Kab. Batanghari
34	Jambi	BNN Kab. Batanghari	Desa Ture	Kec. Pelayung	Kab. Batanghari
35	Jambi	BNN Kab. Batanghari	Kel. Kembang Paseban	Kec. Mersam	Kab. Batanghari
36	Jambi	BNN Kab. Batanghari	Desa Sungai Baung	Kec. Muara Bulian	Kab. Batanghari
37	Sumatera Selatan	BNN Kab. Empat Lawang	Desa Batu Panceh	Kec. Tebing Tinggi	Kab. Empat Lawang
38	Sumatera Selatan	BNN Kab. Muara Enim	Desa Muara Lawai	Kec. Muara Enim	Kab. Muara Enim
39	Sumatera Selatan	BNN Kab. Musi Rawas	Desa Sukarena	Kec. Sukakarya	Kab. Musi Rawas
40	Sumatera Selatan	BNN Kab. Ogan Komering Ilir	Desa Talang Pangeran	Kec. Teluk Gelam	Kab. Ogan Komering Ilir

No.	Provinsi	BNNP/Kab/Kota	Lokasi IBM		
			Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kota/ Kabupaten
41	Sumatera Selatan	BNN Kab. Ogan Komering Ulu	Desa Negeri Ratu	Kec. Bunga Mayang	Kab. Ogan Komering Ulu
42	Lampung	BNN Kab. Tanggamus	Pekon Gunung Tiga	Kec. Pugung	Kab. Tanggamus
43	Kep. Bangka Belitung	BNN Kab. Belitung	Desa Aik Pelempang Jaya	Kec. Tanjungpandan	Kab. Belitung
44	Kepulauan Riau	BNNP Kepulauan Riau	Kel. Kabil	Kec. Nongsa	Kota Batam
45	Bengkulu	BNNP Bengkulu	Kel. Sawah Lebar	Kec. Ratu Agung	Kota Bengkulu
46	Bengkulu	BNNP Bengkulu	Desa Sri Kuncoro	Kec. Pondok Kelapa	Kab. Bengkulu Tengah
47	Bengkulu	BNNP Bengkulu	Kel. Sumber Jaya	Kec. Kampung Melayu	Kota Bengkulu
48	Bengkulu	BNN Kab. Bengkulu Selatan	Desa Simpang Pino	Kec. Ulu Manna	Kab. Bengkulu Selatan
49	Bengkulu	BNN Kota Bengkulu	Kel. Pasar Baru	Kec. Teluk Segara	Kota Bengkulu
50	DKI Jakarta	BNN Kota Jakarta Timur	Kel. Palmeriam	Kec. Matraman	Kota Jakarta Timur
51	DKI Jakarta	BNN Kota Jakarta Timur	Kel. Penggilingan	Kec. Cakung	Kota Jakarta Timur
52	DKI Jakarta	BNN Kota Jakarta Timur	Kel. Pulogebang	Kec. Cakung	Kota Jakarta Timur
53	DKI Jakarta	BNN Kota Jakarta Timur	Kel. Cawang	Kec. Kramat Jati	Kota Jakarta Timur
54	DKI Jakarta	BNN Kota Jakarta Timur	Kel. Lubang Buaya	Kec. Cipayung	Kota Jakarta Timur
55	DKI Jakarta	BNN Kota Jakarta Timur	Kel. Kebon Manggis	Kec. Matraman	Kota Jakarta Timur
56	Banten	BNNP Banten	Kel. Cipondoh	Kec. Cipondoh	Kota Tangerang
57	Banten	BNNP Banten	Kel. Sukmajaya	Kec. Jombang	Kota Cilegon
58	Banten	BNN Kota Cilegon	Kel. Jombang Wetan	Kec. Jombang	Kota Cilegon
59	Banten	BNN Kota Tangerang	Kel. Cibodasari	Kec. Cibodas	Kota Tangerang
60	Jawa Barat	BNN Kota Bandung	Kel. Sukamiskin	Kec. Arcamanik	Kota Bandung
61	Jawa Barat	BNN Kota Cimahi	Kel. Cipageran	Kec. Cimahi Utara	Kota Cimahi
62	Jawa Barat	BNN Kab. Sukabumi	Desa Kompa	Kec. Parungkuda	Kab. Sukabumi

No.	Provinsi	BNNP/Kab/Kota	Lokasi IBM		
			Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kota/ Kabupaten
63	Jawa Barat	BNN Kab. Bogor	Desa Gunung Putri	Kec. Gunung Putri	Kab. Bogor
64	Jawa Barat	BNN Kab. Kuningan	Desa Langseb	Kec. Lebakwangi	Kab. Kuningan
65	Jawa Barat	BNN Kota Cirebon	Kel. Pulasaren	Kec. Pekalipan	Kota Cirebon
66	Jawa Barat	BNN Kab. Karawang	Kel. Purwasari	Kec. Purwasari	Kab. Karawang
67	Jawa Tengah	BNN Kab. Temanggung	Kel. Kebonsari	Kec. Temanggung	Kab. Temanggung
68	Jawa Tengah	BNN Kota Surakarta	Kel. Joyotakan	Kec. Serengan	Kota Surakarta
69	Jawa Timur	BNN Kab. Gresik	Desa Domas	Kec. Menganti	Kab. Gresik
70	Jawa Timur	BNN Kota Mojokerto	Kel. Prajurit Kulon	Kec. Prajurit Kulon	Kota Mojokerto
71	Jawa Timur	BNN Kota Mojokerto	Kel. Gunung Gedangan	Kec. Magersari	Kota Mojokerto
72	Jawa Timur	BNN Kab. Nganjuk	Desa Waung	Kec. Baron	Kab. Nganjuk
73	Jawa Timur	BNN Kab. Pasuruan	Desa Jatiarjo	Kec. Prigen	Kab. Pasuruan
74	Jawa Timur	BNN Kota Malang	Kel. Dinoyo	Kec. Lowokwaru	Kota Malang
75	Jawa Timur	BNN Kab. Sumenep	Desa Ellak Laok	Kec. Lenteng	Kab. Sumenep
76	Kalimantan Barat	BNN Kota Singkawang	Kel. Roban	Kec. Singkawang Tengah	Kota Singkawang
77	Kalimantan Barat	BNN Kab. Sanggau	Desa Pusat Damai	Kec. Parindu	Kab. Sanggau
78	Kalimantan Barat	BNN Kab. Bengkayang	Desa Sungai Pangkalan I	Kec. Sungai Raya	Kab. Bengkayang
79	Kalimantan Selatan	BNNP Kalimantan Selatan	Kel. Telawang	Kec. Banjarmasin Barat	Kota Banjarmasin
80	Kalimantan Selatan	BNNP Kalimantan Selatan	Kel. Mantuil	Kec. Banjarmasin Selatan	Kota Banjarmasin
81	Kalimantan Selatan	BNNP Kalimantan Selatan	Kel. Kelayan Tengah	Kec. Banjarmasin Selatan	Kota Banjarmasin
82	Kalimantan Selatan	BNN Kota Banjarmasin	Kel. Alalak Utara	Kec. Banjarmasin Utara	Kota Banjarmasin
83	Kalimantan Selatan	BNN Kab. Balangan	Desa Sungsum	Kec. Tebing Tinggi	Kab. Balangan
84	Kalimantan Selatan	BNN Kab. Balangan	Desa Lingsir	Kec. Paringin Selatan	Kab. Balangan

No.	Provinsi	BNNP/Kab/Kota	Lokasi IBM		
			Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kota/ Kabupaten
85	Kalimantan Selatan	BNN Kab. Barito Kuala	Kel. Pulau Sewangi	Kec. Alalak	Kab. Barito Kuala
86	Kalimantan Selatan	BNN Kab. Hulu Sungai Selatan	Desa Jembatan Merah	Kec. Padang Batung	Kab. Hulu Sungai Selatan
87	Kalimantan Selatan	BNN Kab. Tanah Laut	Kel. Karang Taruna	Kec. Pelaihari	Kab. Tanah Laut
88	Kalimantan Selatan	BNN Kab. Hulu Sungai Utara	Desa Panangkalaan	Kec. Amuntai Utara	Kab. Hulu Sungai Utara
89	Kalimantan Timur	BNNP Kalimantan Timur	Kel. Teluk Lingga	Kec. Sangatta Utara	Kab. Kutai Timur
90	Kalimantan Timur	BNN Kota Bontang	Kel. Api-Api	Kec. Bontang Utara	Kota Bontang
91	Sulawesi Utara	BNN Kab. Bolaang	Desa Tapa Aog	Kec. Lolayan	Kab. Bolaang Mongondow
92	Sulawesi Utara	BNN Kota Bitung	Kel. Bitung Tengah	Kec. Maesa	Kota Bitung
93	Sulawesi Utara	BNN Kab. Kepulauan	Kampung Petta Timur	Kec. Tabukan Utara	Kab. Kepulauan Sangihe
94	Sulawesi Tengah	BNNP Sulawesi Tengah	Desa Mpanau	Kec. Sigi Biromaru	Kab. Sigi
95	Sulawesi Tengah	BNNP Sulawesi Tengah	Desa Ngatabaru	Kec. Sigi Biromaru	Kab. Sigi
96	Sulawesi Tengah	BNN Kota Palu	Kel. Tatura Utara	Kec. Palu Selatan	Kota Palu
97	Sulawesi Tengah	BNN Kab. Donggala	Desa Tondo	Kec. Sirenja	Kab. Donggala
98	Sulawesi Tengah	BNN Kab. Poso	Kel. Bonesompe	Kec. Poso Kota Utara	Kab. Poso
99	Sulawesi Tengah	BNN Kab. Tojo Una Una	Desa Sumoli	Kec. Ratolindo	Kab. Tojo Una Una
100	Sulawesi Tengah	BNN Kab. Tojo Una Una	Desa Labuan	Kec. Ratolindo	Kab. Tojo Una Una
101	Sulawesi Tengah	BNN Kab. Banggai	Desa Bongganan	Kec. Tinangkung	Kab. Banggai Kepulauan
102	Sulawesi Tengah	BNN Kab. Morowali	Desa Sakita	Kec. Bungku Tengah	Kab. Morowali
103	Sulawesi Selatan	BNNP Sulawesi Selatan	Kel. Pandang	Kec. Panakukang	Kota Makassar
104	Sulawesi Selatan	BNNP Sulawesi Selatan	Kel. La'Latang	Kec. Tallo	Kota Makassar
105	Sulawesi Selatan	BNNP Sulawesi Selatan	Kel. Pisang Selatan	Kec. Ujung Pandang	Kota Makassar
106	Sulawesi Selatan	BNNP Sulawesi Selatan	Desa Kanjilo	Kec. Barombong	Kab. Gowa

No.	Provinsi	BNNP/Kab/Kota	Lokasi IBM		
			Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kota/ Kabupaten
107	Sulawesi Selatan	BNNP Sulawesi Selatan	Kel. Kampung Buyang	Kec. Mariso	Kota Makassar
108	Sulawesi Selatan	BNNP Sulawesi Selatan	Desa Majannang	Kec. Maros Baru	Kab. Maros
109	Sulawesi Selatan	BNNP Sulawesi Selatan	Kel. Parang Tambung	Kec. Tamalate	Kota Makassar
110	Sulawesi Selatan	BNNP Sulawesi Selatan	Desa Jombe	Kec. Turatea	Kab. Jeneponto
111	Sulawesi Selatan	BNN Kab. Tana Toraja	Kel. Batupapan	Kec. Makale	Kab. Tana Toraja
112	Sulawesi Selatan	BNN Kab. Tana Toraja	Kel. Bombongan	Kec. Makale	Kab. Tana Toraja
113	Sulawesi Selatan	BNN Kab. Tana Toraja	Kel. Tambunan	Kec. Makale Utara	Kab. Tana Toraja
114	Sulawesi Selatan	BNN Kab. Bone	Desa Pompanua	Kec. Ajangale	Kab. Watampone
115	Sulawesi Selatan	BNN Kota. Palopo	Kel. Sabbamparu	Kec. Wara Utara	Kota Palopo
116	Sulawesi Tenggara	BNNP Sulawesi Tenggara	Kel. Sanua	Kec. Kendari Barat	Kota Kendari
117	Sulawesi Tenggara	BNNP Sulawesi Tenggara	Kel. Kemaraya	Kec. Kendari Barat	Kota Kendari
118	Sulawesi Tenggara	BNNP Sulawesi Tenggara	Kel. Kadia	Kec. Kadia	Kota Kendari
119	Sulawesi Tenggara	BNNP Sulawesi Tenggara	Kel. Bende	Kec. Kadia	Kota Kendari
120	Sulawesi Tenggara	BNN Kab. Muna	Kel. Raha III	Kec. Katobu	Kab. Muna
121	Sulawesi Tenggara	BNN Kab. Kolaka	Desa Watuliandu	Kec. Kolaka	Kab. Kolaka
122	Sulawesi Tenggara	BNN Kota Kendari	Kel. Punggaloba	Kec. Kendari Barat	Kota Kendari
123	Sulawesi Tenggara	BNN Kota Baubau	Kel. Bukit Wolio indah	Kec. Wolio	Kota Baubau
124	Maluku	BNN Kota Tual	Kel. Ohoijang Watdek	Kec. Kei Kecil	Kab. Maluku Tenggara
125	Maluku Utara	BNNP Maluku Utara	Kel. Stadion	Kec. Kota Ternate Tengah	Kota Ternate
126	Maluku Utara	BNNP Maluku Utara	Kel. Dufa-Dufa	Kec. Kota Ternate Utara	Kota Ternate
127	Maluku Utara	BNN Kab. Pulau Morotai	Desa Wawama	Kec. Morotai Selatan	Kab. Pulau Morotai
128	Maluku Utara	BNN Kota Tidore Kepulauan	Kel. Tuguwaji	Kec. Tidore	Kota Tidore Kepulauan

No.	Provinsi	BNNP/Kab/Kota	Lokasi IBM		
			Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kota/ Kabupaten
129	Maluku Utara	BNN Kab. Halmahera Utara	Desa Rawajaya	Kec. Tobelo	Kab. Halmahera Utara
130	Bali	BNN Kab. Gianyar	Desa Sayan	Kec. Ubud	Kab. Gianyar
131	Bali	BNN Kab. Badung	Kel. Kuta	Kec. Kuta	Kab. Badung
132	NTB	BNN Kab. Sumbawa	Desa Batu Tering	Kec. Moyo Hulu	Kab. Sumbawa
133	NTT	BNNP NTT	Kel. Oebobo	Kec. Oebobo	Kota Kupang
134	NTT	BNNP NTT	Kel. Fatululi	Kec. Oebobo	Kota Kupang
135	NTT	BNN Kab. Belu	Desa Tulakadi	Kec. Tasifeto Timur	Kab. Belu
136	NTT	BNN Kota Kupang	Kel. Kayu Putih	Kec. Oebobo	Kota Kupang
137	NTT	BNN Kab. Rote Ndao	Desa Baadale	Kec. Lobalain	Kab. Rote Ndao
138	Gorontalo	BNNP Gorontalo	Desa Lombongo	Kec. Suwawa Tengah	Kab. Bone Bolango
139	Gorontalo	BNNP Gorontalo	Desa Ayula Tilango	Kec. Bulango Selatan	Kab. Bone Bolango
140	Gorontalo	BNNP Gorontalo	Kel. Pulubala	Kec. Kota Tengah	Kota Gorontalo
141	Gorontalo	BNNP Gorontalo	Desa Bubeya	Kec. Suwawa	Kab. Bone Bolango
142	Gorontalo	BNNP Gorontalo	Desa Boludawa	Kec. Suwawa	Kab. Bone Bolango
143	Gorontalo	BNN Kab. Bone Bolango	Desa Poowo	Kec. Kabila	Kab. Bone Bolango
144	Gorontalo	BNN Kab. Bone Bolango	Desa Alale	Kec. Suwawa Tengah	Kab. Bone Bolango
145	Gorontalo	BNN Kab. Gorontalo	Desa Ilotidea	Kec. Tilango	Kab. Gorontalo

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 14 Maret 2022

a.n. **KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
DEPUTI REHABILITASI**



Riza Sarasvita
Dra. RIZA SARASVITA, M.Si, MHS, Ph.D



**PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
KECAMATAN MENGANTI
DESA DOMAS**

Jl. Raya Domas Kec. Menganti Kab. Gresik Telp. (031) 7991697 Kode Pos 61174

KEPUTUSAN KEPALA DESA DOMAS

NOMOR : 441/38/437.II.14/2022

TENTANG

PENETAPAN TIM INTERVENSI BERBASIS MASYARAKAT (IBM)

**DESA DOMAS KECAMATAN MENGANTI
KABUPATEN GRESIK TAHUN 2022**

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA

KUASA KEPALA DESA DOMAS

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran kegiatan Layanan Rehabilitasi melalui Program Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) Desa Domas Tahun 2022 perlu menunjuk dan menetapkan Tim Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) ;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa Domas;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-undang No,mor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Instruksi Presiden Nomor 06 tahun 1016 tentang Rencana Aksi nasional P4GN Tahun 2018 , 2019;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
6. Surat Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Gresik Nomor B/ /IV/Ka/RH.02.00/2021/BNNK-GRS tanggal 12 April 2021 tentang Permohonan Penetapan SK Tim Intervensi Berbasis Masyarakat IBM;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA DOMAS KECAMATAN MENGANTI KABUPATEN GRESIK TENTANG PENETAPAN TIM INTERVENSI BERBASIS MASYARAKAT (IBM) KEGIATAN LAYANAN REHABILITASI DESA DOMAS KECAMATAN MENGANTI KABUPATEN GRESIK TAHUN 2022

- PERTAMA** : Menetapkan Nama-nama sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) Layanan Rehabilitasi bagi penyalahguna / Pecandu Narkoba di Desa Domas terhitung mulai tanggal ditetapkannya Surat Keputusan ini;
- KEDUA** : Tim Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA mempunyai tugas antara lain :
1. Intervensi singkat ;
 2. Penjangkauan dan pendampingan ;
 3. Seminar/ informasi terkait adiksi ;
 4. Pencegahan kekambuhan ;
 5. Pengetahuan dasar gangguan kejiwaan ;
 6. Pengetahuan dasar pencegahan dampak buruk ;
 7. Pengetahuan dasar konsekuensi hukum penyalahgunaan ;
 8. Pendampingan hukum (Bila tersedia pengacara & paralegal di wilayah) ;
 9. Manajemen emosi ;
 10. Intervensi keluarga ;
 11. Bimbingan vokasional ;
 12. Komunikasi efektif ;
 13. Menjalin hubungan sehat ;
- KETIGA** : Dalam pelaksanaan tugasnya Tim Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) dimaksud pada Diktum PERTAMA senantiasa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa Domas dan Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Gresik;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya;
- Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan;

Ditetapkan : di Gresik
Pada Tanggal : 2022



**SUSUNAN TIM INTERVENSI BERBASIS MASYARAKAT (IBM)
DESA DOMAS KECAMATAN MENGANTI KABUPATEN GRESIK
TAHUN 2022**

NO	NAMA
1	Tio Cahyo Prasetyo
2	Diah Sulung Safitri
3	Indra Jelita
4	Nuriyati
5	Lilik Handayani

Ditetapkan : di Gresik

Pada Tanggal : 2022

KEPALA DESA DOMAS



No	Jumlah Data Penyalahgunaan Narkotika di BNNK Gresik 2022			
	Bulan	Nama	Jenis kelamin	Barang Bukti
1.		ABDUL MAJID		11 (sebelas) pak plastik berisi Narkotika jenis Sabu dengan rincian masing-masing berat brutto beserta plastiknya : a. 0.59 (nol koma lima sembilan) gram; b. 0.6 (nol koma enam) gram; c. 0.59 (nol koma lima sembilan) gram; d. 0.61 (nol koma enam satu) gram; e. 0.37 (nol koma tiga tujuh) gram; f. 1.2 (satu koma dua) gram; g. 1.11 (satu koma sebelas) gram; h. 0.37 (nol koma tiga tujuh) gram; i. 0.34 (nol koma tiga empat) gram; j. 0.34 (nol koma tiga empat) gram; 0.31 (nol koma tiga satu) gram
2.		KHOIRUL SETIAWAN		
3.		AKHMAD MUZAYIN		
4.		MARHEN WIDYA PUTRA		1 (satu) pak plastic berisi Narkotika jenis Sabu dengan rincian masing-masing berat brutto beserta plastiknya 0.34 (nol koma tiga empat) gram
5.		ROBBY ADYAKSA		GANJA KERING 3 KILOGRAM



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI JAWA TIMUR
KEJAKSAAN NEGERI GRESIK

Jl. Pertama Bundar No. 2, Gresik

P-21

Nomor : B-2702/M.5.27/Enz.1/12/2022
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Pemberitahuan hasil penyidikan perkara pidana atas nama Tersangka ROBBY ADYAKSA melanggar pasal 114 (2) UU NO.35 TAHUN 2009 subsidair Pasal 111 (2) UU NO.35 TAHUN 2009 sudah lengkap.

GRESIK, 19 Desember 2022

KEPADA YTH.
Kepala BNN Kab Gresik
Di -
GRESIK

Sehubungan dengan penyerahan berkas perkara pidana atas nama Tersangka ROBBY ADYAKSA Nomor BP/03-BRNTS/X/2022/BNNKab-Grs tanggal 07 Oktober 2022 yang kami terima tanggal 19 Desember 2022 setelah dilakukan penelitian ternyata hasil penyidikannya sudah lengkap. Sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (3) huruf b, pasal 138 ayat (1) dan pasal 139 KUHAP supaya Saudara(i) menyerahkan tanggung jawab Tersangka dan barang bukti kepada kami, guna menentukan apakah perkara tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke Pengadilan.

Demikian untuk dimaklumi.

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI GRESIK
SELAKU PENUNTUT UMUM



MUHAMAD HAMDAN S, S.H.
Jaksa Madya NIP. 197503172000031002

Tembusan :

1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur di Surabaya;
2. Yth. Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Jawa Timur;
3. Yth. Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur;
4. Yth. Kepala Kepolisian Resort Gresik di Gresik
5. A r s i p



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan SERTIFIKAT ELEKTRONIK yang diterbitkan oleh BSSr



CMS





KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI JAWA TIMUR
KEJAKSAAN NEGERI GRESIK
Jl. Pertama Bundar No. 2, Gresik

P-21

Nomor : B-1142/M.5.27/Enz.1/04/2022
Sifat : Biasa
Lampiran : -

GRESIK, 26 April 2022

Perihal : Pemberitahuan hasil penyidikan
perkara pidana a.n ABDUL MAJID Als
BOLET dkk sudah lengkap.

KEPADA YTH.

Kepala BNN Kab Gresik

Di-

GRESIK

Schubungan dengan penyerahan berkas perkara pidana atas nama Tersangka ABDUL MAJID Als BOLET dkk Nomor BP/04/01-BRNTS/III/2022/BNNKab-GRS tanggal 18 Maret 2022 yang kami terima tanggal 12 April 2022 setelah dilakukan penelitian ternyata hasil penyidikannya sudah lengkap.

Sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (3) b, pasal 138 ayat (1) dan pasal 139 KUHAP supaya Saudara menyerahkan tanggung jawab Tersangka dan barang bukti kepada kami, guna menentukan apakah perkara tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke Pengadilan.

Demikian untuk dimaklumi.

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI GRESIK
SELAKU PENUNTUT UMUM



MUHAMAD HAMDAN S., S.H.
Jaksa Madya NIP. 197503172000031002

Tembusan :

1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur di Surabaya;
2. Yth. Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Jawa Timur;
3. Yth. Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur;
4. Yth. Kepala Kepolisian Resort Gresik di Gresik
5. Arsip



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan SERTIFIKAT ELEKTRONIK
yang diterbitkan oleh Esig





KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI JAWA TIMUR
KEJAKSAAN NEGERI GRESIK
Jl. Pertama Bundar No. 2, Gresik

P-21

Nomor : B-886/M.5.27/Enz.1/04/2022
Sifat : Biasa
Lampiran -

GRESIK, 20 April 2022

Perihal : Pemberitahuan hasil penyidikan
perkara pidana a.n MARHEN WIDYA
PUTRA sudah lengkap.

KEPADA YTH.

Kepala BNN Kab Gresik

Di-

GRESIK

Schubungan dengan penyerahan berkas perkara pidana atas nama Tersangka MARHEN WIDYA PUTRA Nomor BP/02-BRNTS/III/2022/BNNKab-Grs tanggal 18 Maret 2022 yang kami terima tanggal 06 April 2022 setelah dilakukan penelitian ternyata hasil penyidikannya sudah lengkap.

Sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (3) b, pasal 138 ayat (1) dan pasal 139 KUHAP supaya Saudara menyerahkan tanggung jawab Tersangka dan barang bukti kepada kami, guna menentukan apakah perkara tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke Pengadilan.

Demikian untuk dimaklumi.

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI GRESIK
SELAKU PENUNTUT UMUM



MUHAMAD HAMDAN S. S.H.
Jaksa Madya NIP. 197503172000031002

Tembusan :

1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur di Surabaya;
2. Yth. Kepala BNN Propinsi Jawa Timur di Surabaya;
3. Yth. Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Jawa Timur;
4. Yth. Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur;
5. Arsip



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan SERTIFIKAT ELEKTRONIK
yang diterbitkan oleh BNN



